ktsm

pionir
bahan
sandang

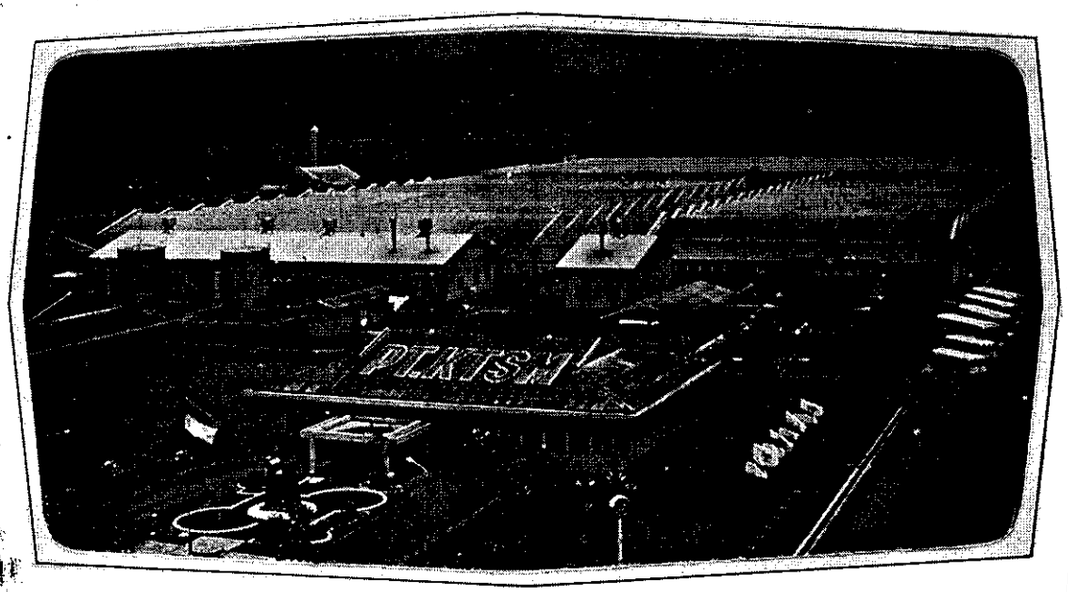

tetoron — cotton

P.T. KANEBO TOMEN SANDANG SYNTHETIC MILLS
(K. T. S. M.)

HEAD OFFICE : BOJONGMANGGU, PAMEUNGPEUK, TROMOL POS 55, PHONE 52560, BANDUNG, INDONESIA.

BRANCH OFFICE : WISMA NUSANTARA 12th FLOOR, JL. MH. THAMRIN 59, PHONE 41014, 56219, JAKARTA, INDONESIA.

mimbar ulama

SEKULARISME versus PANCASILA

H. Amirmachmud: NEGARA INDONESIA BUKAN NEGARA SEKULER

ISSN 0125 – 9415

TAHUN IV

33

Majalah Bulanan

MIMBAR ULAMA
Suara Majelis Ulama Indonesia

Diterbitkan oleh	:	Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia
Penasihat	:	H.Alamsjah Ratu Perwiranegara
Pemimpin Umum	:	Prof. Dr. Hamka
Wakil Pemimpin Umum	:	K.H. Syukri Gazali
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi	:	K.H. Hasan Basri
	:	
Wakil 1 / Tata Usaha	:	H. Amiruddin Siregar
Anggota Redaksi	:	H. Ismael Hassan S.H.
	:	Drs.H.Husein Segaff M.A
	:	Drs. Mastuhu M.Ed.
	:	Drs. Marwan Saridjo
	:	Drs. H.M. Atho Mudzhar.
Harga Eceran	:	Rp. 375,–
Bank	:	BNI 1946 Cab. Kebayoran Baru
	:	Rek. No. 4107
Alamat Redaksi	:	Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Mesjid Al-Azhar Kebayoran Baru Telepon 777246/776452 Jakarta Selatan.
Surat Tanda terdaftar	:	046/SK/Ditjen PPG/STT/1976
	:	Tanggal 12 Maret 1976
Surat izin Cetak	:	Skep/012-PK/1c-Kh/1976
Pencetak	:	Percetakan "Cemara Indah" Jakarta.

Mimbar Ulama diterbitkan dengan maksud sebagai media-komunikasi antara Ulama Indonesia dengan umara dan ummat/masyarakat luas dalam rangka menunjang Pembangunan Nasional dan kemajuan da'wah di Indonesia. Redaksi menerima sumbangan karangan berupa pembahasan ilmiah, tulisan-tulisan populer, tentang agama Islam dan pengetahuan umum lainnya. Juga menerima laporan-laporan tentang kegiatan Majelis Ulama dan Da'wah dari daerah-daerah di seluruh Nusantara.

Redaksi berhak mengadakan perobahan atas sesuatu karangan, sejauh tidak merobah isinya. Setiap karangan yang dimuat dalam Majalah ini mendapat imbalan yang sepantasnya. Tulisan yang dimuat dalam Mimbar Ulama tidak selamanya sejalan dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia.

Para penulis yang mengirimkan karangannya hendaknya menyertakan riwayat hidup singkatnya.

mimbar ulama

TAHUN IV

Ramadhan 1399 H
Agustus 1979 M

Pengantar Redaksi

3 Presiden Soeharto
Masyarakat Pancasila Adalah Masyarakat Sosialistis Relegius

6 H. Amir Machmud
Negara Indonesia Bukan Negara Sekuler

11 Prof. DR. H.M. Rasyidi
Sekularisasi dan Sekularisme

19 H. Soedarsono Mertoprawiro
Pengaruh Sekularisme Terhadap Stabilitas Nasional Dalam Pelaksanaan Pembangunan Nasional

26 H. Soekarsono
Pengaruh Sekularisme Terhadap Moral Bangsa

32 DR. Siddiq Fadhil
Pendidikan Islam di tengah-tengah Pendidikan Sekuler

38 Ghozi Dz
Wajah Dan Arah Sekularisme

44 Empat Tahun Majelis Ulama Indonesia

59 H. Amiruddin Siregar
Sumbangan Fikiran Tentang Pembinaan Kerukunan Hidup Diantara Ummat Beragama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

68 Drs. H. Husein Segaf M.A
Tune in Islam Dalam Lembaga dan Kehidupan Masyarakat Pancasila

75 Prof. H.A. Hasjmy
Telah lebih 30 tahun Departemen Agama mengelola Pendidikan Agama.

Pengantar Redaksi

Allahu Akbar, Allahu Akbar, laailaaha illallahu Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamdu.

Minal 'aidin wal faizin.

Mimbar Ulama No. 33 ini mengunjungi anda sekalian menjelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1399 H sehingga tepatlah bagi kami untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir bathin. Semoga tahun-tahun yang akan datang lebih membawa suasana cerah meninggalkan tahun yang penuh keresahan.

Perlu kami beritahukan bahwa tanggal 27 Juli yang lalu Majelis Ulama Indonesia genap berusia 4 tahun, dan telah diperingati tanggal 20 Juli secara sederhana tetapi cukup meriah.

Mimbar Ulama No. 33 ini masih dalam rentetan kejadian-kejadian yang lalu yaitu keresahan ummat Islam menghadapi masalah puasa Ramadhan, sekitar libur atau tidak liburnya sekolah-sekolah umum (Negeri). Pengungkapan masalah libur dan tidak libur telah membawa suatu aspek baru dalam masyarakat. Masalah sekularisme. Ramai pulalah masalah ini dibicarakan.

Presiden Soeharto pada tanggal 7 Mei 1979 telah memberikan jaminannya melalui Menteri Agama bahwa negara Pancasila tidak mungkin menjadi Negara sekuler. Pesan Presiden itu disampaikan oleh Menteri Agama kepada tokoh-tokoh Islam dan Pimpinan organisasi-organisasi Islam pada tanggal 8 Juni 1979 Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud berbicara pula tentang sekularisme itu.

Sewaktu Pimpinan Majelis Ulama Indonesia bertemu dengan Presiden tanggal 21 Mei 1979, oleh Presiden telah ditekankan pula bahwa Negara Pancasila tidak mungkin akan menjadi negara sekuler selama dasarnya Pancasila, kecuali apabila Pancasila itu diganti.

Dalam berita Pers Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 1979 sehubungan dengan rame-rame masalah Ramadhan memang disinyalir bahwa ada kelompok atau golongan yang ingin mensekulerkan Negara Pancasila. Biasa di Indonesia ini. Dulu pernah masalah sekuler ini ditentang, kemudian seolah-olah hilang pula masalahnya (menyelam), kemudian belakangan ini muncul kembali dan heboh pula. Tentunya kemudian akan terpendam dan menyelam lagi untuk pada saatnya timbul kembali. Kenapa begitu? Karena ada golongan yang khawatir sekali bahwa Pancasila itu akan diganti oleh ajaran Agama.

Oleh karenanya masih relevanlah kiranya kita mengemukakan masalah sekuler dan sekularisme itu dalam Mimbar Ulama. Mulai dari ungkapan Presiden Soeharto bahwa "Masyarakat Pancasila adalah Masyarakat Sosialistis Religious" sampai kepada pembahasan Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud : "Negara Indonesia bukan Negara Sekuler dilanjutkan dengan tulisan Prof. Dr.H.M. Rasyidi, H. Soedarsono, H. Soekarsono dan lainnya, telah memenuhi Mimbar Ulama No. 33 ini dengan ungkapan tentang sekularisme.

Selamat membaca !!! *(AMSIR).*

Masyarakat Pancasila Adalah Sosialistis Religius

Oleh Presiden Soeharto

Para Pemuka Agama Yang saya muliakan;

Dengan mengucap syukur ke hadirat Allah SWT saya merasa sangat berbahagia pagi ini dapat bertemu muka dengan Saudara-saudara para Pemuka Agama yang baru saja mengikuti penataran P4, Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN. Dalam penataran itu Saudara-saudara secara bersama-sama telah membahas pelaksanaan nilai-nilai, norma-norma dan pedoman-pedoman dasar yang mengikat kita semua sebagai satu bangsa dalam hidup bernegara. Oleh karena itu saya berpendapat bahwa berhasilnya penataran yang diikuti oleh para pemuka agama ini merupakan suatu langkah maju dan sangat penting dalam usaha kita memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan GBHN.

Dan lebih dari itu, berkumpulnya sejumlah pemuka-pemuka berbagai agama yang dipeluk oleh masyarakat kita, pergaulan erat dan rasa persaudaraan yang demikian dekat selama penataran ini, mendemonstrasikan kerukunan dan persaudaraan antara umat beragama seperti yang ditunjukkan oleh Pancasila. Kita semua berharap, agar suasana saling percaya dan rukun seperti itu akan tetap memancar makin luas ke dalam seluruh lapisan masyarakat kita.

Saudara-saudara ;

Dalam penataran ini pembahasan mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila—Ekaprasetia Pancakarsa dan pengamalannya tentulah beroleh tekanan cukup besar, sebab ia menyangkut nilai-nilai dasar bangsa kita yang diwariskan nenek moyang kita, yang oleh karena itu kita usahakan untuk mengamalkan dan melestarikannya.

*) Amanat Presiden dihadapan para Peserta Penataran para Pemuka Agama seluruh Indonesia pada tanggal 6 Juli 1979 di Jakarta.

Keterlibatan para pemuka agama—dari semua agama—dalam memasyarakatkan P4 mempunyai arti yang sangat besar, bukan saja karena pemuka agama adalah pimpinan dalam masyarakat, tetapi yang lebih penting adalah dengan memasyarakatkan P4 oleh para pemuka agama itu akan makin kokoh dan eratlah suasana kerukunan dan persaudaraan di antara masyarakat yang memeluk agama yang berbeda-beda, yang kini berarti akan memperkokoh kesatuan nasional dan ketahanan nasional, khususnya dalam bidang sosial budaya.

Seperti pernah saya katakan Masyarakat Pancasila yang merupakan idam-idaman kita itu, tidak lain kita maksudkan adalah masyarakat yang bersifat sosialistis-religius, yakni masyarakat yang berasaskan kekeluargaan kita dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa masyarakat kita bukanlah masyarakat yang individualistis, juga bukan masyarakat yang totaliter. Masyarakat Indonesia jelas bukan masyarakat yang sekularistis dan juga bukan masyarakat yang berdasarkan atas suatu agama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu agama mempunyai kedudukan dan peranan yang asasi dalam pembangunan bangsa kita di samping pembangunan di bidang mental spirituil lainnya dan di bidang fisik materiil.

Adalah sungguh tepat keputusan rakyat yang dituangkan dalam Ketetapan MPR No. II Tahun 1978, bahwa pangkal tolak dari penghayatan kodratnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan insan pribadi dan insan masyarakat, yang karenanya selama ia hidup di dunia ini ia harus mau dan mampu mengendalikan diri dan kepentingan pribadinya demi pelaksanaan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan negara. Seperti Saudara-saudara ketahui, justru inilah yang menjadi inti dari P4. Dan sudah barang tentu dalam hal ini tidak mungkin tanpa kaitan dengan nilai-nilai agama, sebab pangkal tolaknya adalah kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan masalah pengendalian diri menyangkut aspek manusiawi yang paling asasi. Oleh karena itu adalah sangat erat kaitannya dengan masalah kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan, menurut keyakinan agamanya masing-masing.

Karena itu adalah sangat jelas betapa pentingnya peranan para pemuka agama dalam usaha memasyarakatkan P4, sebab merekalah yang mampu memasuki segi-segi kedalaman dari kehidupan bangsa kita. Dengan ikut dan terlibat dalam usaha memasyarakatkan P4 tidaklah berarti bahwa hal itu akan mengurangi kegiatan Saudara-saudara selaku pemuka agama dalam pembinaan kehidupan agama dalam masyarakat kita. Justru sebaliknya, saya harapkan, agar kegiatan pembinaan keagamaan itu tercakup pula usaha memasyarakatkan P4. Dengan perkataan lain saya harapkan dalam usaha-usaha makin menyemarakkan kehidupan agama di tanah air kita sekaligus akan makin memantapkan Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi nasional bangsa kita.

Dengan membina kehidupan umat agama mereka masing-masing, dengan sendirinya mereka—secara langsung maupun tidak langsung— mendidik warganegara kita menjadi orang yang benar-benar mampu menguasai diri mereka atas dasar kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan dengan pangkal tolak kemampuan menguasai diri itu, mereka akan lebih mudah menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur lainnya yang tercakup dalam P4.

Para Pemuka Agama yang saya hormati.

Satu hal yang ingin pula saya kemukakan dalam kesempatan ini, yakni apa yang akhir-akhir ini seringkali disinyalir sebagai adanya keresahan di kalangan masyarakat kita. Saya kira adanya keresahan dalam masyarakat adalah wajar, terlebih lebih dalam masyarakat yang sedang membangun seperti Indonesia ini. Membangun berarti mengadakan perbaikan, perobahan dan bahkan perombakan. Dalam alam pembangunan yang penuh dengan perobahan-perobahan itu tidak dapat dihindari adanya keresahan, yang disebabkan oleh rasa kurang atau tidak puas, baik karena merasa dirugikan atau yang merasa kepentingannya tidak/kurang diperhatikan.

Saya juga tidak memungkiri bahwa sebagian rasa resah itu juga disebabkan oleh adanya ekses-ekses yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan dan akibat samping yang justru tidak kita inginkan. Akan tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengatasi ekses-ekses yang telah timbul dan berusaha menghindari nya di masa-masa yang akan datang.

Yang juga penting harus kita sadari adalah bagaimana kita menyalurkan dan mengemukakan rasa resah itu. Apabila kita dapat menyalurkan rasa keresahan itu melalui aturan permainan yang digariskan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, maka gejala keresahan itu bahkan dapat merupakan dinamika dalam masyarakat yang memang diperlukan oleh masyarakat yang sednag membangun. Tetapi apabila adanya gejala keresahan itu sengaja dibesar-besarkan di luar proporsinya, maka apabila tidak terkendalikan, malahan dapat merugikan masyarakat dan merugikan pembangunan itu sendiri. Hal ini sengaja saya singgung di sini, sebab saya rasa sebagai pemuka agama yang hidup dan bergaul akrab dengan masyarakat, Saudara-saudara dapat menyelami lebih dalam apa yang menyebabkan adanya perasaan resah itu.

Kita menyadari bahwa dalam pembangunan itu kemajuan demi kemajuan tidaklah kita capai melalui jalan yang lurus dan mulus, melainkan melalui usaha berat dan perjuangan. Kita sungguh wajib bersyukur bahwa rintangan demi rintangan dapat kita atasi sehingga dapat mencapai berbagai kemajuan.

Makin besar tujuan kita tentu akan makin banyak rintangan yang harus kita hadapi. Dan rintangan yang paling berat untuk diatasi bukan terletak di luar, melainkan justru di dalam diri kita sendiri. Dan disini kita kembali lagi terbentur pada masalah kemampuan menguasai diri. Dalam hubungan inilah terlihat betapa penting arti dari penataran-penataran yang kita selenggarakan selama ini. Kita semua mengharapkan agar dengan adanya penataran-penataran ini, yang merupakan gerakan nasional untuk memahami kembali gagasan-gagasan dasar kita sendiri, juga akan dapat memperkecil atau mengurangi rintangan yang bersifat subyektif itu, sehingga jalannya pembangunan nasional ini dapat makin lancar dan hasil-hasilnya makin nyata.

Saudara-saudara;

Demikianlah sambutan dan pesan-pesan singkat saya untuk Saudara-saudara renungkan. Saya mengharapkan sekembali Saudara-saudara di tempat masing-masing, Saudara-saudara dapat meneruskan tambahan pengetahuan Saudara-saudara yang diperoleh selama penataran ini kepada lingkungan masyarakat yang lebih luas dalam rangka memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan

Bersambung hal. 79

NEGARA INDONESIA BUKAN NEGARA SEKULER

Oleh H. Amirmachmud

Timbulnya masalah sekuler dan non-sekuler.

Dalam sejarah politik di Indonesia, masalah sekuler dan non-sekuler telah menjadi pembicaraan hangat, yaitu ketika Dewan Konstituante Republik Indonesia membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada satu pihak, segolongan ummat Islam menginginkan dilaksanakannya "Piagam Jakarta", sedangkan di pihak lain ada segolongan lain yang ingin menempatkan asas-asasyang berkenaan dengan "sosial-ekonomi" sebagai dasar negara.

Setelah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, masalah tersebut tidak dipersoalkan lagi, sampai pada waktu akhir-akhir ini. Mungkin dipengaruhi oleh perkembangan yang berlangsung di dunia internasional, mungkin pula tumbuhnya pikiran-pikiran yang berkembang di dalam negeri, terutama di kalangan ilmiah, pembicaraan mengenai sekularisme itu menghangat lagi.

Pengertian "sekularisme"

Sekularisme adalah suatu aliran dari pada etika sosial yang mencari dan ingin mengusahakan kesejahteraan manusia tanpa mengorbankan atau mengkerangkakannya kepada tatanilai religius, melainkan ingin mencapai kesejahteraan manusiawi itu melalui kekuatan akal, ilmu pengetahuan dan organisasi sosial. Pada umumnya dapat dikatakan, bahwa paham ini merupakan gerakan yang memprotes terhadap dominasi dan pengawasan ajaran-ajaran dan dogma-dogma agama yang muncul di Eropa bersama-sama bangkitnya Renaissance.

Dalam perkembangan sejarah selanjutnya, sekularisme itu sangat memperngaruhi kehidupan ilmu pengetahuan, filsafat, politik, ekonomi, kesenian, yang keseluruhannya melepaskan diri dari pengendalian agama, sehingga makin lemahlah pengaruh integratif agama itu, dan melemahkan pertumbuhan yang utuh daripada kepribadian manusia, sehingga menimbulkan krisis budaya pada manusia modern. Dengan kata lain, sekularisme adalah ajaran dengan dasar moral yang tidak religius. Alam pikiran yang tidak menempatkan pendidikan religi dalam pendidikan misalnya, merupakan pencerminan dari paham sekularisme itu.

Tinjauan dari segi Undang-Undang Dasar 1945

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, selain Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

dalam Pembukaannya, yang merupakan "geistliche Hintergrund" atau latar belakang kejiwaan bagi Batang Tubuh dan Penjelasannya, dalam pasal 29 ditegaskan :

(1). Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam penjelasannya dinyatakan, bahwa "Ayat ini menyatakan kepercayaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa".

Klausula-klausula tersebut jelas memperhatikan religi, memberi kesempatan untuk menjabarkan tata nilai sosial religius ke dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan, yang dalam negara sekuler biasanya tidak dinyatakan, bahkan diabaikan begitu saja.

Tinjauan dari segi Garis-Garis Besar Haluan Negara

Dalam GBHN 1978, makna yang terkandung dalam klausula-klausula Undang-undang Dasar tersebut terjabar lebih terperinci lagi, antara lain :

Bab II (Pola Dasar Pembangunan Nasional)

D. 1. (Modal Dasar)

e. Modal Rohaniah dan Mental, yaitu kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan tenaga penggerak yang tak ternilai harganya bagi pengisian aspirasi-aspirasi Bangsa. Juga kepercayaan dan keyakinan Bangsa atas kebenaran falsafah Pancasila merupakan modal sikap mental yang dapat membawa Bangsa menuju cita-citanya.

Bab III (Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang)

B (Arah Pembangunan Jangka Panjang)

1. Bangsa Indonesia menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya, keserasian hubungan antara bangsa-bangsa dan juga keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan mengejar kebahagiaan di akhirat, karena kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras adalah tujuan akhir Pembangunan Nasional, secara ringkas disebut masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sasaran bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya mencakup :

Atas dasar kepercayaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia harus benar-benar selaras dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama dan alam sekitarnya serta memiliki kemantapan keseimbangan dalam kehidupan lahiriah dan batiniah serta mempunyai jiwa yang dinamis dan semangat gotong royong yang berkembang, sehingga sanggup serta mampu untuk melanjutkan perjuangan Bangsa dalam mencapai tujuan Nasional dengan memanfaatkan landasan ekonomi yang seimbang.

Dalam Pola Umum REPELITA III (Bab IV) lebih terperinci lagi, dan lebih terarah :

b. Kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa makin dikembangkan, sehingga terbina hidup rukun di antara sesama ummat beragama, di antara sesama penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan antara sesama ummat beragama dan semua penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan Bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.

d. Diusahakan supaya terus bertambah sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kehidupan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk pendidikan agama dimasukkan ke dalam kurikulum di Sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai dengan Universitas-universitas negeri.

Pendidikan

a. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dst.

Klausula-klausula tersebut menegaskan perintah MPR kepada Presiden/Mandataris untuk membangun Agama di Bumi Pancasila, dengan sikap dan langkah nyata yang konkrit dan terarah. Ciri demikian ini jelas-jelas tidak merupakan ciri dari pada Negara sekuler.

Tinjauan dari segi kelembagaan Negara

Sejak awal pembentukannya, dalam Negara Republik Indonesia selalu ada **Departemen Agama**, yang khusus menangani masalah-masalah keagamaan di Indonesia, jadi tidak hanya semata-mata mengurusi sesuatu agama tertentu.

Hal ini merupakan salah sātu ciri yang tidak ada dalam Negara sekuler, apa lagi dalam negara atheis. Tetapi ciri itu juga tidak merupakan ciri negara yang theokratis, karena dalam negara theokratis itu segala sesuatu aturan dalam hidup kenegaraan dan kemasyarakatan disesuaikan dengan aturan-aturan keagamaan, **aturan-aturan sesuatu agama tertentu**, yang harus dilaksanakan oleh seluruh warganegaranya. **Negara Vatikan** mungkin adalah satu-satunya negara theokratis yang dapat dijadikan sample ideal pada waktu ini.

Negara **Amerika Serikat** dalam Declaration of Independencenya (1779) menyatakan :

"That all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and pursuit of Happiness".

Disini jelas diakui adanya kekuasaan Tuhan (dalam hal ini : **Creator**, Sang Maha Pencipta), sebagai sumber hak-hak asasi Manusia dan sumber kedaulatan Negara. Tetapi dalam pelaksanaannya lebih lanjut tidak dipermasalahkan lagi hubungan antara Manusia dengan Tuhannya, dibiarkan saja berjalan sendiri tanpa campur tangan Pemerintah; demikian pula kehidupan agama.

Di Indonesia nyata sekali **keharusan** campur tangan Pemerintah untuk memelihara dan mengembangkan agama, dalam arti : **bukan hanya sesuatu agama tertentu**.

Tinjauan dari segi penyelenggaraan pemerintahan

Jika kita perhatikan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ma-

ka nampak sekali bahwa pembinaan dan pengembangan hidup keagamaan di Bumi Pancasila ini selalu mendapatkan perhatian besar dari Pemerintah, antara lain :

(1). hadirnya Pejabat-Pejabat tinggi Pemerintah dalam upacara-upacara resmi keagamaan;
(2). dimasukkannya anggaran pembangunan di bidang keagamaan dalam APBN/APBD;
(3). kurikulum pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri;
(4). pengaturan tentang ketetapan Hari Raya, pelaksanaan amal zakat, bantuan pembangunan masjid;
(5). pengurusan perjalanan Haji oleh Pemerintah;

dan lain-lain.

Kesemuanya itu menunjukkan turut sertanya Pemerintah secara aktif dalam kehidupan praktis keagamaan, dalam arti membina dan mengembangkan nya untuk membentuk Manusia Indonesia yang utuh.

K e s i m p u l a n :

Dengan memahami hal-hal tersebut tadi, kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila merupakan pengakuan, bahwa negara, melakukan kebijaksanaan pemerintahan dan mengorganisasikan negara, itu harus dibimbing oleh kesadaran religius, **jadi bukan menurut aturan salah satu jenis religi saja.** Hal itu didasarkan atas anggapan, bahwa berjenis-jenis religi itu dalam penelitian perbandingan agama, senantiasa menunjukkan adanya suatu "universal religious consciousness in man".

b. Pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa itu merupakan pengakuan kesadaran religius dalam manusia.

c. Pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan kesadaran akan hubungan dengan Kenyataan yang Trensempiris, yaitu menyadari hubungan (walaupun bagi sementara orang hanya terasa samar-samar saja) dengan kekuasaan yang lebih tinggi, yang bersifat **trensempiris, transcendent**, yang dapat digambarkan sebagai Supreme God atau Opperwezen.

d. Konsekwensi dari pada pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pengakuan akan kesadaran religius ialah bahwa dalam **menegara ditolak pengingkaran** terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jelasnya ialah bahwa dalam usaha menegara **ditolak** atheisme, atau **ditolak juga sekularisme yang tertutup** (closed secularism) atau horisontalisme, yang membatasi hidup manusia pada dunia saja, dan norma-norma immanent (yang senantiasa meliputi segenap alam semesta) manusia duniawi saja.

Dengan berdasarkan Pancasila, maka :

(1). Negara Republik Indonesia **jelas bukan Negara theokrasi**;
(2). Negara Republik Indonesia **jelas bukan Negara sekuler**;
(3). Negara Republik Indonesia jelas bukan Negara atheis, yang menolak adanya Tuhan Yang Maha Esa, sehingga aspirasi **komunisme** pasti ditolak;
(4). Negara Republik Indonesia **membina kehidupan keagamaan secara aktif**

yang membuktikan bahwa Negara Republik Indonesia bukan negara sekuler, Negara sekuler memperhatikan kehidupan duniawi semata-mata.

(5). Kesemuanya itu didasarkan atas kenyataan yang hidup, yaitu adanya kesadaran religius dari pada bangsa Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Pancasila.

Kesimpulan akhir.

Negara Republik Indonesia bukan negara sekuler;
Negara Republik Indonesia bukan negara theokrasi.
Negara Republik Indonesia adalah Negara Pancasila, yang menempatkan "Keridhloan Tuhan Yang Maha Esa" sebagai suatu ajaran yang fundamental.****

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

P.T. ASURANSI JIWASRAYA

Kantor Pusat : Jl. Ir. H. Juanda No. 34 Jakarta
Tilpon : 345031 (5 saluran)
Telex : 45601 ASJIWA IA.

Persero PT. ASURANSI JIWASRAYA adalah satu-satunya Perusahaan Asuransi Jiwa milik Negara c.q. Departemen Keuangan R.I. sebagai Pemegang Saham Tunggal.

Perusahaan ini adalah suatu perusahaan atas hasil peleburan dari 9 Perusahaan milik Belanda, seperti NILLMIJ VAN 1859, NEDERLANDEN VAN 1845 dan sebaginya, serta sebuah Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional, yaitu P.T. Pertanggungan Jiwa "DHARMA NASIONAL".

Karenanya JIWASRAYA mempunyai ASSETS YANG BESAR.

JIWASRAYA didirikan atas dasar Peraturan Pemerintah No. 214 tahun 1961, Surat Keputusan Menteri Urusan Perasuransian No. 2/SK/66, Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1972 dan dipertegas dengan Akte Notaris Mohamad Ali No. 12 tanggal 23 Maret 1973.

Berpengalaman dalam bidang usaha asuransi jiwa sejak tahun 1859 dan selalu meningkatkan mutu pelayanannya sesuai dengan perkembangan teknik asuransi jiwa dunia modern.

JIWASRAYA mempersembahkan kehadapan Anda, berbagai jenis asuransi jiwa PERORANGAN dan KUMPULAN, dengan TARIP YANG SANGAT RENDAH dan dengan sistim Pembayaran Uang Asuransi yang sangat menarik serta menguntungkan Anda sekeluarga. Diciptakan hal itu oleh JIWASRAYA, demi terwujudnya JAMINAN KESEJAHTERAAN ANDA SEKELUARGA menjelang kehidupan di Hari Tua.

Kami merasa sangat bangga, bila dapat membantu terwujudnya JAMINAN KESEJAHTERAAN ANDA SEKELUARGA tersebut, berkat POLIS-POLIS ASURANSI JIWASRAYA yang sesuai menurut KEBUTUHAN serta KEMAMPUAN Anda.

Untuk keterangan selengkapnya, Anda dapat menghubungi JIWASRAYA terdekat, atau melalui para Petugas JIWASRAYA dimana pun Anda jumpai.

ALAMAT KANTOR-KANTOR CABANG JIWASRAYA di SELURUH INDONESIA

1.	JAKARTA	Jl. Kebayoran baru no. 66 Tilpon : 777451, 710857, 710821	7.	UJUNG PANDANG	Jl. Jenderal Sudirman No. 9 Tilpon : 4282 — 6692
2.	BANDUNG	Jl. Asia Afrika No. 53 Tilpon : 51962	8.	BANJARMASIN	Jl. Pangeran Antasari No. 90 Tilpon : 2507
3.	SEMARANG	Jl. Let. Jen. Suprapto No. 23 Tilpon : 27257 (2 saluran)	9.	DENPASAR	Jl. Diponegoro No. 57 Tilpon : 2076
4.	SURABAYA	Jl. Jembatan Merah No. 11 Tilpon : 22899 — 22982,	10.	MANADO	Jl. Sam Ratulangi No. 46 Tilpon : 4032 — 3632
5.	PALEMBANG	Jl. Kapten Rivai No. 1 Tilpon : 21270	11.	PAKAN BARU	Jl. Jend. Sudirman No. 205 Tilpon : 23394.
6.	MEDAN	Jl. Palang Merah No. 17 Tilpon : 21844			

KESEJAHTERAAN MENGIRINGI SETIAP LANGKAH ANDA
BILA ANDA MEMILIKI POLIS ASURANSI JIWASRAYA

Sekularisasi Dan Sekularisme

Oleh Prof. Dr. H. M. Rasyidi

Semenjak beberapa bulan yang akhir-akhir ini alam pikiran Indonesia, untuk kesekian kalinya Ummat Islam Indonesia mendapat tantangan dalam menghayati agamanya. Bulan Ramadhan yang sudah menjadi kebudayaan bangsa untuk menjadi liburan bagi para murid sekolah, mulai tahun ini dijadikan sebagai bulan-bulan yang lain, dimana anak-anak tetap belajar.

Pengumuman Kanwil P & K DKI Jakarta tanggal 12 Juli 1979 mengatakan bahwa waktu libur sekolah adalah sepuluh hari. Yakni, tiga hari yang pertama dalam bulan puasa dan 7 hari sekitar hari raya, mulai tanggal 20 sampai tanggal 29 Agustus 1979.

Mula-mula dikatakan oleh Menteri P & K Daoed Yoesoef, bahwa pada dasarnya dalam bulan Ramadhan, sekolah tetap terbuka, tetapi ada beberapa hari liburan di sela-selanya. Keterangan tersebut kemudian diperbaiki oleh Presiden Soeharto dengan mengatakan bahwa pada dasarnya dalam bulan Ramadhan sekolah diliburkan, tetapi ada hari-hari dimana sekolah-sekolah itu dibuka. Bagi orang yang teliti, keterangan Menteri P & K serta reformulasi Presiden itu tidak ada perbedaannya sama sekali.

Soal libur bulan puasa telah menimbulkan teriakan-teriakan bahwa kita Ummat Islam diarahkan kepada sekularisasi. Pihak Pemerintah menjawab bahwa selama sila pertama dalam Pancasila kita adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, tak mungkin terjadi sekularisasi di Republik Indonesia.

Banyak orang yang bertanya kepada saya, "Apakah sesungguhnya sekularisasi dan sekularisme itu"? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, di bawah ini saya sajikan urian sebagi berikut :

Pada tahun 1972, saya terpaksa menulis buku yang berjudul **Koreksi Terhadap Drs. Nurcholis Madjid Tentang Sekularisasi**, diterbitkan oleh "Bulan Bintang" Jakarta.

Dalam buku tersebut, dari akhir halaman 15 sampai dua pertiga halaman 18, saya menulis sebagai berikut :

Istilah sekularisasi berasal dari kata Latin "sacculum", artinya suatu zaman (an age), satu abad atau lebih sedikit. Sekularis berarti : berhubungan dengan suatu masa tertentu. Kalau sekarang ada Olympic Games di Munchen, Jerman Barat, maka dahulu ada Secular Games yang diadakan tiap 120 tahun sekali, dan di sana dinyanyikan secular hymns, karena peristiwa tersebut adalah peristiwa keagamaan. Baru pada abad pertengahan terjadi langkah-langkah pertama untuk memisahkan bidang sekular dari bidang agama. Sekular berarti hal-hal yang berhubungan dengan zaman sekarang (dunia), sedang religius adalah yang berhubungan dengan

hari kemudian. Sedikit demi sedikit urusan keduniaan di Barat (yang beragama Katolik, karena Protestan belum timbul) mendapat kemerdekaan dari pengawasan gereja. Setelah reformasi yakni timbulnya agama Protestan yang dipimpin oleh Martin Luther (1483–1546), maka bertambah luaslah bidang-bidang yang melepaskan diri dari pengawasan gereja.

Pada abad 19, sekular diartikan sebagai bidang-bidang dimana gereja atau Christian Conscience tidak berhak sama sekali untuk ikut campur dalam bidang-bidang, seperti politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan. Pada waktu itu sudah terdengar suara-suara yang menentang sekular, seperti Robertson of Brighton yang pada tahun 1863 berkata : "We stigmatize first one department of life and then another as secular, and so religion becomes a pale, unreal thing", yang artinya : "Kita mengecap satu bidang kehidupan sebagai sekular, kemudian satu bidang lagi, dan akhirnya Agama menjadi hal yang kabur dan tidak riil.

Pada abad 20, banyak lagi bidang-bidang kehidupan telah terlepas dari pengamatan-pengamatan gereja seperti universitas-universitas, pengajaran, rumah sakit, pelayanan-pelayanan sosial, sehingga akhirnya agama hanya terbatas dalam kegiatan-kegiatan dalam gereja dan taqwa perorangan (ecclesiastical activity and personal piety).

Dalam menghadapi menyempitnya bidang keagamaan, maka orang Barat mulai menyebarkan idee tentang Secular Christianity, yang maksudnya agar bangsa-bangsa pengikut agama Kristen jangan hanya bermenung di gereja memupuk rasa taqwa perorangan, akan tetapi mereka harus ikut aktif dalam segala bidang-bidang keduniaan. Seorang ahli theologi Jerman, Bonhoeffer, berkata : Insan Kristen tidak berarti chruchy (hanya termenung di gereja), akan tetapi harus menjadi manusia sepenuhnya (fully human).

Allan Richardson, dalam bukunya **Religion in Contemporary Debate**, berkata : "We would have preferred to speak of the object of the Chirstian religion as the abolotion of secular sphere, so that no departments of life should be thought of as outside the Sovereign lordship of Christ".

Sebagai seorang yang beragama Kristen ia berkata : "Saya lebih suka mengatakan bahwa tujuan agama Kristen adalah untuk menghilangkan bidang sekular, sehingga tidak ada bidang-bidang kehidupan yang berada di luar kuasa (Nabi) Isa".

Istilah sécularism lahir pada thaun 1851, diuraikan oleh G.S Holyoake (1817–1906) sebagai nama sistem etika plus filsafat yang bertujuan memberi interpretasi atau pengaturan kepada kehidupan manusia tanpa kepercayaan kepada Tuhan. Kitab Suci atau hidup di hari kemudian. Ia mendirikan Secular Societies di beberapa tempat di negeri Inggeris. Charles Bradlaugh, yang menjadi Ketua London Secular Society dari tahun 1858–1890 adalah seorang atheist pertama yang duduk dalam parlemen Inggeris tanpa mengambil sumpah. Anggota-anggota perhimpunan tersebut mendapat julukan "secularist". Akan tetapi generasi sesudah mereka lebih suka mempergunakan kata-kata "humanist".

Lebih lanjut Allan Richardson berkata : "It would help to remove some of the confusion in the contemporary religious discussion if theologians would follow their example and abandon the use of the words 'secular' and 'secularism', in view of their association with an unhappy era of antireligious propaganda".

Artinya : "Para teolog akan dapat membantu menghilangkan suasana kekacauan, meskipun hanya sebagian, yang sering dialami dalam pembicaraan-pembicaraan mengenai soal-soal keagamaan dewasa ini, sekiranya para teolog itu sanggup bercermin kepada mereka dan meninggalkan pemakaian kata-kata 'secular' dan 'secularisme', hal ini berhubung denga asosiasi mereka dengan suatu masa yang menyeluruhkan, penuh dengan propaganda anti-agama".

Allan Richardson lebih lanjut menulis : "In actual English usage today the word "secularisme" commonly denotes the widespread practical tendency to ignore God and all religious questions and observance through preoccupation with this worldly (secular) concerns, keeping up with every one else, "getting on" in the world, the rat-race which leaves one too exhilarated or too exhausted to sit down and think about ultimate things".

Artinya : "Dalam bahasa Inggeris yang dipakai dewasa ini, kata "secularism" lazim diartikan sebagai suatu sikap kecenderungan yang terdapat luas di kalangan masyarakat untuk secara mudah menganggap sepi kepada Tuhan dan semua persoalan dan kegiatan keagamaan oleh karena kesibukan dengan hal-hal duniawi (sekular), mengimbangi gerak setiap orang lain, mencari kemajuan di dunia ini, suatu lomba tiada hentinya yang membuat seseorang terlampau mabuk atau kehabisan tenaga, sehingga ia tidak sempat duduk dan berfikir mengenai hal-hal ukhrawi".

Kembali kepada soal sekularisasi.

Bagi orang Barat, sekularisasi yang telah mulai sejak abad pertengahan dipandang sebagai perkembangan sejarah yang tak dapat dielakkan (inevitable). Setelah Kerajaan Romawi Barat hancur akibat serangan-serangan musuhnya, Paus dan Gereja mengambil alih kekuasaan politik dan ekonomi. Tiap-tiap kekuasaan itu merusak moral penguasa; dalam hal ini Gereja tidak terkecuali. Dengan timbulnya nasionalisme di Eropa, maka orang-orang Eropa melepaskan diri dari kekuasaan Gereja. Pada pertengahan abad 20 dapat dikatakan selesailah proses sekularisasi.

Sekularisasi perlu dibedakan dengan practical secularism, yaitu sekularism yang tidak bersandar kepada ideologi dan sekedar ditinjau dari sudut praktis. Ini terjadi karena gereja tidak dapat menyesuaikan diri dengan perobahan masyarakat, sehingga rakyat tidak lagi mengindahkan kepada ajaran-ajaran gereja.

Menurut Allan Richardson, dunia yang kami lihat sekarang ini adalah hasil daripada sekularisasi ummat Kristen atau peradaban Kristen dan bukan sekularisasi Agama Kristen, artinya ialah sebagai hasil daripada sikap pemerintah-pemerintah yang bukan gerejani untuk menerima idee-idee serta peradaban Abad Pertengahan.

Inilah kata-kata Allan Richardson dalam bukunya **Religion in Contemporary Debate**, pasal dua berjudul : "Religion as the abolition of the Secular" (Agama sebagai Penghapus Bidang Sekular). Kata-kata Allan Richardson, seorang profesor pada Universitas Inggeris di Nottingham, saya rasa dapat menjadi pegangan bagi kita sekalian untuk memahami arti sekularism dan sekularisasi.

Dari uraian tersebut di atas dapat diringkaskan beberapa pokok :

Pertama : Di dunia Barat atau dunia Katolik (karena Protestan belum lahir) pada Abad Pertengahan sedikit demi sedikit urusan keduniaan mendapat kemerdekaan dari pengawasan gereja di Roma. Dan setelah terjadinya reformasi, yakni timbulnya agama Protestan yang dipimpin oleh Martin Luther (1483–1546) maka bertambah luaslah bidang-bidang yang melepaskan diri dari pengawasan gereja.

Pada abad 19 juga timbul filsafat positivisme yang dicetuskan oleh filsuf Perancis August Comte (1795–1857) yang pada pokoknya mengatakan bahwa kemajuan fikiran manusia itu melalui tiga tahap, yakni tahap Ketuhanan atau Agama (Etat Theologique), kemudian tahap metafisik (Etat Metaphysique) dan akhirnya sampai ke tingkat positif (Etat Positive) atau tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam tahap positif ini manusia tidak memerlukan lagi kepada Tuhan atau agama.

Kedua : Istilah sekularisme timbul tahun 1851, diuraikan oleh ahli pikir Inggris G.S. Holyoake (1817–1906) sebagai nama sistem filsafat yang bertujuan memberi interpretasi atau pengaturan kepada kehidupan manusia tanpa kepercayaan kepada Tuhan, wahyu dan hari kemudian. Ia mendirikan Secular Societies di beberapa tempat di negeri Inggris. Anggota-anggotanya dinamakan sekularist, akan tetapi generasi sesudah mereka lebih suka menamakan diri mereka generasi sesudah mereka lebih suka dengan humanist, dan aliran mereka dinamakan humanisme.

Akibat dari memisahnya bermacam-macam bidang kehidupan manusia di Barat dari gereja telah dirasakan bahayanya oleh para ahli pikir. Robertson of Brighton pada tahun 1863 berakta : "We stigmatize first one department of life and then a other as secular, and so religon becomes a pale, unreal things", artinya: "Kita mengecap satu bidang kehidupan sebagai sekular, kemudian satu bidang lagi, dan akhirnya agama menjadi kabur dan tidak riil' .

Pada waktu ini di Barat, gejala agama nampak hanya pada kelahiran, perkawinan dan kematian, sebagai yang dapat dibaca oleh para mahasiswa dalam buku sosiologi karangan Ogborn.

Pada abad ke 20 banyak lagi bidang-bidang kehidupan yang terlepas dari pengamatan gereja, seperti universitas-universitas, pengajaran, rumah sakit dan pelayanan-pelayanan sosial, sehingga akhirnya agama hanya terbatas dalam kegiatan gereja atau rasa keagamaan perorangan (ecclesiastical activity and personal piety).

Dalam menghadapi menyempitnya bidang keagamaan, maka orang Barat mulai menyebarkan idee tentang secular chirstianity, yang maksudnya agar bangsa-bangsa pengikut agama Kristen jangan hanya bermenung di gereja, memupuk rasa keagamaan perorangan, akan tetapi mereka harus aktif dalam segala bidang keduniaan. Seorang ahli theologie Jerman Bonhoeffer berkata, "Insan Krsiten tidak berarti churchy (hanya termenung di gereja), akan tetapi harus menjadi manusia sepenuhnya (fully human)."

Allan Richardson, dalam bukunya **Relegion in Contemporary Debate**, berkata : "We would have preferred to speak of the object of the Christian religion as the abolotion of secular sphere, so that no departments of life should be thought of as outside the Sovereign lordship or Christ".
Artinya : Saya lebih suka mengatakan bahwa tujuan agama Kristen adalah untuk menghilangkan bidang sekular sehingga tak ada bidang kehidupan yang berada di luar Ketuhanan Yesus Kristus".

Sesungguhnya dunia Barat memang terombang-ambing antara agama dan sekularisme. Sebabnya adalah, bahwa kebudayaan Barat itu bersumber kepada dua sumber pokok yang tidak pernah bersatu. Yaitu satu sumber dari Yunani dan Romawi, dan sumber lain dari Palestina. Dua tradisi tersebut kadang-kadang mengalami konflik dan kadang-kadang mengalami keserasian, kadang-kadang yang satu menguasai sumber yang lain, kadang-kadang sumber itu saling bantu membantu, akan tetapi kedua sumber tersebut tak pernah menjadi satu. Seorang Barat mempunyai dua loyalitas, yaitu loyalitas terhadap agamanya, dan loyalitas terhadap peninggalan sekular, dari politik dan hukum sampai gramatika. Dengan begitu maka di dunia Barat agama dipandang sebagai hanya satu faktor dalam kebudayaan.

Hal tersebut di atas saya kutip tulisan Prof. Dr. Wilfred Cantwel Smith dalam bukunya **The Faith of Other Men** sebagai berikut : "I have often been struck by the fact that western culture has two fundamental sources, which it has never entirely fused, one from Greece and Rome, one from Palestine. Those two tradisions have sometimes been in conflict, sometimes in harmony, sometimes one has tended to dominate, sometimes the other often the two intertwined but they have never coalesced. A westerner has two loyalities, one to his religious faith, the other to his secular heritage with all its range from politic and law to grammar. In the Western world, accordingly, what the West calls "religion" is seen as one factor in the total civilization".

Akhir-akhir ini kecenderungan untuk sekularisasi dan sekularisme tetap kuat. Harvey Coy ahli theologi dari Universitas Harvard mengarang buku berjudul **The Future Snock** (kejutan Masa Datang). Dalam buku tersebut ia menunjukkan perobahan-perobahan yang sangat pesat, dari segi material. Gedung-gedung pencakar langit timbul di bekas perkampungan, segala sesuatu merobah cara hidup dan berpikir, cara bergaul, semua dengan gaya baru.

Kemudian ia menerbitkan karangan yang lebih baru, yang berjudul **The Secular City**, Negara (Masyarakat) Sekular. Perhatian kepada buku tersebut sangat besar sehingga dalam waktu satu tahun, seperempat juta eksemplaar dapat terjual.

Pokok isi buku tersebut, sebagai yang dikatakan dalam resensi dalam **The Christian Century**, " a Christian acclamation of both the emergence of secular urban civilization and the breakdown of traditional religion", artinya : "Aklamasi (persetujuan) Kristen terhadap timbulnya kebudayaan kota yang sekular dan hancurnya agama tradisional".

Menurut Cornelis Van Peursen dari Universitas Leiden "Secularization is the deliverance of man first from religion and then from metaphisical control over his reason and his language". Artinya : "Secularisasi adalah pembebasan manusia, pertama daripada agama, dan kedua daripada kontrol metafisik terhadap pikirannya dan bahasanya".

Harvey Cox menambah : "It is loosing of the world from religion and quasi religious understanding of itself. The dispelling of all closed world veiws, the breaking of all supernatural myths and sacred symbol : Secularization occurs when man turns his attention away from world beyond and toward this world and this time". Artinya : "Sekularisasi adalah pembebasan dunia, pertama daripada agama dan pemahaman dunia atas dasar-dasar yang berbau keagamaan. "Sekularisasi" adalah pengenyahan dari paham-paham yang tertutup, penghancuran segala mitos supernatural dan simbol-simbol yang dianggap keramat. "Sekularisasi

terjadi jika seseorang memalingkan perhtaiannya daripada akhirat dan mengarahkannya kepada dunia ini dan saat ini.

Harvey Cox mendasarkan sekularisasi kepada Injil. Ia menyebutkan tiga hal: **Pertama**, penciptaan alam sebagai menghilangkan anggapan bahwa alam itu ada hubungannya dengan agama; **kedua**, Exodus (keluarnya Bani Israel dari Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa) sebagai menghilangkan anggapan bahwa politik itu ada hubungannya dengan agama; **ketiga**, bahwa sepuluh peraturan (Convenant of Sinai) menghilangkan anggapan bahwa nilai itu ada hubungannya dengan agama. Dengan perkataan lain tiga hal tersebut adalah :

Pertama, dengan keyakinan bahwa alam itu diciptakan Tuhan, maka alam itu bukan Tuhan dan tidak boleh disembah.

Kedua, pada zaman dahulu raja-raja menganggap dirinya Tuhan atau memegang kekuasaan yang diberikan Tuhan, degnan begitu maka orang tidak berhak untuk menentang pemerintahan. Tetapi dengan adanya Exodus, nyata bahwa politik tidak ada hubungannya dengan agama dan semata-mata merupakan soal dunia. maka perlu dengan cara Niccola Machiavelli (1469–1529), ahli politik Itali yang berpendirian bahwa untuk berkuasa segala cara adalah halal.

Ketiga, dengan adanya sepuluh perintah dari Tuhan kepada Bani Israel yaitu yang biasa dinamakan dengan Decolog, yakni seperti yang tersebut dalam Kitab Keluaran No. 20 dan Kitab Ulangan No. 5 :

1. Jangan ada padamu ilah (sebab lain dihadapan hadiratku.
2. Jangan kamu memperbuat akan dirimu patung yang terpahat
3. jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia
4. Jangan bekerja pada hari Sabtu.
5. Hormatilah ibu bapamu
6. jangan membunuh
7. Jangan berzina
8. Jangan mencuri
9. Jangan memberikan kesaksian dusta
10. Jangan ingin rumah, biri-biri, hamba laki-laki, binatang, barang-barang orang lain.

Maka segala peraturan-peraturan yang khusus untuk bangsa atau suku atau tempat tertentu menjadi relative; bahasa yang dipakai oleh Harvey Cox adalah relativised, berarti bahwa masing-masing kelompok dapat menentukan moralnya sendiri seperti pragmatism, existensialism dan lain-lain.

Keterangan Harvey Cox tersebut tidak dapat diterima secara mutlak. Tuhan menciptakan alam bukan berarti kita dapat mengexploitir alam dan menggunakan nya semau kita. Dalam alam ada hal-hal yang baik yang harus kita manfaatkan dan ada pula hal-hal yang menyebabkan kemelaratan, seperti ganja umpamanya, yang harus kita singkiri.

Exodus Israel dari Mesir bukan berarti bahwa politik itu urusan dunia yang tidak ada hubungannya dengan agama. Exodus hanya menunjukkan bahwa raja bukan Tuhan, Tetapi Tuhan yang sesungguhnya itu ada, dan Ia telah memberikan petunjuk bagi kita dalam Qur'an tentang politik, dan petunjuk itu sekarang ternyata lebih baik daripada aliran-aliran politik dan ekonomi bikinan manusia seperti imperialisme, fasisme, colonialisme, kapitalisme, dan lain-lain. Decalogue tidak

berarti bahwa peraturan untuk suatu bangsa atau suatu waktu menjadi relatif artinya atas kemauan akal manusia-manusia yang kebetulan berkuasa. Perbedaan antara bangsa dan tempat memang ada pengaruhnya terhadap legislasi umum, akan tetapi dasarnya adalah dari Tuhan.

Harvey Cox membedakan antara secularisasi yang terkandung dalam ajaran Bible daripada secularism. Baginya secularism adalah : the name of an ideology, an new closed world view which functions very much like a new religion. While secularization finds its roots in the biblical faith and is to some extent an authentic outcome of the impact of biblical faith on western history, this is not the case with secularism. It is a closed ISM. It menaces the openness and freedom secularization has produced. It must therefore be whatched carefully to prevent its be coming the ideology of a new establishement. It must be especially checked where-it pretends not to be a world view but nontheless seeks to impose ideology throughout the organ of the state.

Artinya : Sekularisme adalah nama suatu ideologi, suatu pandangan hidup yang tertutup yang berfungsi sangat mirip sebagai agama baru. Jika sekularisasi terdapat akarnya dalam Bibel dan sampai batas tertentu merupakan hasil yang benar daripada pengaruh Bibel kepada sejarah Dunia Barat, sekularisme tidak begitu. Secularism adalah suatu ISME. Ia mengancam keterbukaan dan kemerdekaan yang dihasilkan oleh sekularisasi. Oleh karena itu sekularisme harus diawasi dengan ketat supaya tidak menjadi ideologi suatu lembaga. Ia harus diperiksa dan diperiksa betul-betul, khususnya jika ia mengatakan dirinya tidak sebagai pandangan hidup. Akan tetapi sebenarnya ia memaksakan ideologinya melalui alat-alat negara.

Gambaran yang diberikan oleh Harvey Cox tentang perbedaan antara secularization dengan secularism adalah artificial atau buat-buatan. Setidak-tidaknya adalah perbedaan yang diada-adakan bukan perbedaan dalam ide' yang dasar akan tetapi hanya perbedaan dalam tekanan.

Tulisan Harvey Cox tentang Secular City mendapat tantangan daripada buku The Secular City atau The Secular City Debate, karena kecuali terlalu panjang, juga kurang relevan bagi kita.

Pokok persoalan adalah sebagai yang dikatakan oleh Wilfred Smith : "orang Barat yang beragama Kristen itu mengambil pegangan hidupnya dari dua sumber, yaitu sumber ajaran Nabi Isa yang terdapat dalam Injil, serta sumber filsafat Yunani dan Romawi. Nabi Isa alaihissalam hanya melakukan tugasnya selama satu tahun menurut satu Injil, atau tiga tahun menurut Injil lainnya; Injil-injil itupun hanya menuliskan beberapa peristiwa Nabi Isa, dan ditulis oleh orang-orang yang tidak menjadi saksi mata.

Dengan dasar tersebut di atas maka hal keluarga, ekonomi, ketatanegaraan, pembelaan keselamatan dari semua itu harus diambil dari filsafat Yunani dan pikiran Romawi, begiu juga dari filsafat rationalis yang ada kalanya mempunyai nafas yang sama, dan ada kalanya berlainan bahkan bertentangan.

Sebaliknya agama Islam mempunyai satu sumber untuk pegangan, yaitu Al Qur'an yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dalam Al Qur'an itu tersebut bahwa barangsiapa cinta kepada Allah ia harus mengikuti Rasul, maka sumber hukum Islam adalah Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Dan

karena Al Qur'an menganjurkan berpikir,maka sumber hukumketiga adalah Ijtihad termasuk di dalamnya Qiyas, Al Masalih al Mursalah dan Ijma'.

Dengan begitu maka dalam Islam tak ada sekularisasi atau sekularism. Segala sesuatu dilakukan oleh Ummat Islam dengan nama Allah dan untuk mencari ridha Ilahy.

Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa itu adalah negara agama atau Teokrasi. Masyarakat Islam bukan negara Agama, akan tetapi negara yang menjunjung tinggi ajaran Tuhan, karen akal manusia tidak dapat menyampaikan kepada kebahagiaan manusia. Masyarakat Islam bukan teokrasi denan arti bahwa yang memegang kekuasaan adalah ahli agama. Masyarakat Islam adalah nomokrasi, yakni negara hukum; penguasa hanya berfungsi menegakkan hukum dan bukan pemberi hukum.

Akibat daripada dualisme pegangan hidup orang Barat ialah merajalelanya sekularisasi. Manusia merasa telah dewasa dengan akalnya yang bebas dari ikatan agama. Bahkan sekarang ini ada teologi yang mengatakan bahwa God is dead (Tuhan telah mati, Tuhan telah tiada lagi). Dan ini berarti bahwa hanya akal kita yang kita jadikan petunjuk.

Pada abad ke 20 ini telah nyata bahwa manusia itu sama derajatnya, sebagaimana diakui oleh Hak-hak Asasi Manusia yang disusun oleh PBB, bahwa suatu negara tidak boleh menyerang negara lain, menurut Piagam PBB. Perkembangan sejarah menunjukkan bahwa sistem kapitalisme tidak dapat dipertahankan, dan sistem kolektivisme tidak dapat berjalan lancar. Kesemuanya itu menguatkan ajaran Islam akan perlunya pembagian rezki yang merupakan pinjam-pakai anugerah Allah.

Kegoncangan keluarga di Barat, makin bertambahnya hidup bersama di luar perkawinan, merajalelanya penyelewengan sex, serta penggunaan minuman keras dan obat bius, semuanya itu adalah gejala-gejala sekularisme dan sekularisasi di Barat.

Sayang sekali bahwa banyak orang yang berpengaruh atas nasib bangsa Indonesia masih belum dapat melihat kehidupan di Barat yang sekarang mengalami krisis. Mereka masih memakai cara berpikir pada permulaan abad 20 yang penuh kepada kepercayaan kepada akal manusia, sehingga akibatnya mereka ingin memaksakan pikiran yang usang dan salah itu kepada bangsa Indonesia yang 95% nya terdiri atas Ummat Islam yang mempunyai hanya satu pegangan hidup, yaitu wahyu Ilahy.

Adalah salah sekali jika dikatakan bahwa karena sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka mustahillah Republik Indonesia ini akan menjadi sekuler.

Segala sesuatu bergantung kepada orang yang bertanggung jawab dalam negara. Meskipun sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, selalu ada kemungkinan kita akan terjerumus kepada sekularisasi dan sekularism, jika kita tidak waspada. Kasus Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1973, dapat kita jadikan peringatan.

Dari karangan Harvey Cox yang banyak yang harus ditolak, ada satu paragraf yang sangat relevan dan telah saya kutip. Paragraf tersebut saya kutip kembali.

Bersambung hal . 79

Pengaruh Sekularisme

TERHADAP STABILITAS NASIONAL DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Oleh H. Soedarsono Mertoprawiro

Pendahuluan

1. Kita sekarang sedang memasuki pelaksanaan REPELITA III. REPELITA III ini mempunyai arti yang khusus dalam rangkaian program pembangunan jangka panjang karena REPELITA III ini merupakan babak di tengah-tengah perjalanan kita untuk mewujudkan landasan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang menurut GBHN akan terwujud setelah dilaksanakan 5–6 kali tahapan pembangunan lima tahun.
2. Seperti telah kita ketahui bahwa tujuan pembangunan Nasional yang kita lakukan sekarang ini adalah untuk mewujudkan **masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spirituil** berdasarkan **Pancasila** didalam **wadah negara Kesatuan Republik Indonesia** yang **merdeka**, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka bersahabat tertib dan damai.
3. Tujuan tersebut tidak dapat terwujud dalam beberapa tahun saja tetapi harus dilakukan tahap demi tahap dan diatas landasan yang kokoh dan kuat. Dari tujuan tersebut dapat disimpulkan, bahwa hakekat pembangunan nasional itu adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa :
   a. Perlu adanya keselarasan, keserasian, keseimbangan dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan.
   b. Pembangunan harus merata untuk seluruh rakyat dan diseluruh wilayah tanah air.
   c. Yang ingin dibangun adalah manusia dan masyarakat Indonesia sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia, yang menghasilkan masyarakat maju yang tetap berkepribadian Indonesia.
   d. Pembangunan harus dilakukan dalam suasana perikehidupan bangsa aman dan tenteram, tertib dan dinamis.
4. Berhubung dengan hal tersebut di atas maka pembangunan nasional yang kita lakukan itu harus senantiasa bertumpu pada trilogi pembangunan :
   a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, karena pembangunan itu pada hakekat-

nya merupakan usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi karena peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan yang adil dan makmur serta merata yang ingin dicapai melalui pembangunan itu hanya dapat dicapai jika ada peningkatan kemampuan ekonomi, yang harus dihasilkan oleh usaha pembangunan itu sendiri.

c. Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis, karena pembangunan hanya dapat dilaksanakan dengan berhasil dalam suasana nasional yang mantap.

5. Belakangan ini terbesar issue-issue mengenai sekularisme dalam masyarakat yang meresahkan, sehingga apabila dibiarkan berlanjut akan dapat membahayakan bagi persatuan dan kesatuan Bangsa. Karena itu perlu adanya pendalaman bagi landasan idiil dan pandangan hidup bangsa sehingga dapat diperoleh landasan yang kuat dalam menghadapi issue-issue yang dapat membahayakan keselamatan/ kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia.

Pemikiran tentang hubungan Agama dan Negara

6. Hingga abad ke 20 ini para negarawan dan ahli pikir di dalam membicarakan hubungan antar negara dan agama selalu berpikir dalam pola bipoler yaitu negara itu kalau tidak **sekuler** maka negara itu adalah **Theokratis**. Masalah sekularisme dan theokratis ini sejak permulaan dalam menghadapi persiapan kemerdekaan Indonesia telah menjadi perdebatan. Untuk mengetahui apa negara sekuler dan negara theokratis itu, marilah kita tinjau pengertian sekuler dan theokratis itu :

a. SEKULER

1) Sekuler atau "Seculer" berarti keduniawian, tidak jelas-jelas bersifat keagamaan dan tidak terikat oleh sumpah atau aturan-aturan keagamaan.

2) Sekularisme atau "secularism" adalah suatu faham yang tidak memperhatikan atau menolak terhadap agama dan pertimbangan-pertimbangan keagamaan.

b. Secara praktis kenegaraan maka Bapak Menteri Agama Mukti Ali (sekarang anggota DPA dan guru besar pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dalam sambutannya pada peringatan Maulid Nabi Muhamamd SAW di Istana negara tanggal 16-4-1973 antara lain menjelaskan sebagai berikut :

1). Kita semua mengetahui, bahwa negara sekuler adalah suatu negara yang diantara ciri-cirinya ialah dimana hidup dan kehidupan bangsanya itu tidak ada hubungan sama sekali dengan moral agama. Agama tidak mempunyai tempat dalam suatu negara yang sekuler itu, "Tuhan telah mati" dalam negara sekuler itu.

2). Sebaliknya negara Theokratis mempunyai ciri-ciri antara lain ialah bahwa Kepala Negaranya adalah wakil Tuhan di negeri itu yang ucapannya dan perbuatannya adalah pasti betul dan tidak diganggu gugat.

7. Menghadapi pemikiran hubungan agama dan negara yang bipoler dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan telah berkembang pemikiran seperti tersebut dalam buku Naskah Persiapan UUD 1945 karangan Prof. Mr. Moch. Yamin jilid I antara lain sebagai berikut :

a. Pemimpin nasional dari golongan agama Islam menghendaki dasar negara Republik Indonesia adalah Islam.

b. Prof.Mr.Moch. Yamin menyatakan antara lain : "Dalam menyelidiki bahan untuk Negara Indonesia maka kita harus bertindak sebagai orang Indonesia. Penyelidikan harus meliputi keadaan disegala pulau Indonesia dengan pikiran yang sudah meminum air persatuan Indonesia. Kita mendirikan Negara Indonesia atas keinsyapan akan pengetahuan yang luas dan lebar tentang seluruh Indonesia.

Bahwa bangsa Indonesia yang akan bernegara merdeka itu ialah bangsa yang berperadaban luhur dan peradabannya itu mempunyai Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu maka dengan sendirinya kita insaf, bahwa Negara Kesejahteraan Indonesia Merdeka akan ber Ketuhanan. Tuhan akan melindungi Negara Indonesia Merdeka itu. Pembentukan masyarakat dan susunan negara mewujudkan suatu pembaharuan dimana pembaharuan tersebut tidak boleh lepas dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang tersebut dalam perintah Tuhan dalam kitab Al Qur'an dan harus sejajar dengan ikatan garis besar menurut adat pusaka Indonesia. Negara baru yang akan kita bentuk adalah suatu negara kebangsaan Indonesia atau suatu nationale staat atau suatu etat Nasional yang sewajar dengan peradaban kita dan menurut susunan dunia sekeluarganya di atas dasar kebangsaan dan ke Tuhanan.

c. Prof. Dr. Mr. Soepomo menyatakan antara lian :
Oleh anggota yang terhormat tuan Moch. Hatta telah diuraikan dengan panjang lebar, bahwa dalam negara persatuan Indonesia hendaknya urusan Negara dipisahkan dari urusan agama. Karena itu saya menganjurkan dan saya mufakat dengan pendirian yang hendak mendirikan Negara Nasional yang bersatu dalam arti totaliter yaitu yang tidak mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar akan tetapi yang akan mengatasi segala golongan dan Dalam Negara yang bersatu itu urusan agama akan terpisah dari urusan Negara. Urusan agama diserahkan pada golongan agama masing-masing dan tiap-tiap orang akan merdeka memeluk agamanya masing-masing. Negara Nasional yang bersatu itu tidak berarti bahwa negara itu akan bersifat "a religius" Negara nasional yang bersatu akan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, akan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Negara Indonesia memakai dasar moral yang luhur yang dianjurkan oleh agama Islam. Dalam Negara Indonesia hendaknya diatur dan dianjurkan agar supaya warga negara cinta kepada Tanah Air, iklas akan diri sendiri dan suka berbakti kepada tanah air, supaya mencintai dan berbakti kepada pemimpin dan kepada Negara, supaya takluk kepada Tuhan sehingga setiap waktu ingat kepada Tuhan.

d. Ir. Soekarno menyatakan antara lain :
Prinsip Indonesia merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ke Tuhanan bukan saja berarti Bangsa Indonesia ber Tuhan tetapi juga berarti bahwa tiap-tiap orang Indonesia hendaknya ber Tuhan kepada Tuhannya, yang kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Almasih , yang Islam ber Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia ialah Negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang

leluasa, segenap rakyat hendaknya ber Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme agama" dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber Tuhan. Marilah kita amalkan ajaran agama baik Islam maupun Kristen dengan cara berkeadaban ialah hormat menghormati satu sama lain.

8. Akhirnya setelah melalui musyawarah para pemimpin Indonesia dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan yang menjangkau jauh kedepan dengan mengenyampingkan segala kepentingan pribadi maupun golongan demi untuk persatuan dan kesatuan Bangsa berhasil menetapkan Dasar Negara diatas mana Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yang kemudian kita kenal dengan Pancasila :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

9. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain memuat dasar Negara Republik Indonesia tersebut dirumuskan berdasarkan pokok-pokok pikiran:

a. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas **persatuan** dengan mewujudkan **keadilan sosial** bagi seluruh Rakyat Indonesia.
b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
c. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
d. Negara berdasar atas dasar ke Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

10. Pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam pasal-pasalnya dan pasal-pasal penting yang ada sangkut pautnya dengan judul karangan ini adalah :

a, Fasal 1 : (1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik
(2) Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

b. Fasal 6 ayat 2 : Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR.

c. Fasal 29 : (1) Negara berdasar ke Tuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

11. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah menentukan dan memilih jalannya sendiri, dengan memilih alternatif yang sesuai dengan kepribadian dan sejarah perkembangan bangsa serta sesuai dengan rasa bathin dan keadaan sosial bangsa Indonesia yaitu Indonesia bukan Negara Sekuler dan Negara Theokrasi, tetapi negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, dimana ke Tuhanan Yang Maha Esa adalah sila pertama dari dasar negara dan pandangan hidup Bangsa Indonesia yang menjadi pegangan dan pedoman hidup bangsa dan rakyat Indonesia, dimana rakyat adalah berdaulat yang kedaulatannya itu

dilakukan oleh MPR. Presiden, Kepala Negara dipilih oleh MPR dan menjadi Mandataris dari MPR dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan. Dalam Negara Pancasila Tuhan tetap hidup dan Agung, pembangunan dan kehidupan Bangsa Indonesia didasarkan kepada moral agama, yang salah satu ajaran yang pokok adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Rakyat berdaulat dan mereka yang memberikan mandat kepada Kepala Negaranya untuk menjalankan keinginan-keinginannya dan aspirasi mereka.

12. Alternatif yang dipilih oleh Bangsa Indonesia tersebut merupakan konsensus Nasional yang oleh Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 16 Agustus 1967 disebut sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, disetujui oleh Wakil wakil Rakyat Indonesia menjelang dan sesudah Proklamasi yang harus kita junjung tinggi.

Prinsip-Prinsip yang terkandung dalam Pancasila sebagai Dasar, Pandangan dan tujuan hidup Bangsa Indonesia.

13. Bangsa yang merdeka dan bebas menentukan nasibnya harus senantiasa berjuang untuk mempertahankan serta mengisi kemerdekaannya serta menciptakan kekuatan dan ketahanan hidupnya.

Untuk ini diperlukan landasan falsafah sebagai pegangan hidup yang memberikan dasar dan tujuan yang jelas. Karena pegangan hidup seluruh bangsa maka harus diterima oleh seluruh bangsa itu sendiri dan mencerminkan peradaban, kebudayaan keluhuran budi dan kepribadian yang berakar pada sejarah perjuangan, pertumbuhan dan perkembangan bangsa itu sendiri.

14. Kita sangat bersyukur kepada Allah SWT bahwa para pemimpin kita pendiri-pendiri Republik Indonesia berhasil mencapai konsensus nasional yang merupakan perjanjian luhur dan wajib kita junjung tinggi dalam merumuskan secara jelas pandangan hidup bangsa Indonesia yang dinamakan Pancasila.

Pancasila merupakan jiwa seluruh Rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar negara kita dan sekaligus menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia serta kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berurat dalam akar kebudayaan bangsa Indonesia.

15. Pancasila sebagai dasar negara dan tujuan hidup bangsa Indonesia seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 memandang prinsip-prinsip :

a. Percaya pada diri sendiri (self relience)
b. Tidak menggantungkan pada bantuan darimanapun (self-help).
c. Bertekad bulat untuk menentukan nasibnya sendiri (self determination)
d. Azas kekeluargaan yang menolak pandangan hidup berdasarkan perorangan dan juga menolak theori golongan atau theori kelas yang diajarkan oleh Max dan Lenin karena tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia.
e. Azas persatuan, yaitu Negara tidak untuk kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi untuk menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan dan kesatuan Bangsa.
f. Toleransi.

16. Berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila tersebut di atas maka pandangan Pancasila terhadap kehidupan manusia adalah bahwa kebahagia-

an hidup manusia itu akan tercapai jika dapat dikembangkan hubungan yang **selaras, serasi dan seimbang** baik dalam hidup manusia sebagai pribadi dalam hubungan manusia dengan masyarakat dan alam sekitarnya, dalam hubugnan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mencapai kebahagiaan rohaniah.

17. Dalam hal ini Prof.Drs. Notonegoro SH (Alm) dalam ceramahnya tentang Pancasila pada SESKOAD angkatan III/1964 antara lain mengemukakan, bahwa:

a. Manusia adalah pribadi yang berdiri sendiri dan mahluk Tuhan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Manusia merupakan diri pribadi dan mahluk sosial
c. Pribadi manusia meliputi materi dan jiwa, manusia mempunyai jiwa dan raga.
d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan manusia itu :
   1) Susunannya terdiri dari jiwa dan raga.
   2) Mempunyai sifat mutlak sebagai individu dan mahluk sosial
   3) Hakekat hubungan manusia dengan Tuhan adalah manusia baik sebagai pribadi berdiri sendiri maupun sebagai mahluk Tuhan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
e. Jiwa dan raga merupakan satu kesatuan, individu dan mahluk sosial merupakan satu kesatuan, pribadi berdiri sendiri dan sebagai mahluk Tuhan merupakan satu kesatuan serta ketiga-tiganya merupakan juga satu kesatuan. Jadi manusia adalah kesatuan **organis, harmonis dan dinamis**
f. Karena itu negara kita berdasarkan Pancasila dalam hakekatnya merupakan kesatuan organis, seimbang harmonis dan juga dinamis.

Pengaruh sekularisme terhadap stabilitas nasional dalam pembangunan nasional.

18. Sejarah perjuangan Bangsa Indonesia sejak Proklamasi 17-8-1945 telah mencatat berbagai peristiwa dan pergolakan politik sampai dengan pemberontakan bersenjata yang membahayakan keselamatan dan kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila peristiwa tersebut kita kaji dengan mendalam maka peristiwa-peristiwa pergolakan politik dan pemberontakan bersenjata tersebut mempunyai tujuan akhir untuk merubah Pancasila atau menghapuskan Pancasila sebagai dasar negara dan menggantinya dengan dasar lain.

Kalau kita perhatikan apa yang terkandung dengan prinsip-prinsip yang akan merubah atau mengganti Pancasila, maka akibatnya akan terjadi pula perubahan keserasian, keselarasan dan keseimbangan kehidupan manusia Indonesia yang berurat akar dalam sejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia dan akhirnya akan menimbulkan bencana.

Karena itu bangsa Indonesia dalam menghadapi krisis-krisis nasional selalu berusaha kembali kepada usaha pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekwen.

19. Kini kalau kita tinjau arti sekuler dan sekularisme dalam hidup ketata negaraan, maka konsep sekuler dan sekularisme itu hanya menitik beratkan kepada hidup keduniawian dan menolak pertimbangan keagamaan. Prinsip-prinsip tersebut sudah jelas tidak terdapat adanya keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan bangsa Indonesia dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang dapat menimbulkan keresahan-keresahan dalam masyarakat dan berpengaruh besar pada pembinaan stabiligas nasional yang sangat diperlukan demi suksesnya pembangunan nasional yang kini sudah memasuki PELITA III.

Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Bapak Amir Machmud pada penutupan penataran P4 tingkat nasional angkatan IX Di TMII antara lain mengatakan bahwa : '.Sekularisme memang dapat menjadi benalu dari kehidupan negara kita yang cepat atau lambat dapat mengucilkan Pancasila yang pasti berakibat fatalnya perjuangan sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17—8—1945, karena sekularisme pada dasarnya mendambakan keberhasilan hidup duniawi dengan menyisihkan kehidupan agama secara aktif". Selanjutnya Bapak Menteri Amir Machmud memperingatkan agar jangan dibiarkan sesuatu terselip atau menyusup dalam kemurnian orde baru, sehingga dapat menodai, mengaburkan dan membelokkan arti orde baru itu sendiri.

20. Karena telah ada konsesnsus nasional atau perjanjian luhur yang disepakati oleh wakil-wakil rakyat menjelang dan setelah proklamasi bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang memberi arah yang jelas dalam mewujudkan cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil, maka tidak perlu mempersoalkan lagi Pancasila tidak perlu lagi mempersoalkan hubungan agama dan negara yang tidak sesuai dengan Pancasila. Karena mempersoalkan masalah itu berarti kita memutar mundur jarum sejarah, mementahkan kembali kesepakatan nasional dan menciderai perjanjian luhur bangsa Indonesia yang harus kita junjung tinggi dan membuka perpecahan yang membahayakan persatuan dan kesatuan Bangsa yang landasannya mulai dirintis dan diletakkan sejak 28 Oktober 1928 dengan sumpah pemuda Satu Tanah Air, satu Bangsa dan satu Bahasa Indonesia.

21. Masalah agama adalah suatu masalah yang peka, maka menimbulkan issue-issue sekularisme ditengah-tengah masyarakat akan memancing suatu reaksi yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional.

Dalam kita memasuki awal REPELITA III ini sebaiknyalah kita menghayati dan mengamalkan pandangan hidup kita Pancasila untuk mencapai hari esok yang lebih baik, suatu kehidupan yang memberi kebahagiaan kepada kita masing-masing dan kepada kita bersama. Selain daripada itu perlu diusahakan kemampuan untuk mengendalikan diri kita masing-masing terhadap perbuatan, sikap dan perilaku yang dapat menimbulkan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. ***

selamat hari raya
idhul fitri
1 SYAWAL 1399 H

P.T. CIPENDAWA
FARM ENTERPRISE

Jalan Pintu Besar Utara No. 29 Telp.: 275722 & 276997
Jakarta-Indonesia Cab. Add.: CIPENDAWA

Pengaruh Sekularisme

TERHADAP

MORAL BANGSA

Oleh H. Sukarsono

Pengertian

Sekular, berasal dari perkataan Latin : **secularis**. Dari segi etimologis artinya ialah : **duniawi**, dan **sekularisme** ialah : **faham mengenai duniawiah.** Bila makna lughawi yang diambil, **sekulari** adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Sebab sesuai Islam, kehidupan manusia perlu seimbang antara ukhrawi dan duniawi. Tetapi menurut istilah umum, sekularisme ialah : **faham berhaluan duniawi dan berpaling dari ajaran agama, atau nilai-nilai yang dianggap kekal.** (Ensiklopedi Indonesia).

Sesuai makna istilah, agar dapat menilai masalah sekularisme sebaik-baiknya, kita perlu mempelajari lebih jauh tentang latar-belakang perkembangannya dan kemudian tentang konsepsinya.

Sejarah perkembangannya.

Faham **sekularisme** tidak dapat dipisahkan dari faham : **pemisahan antara gereja dan negara—separation of church and state**, yang pemunculannyaerat hubungannya dengan sejarah gerja itu sendiri.

Agama Kristen, mula-mula diproklamasikan di tengah-tengah rakyat jelata sebagai : "**Kerajaan yang bukan dari dunia ini**". Tetapi imperium Romawi pada waktu itu tengah melapuk dari dalam. Agama golongan bawah yang semula dianggap **imperium in imperio** dan **illegal**, dapat mematahkan belenggunya. Pada tahun 313 Kaisar mengakui akan legalitas agama itu, dan tahun 380 Kristen ditetapkan menjadi agama negara, untuk seluruh imperium Romawi. Akhirnya Kaisar Leo I (440–460), mengakui kekuasaan Gereja atas Pemerintahan. Semenjak itu, Paus memegang supremasi atas kerajaan dunia.

Tetapi setelah Gereja menjadi jaya, terjadilah korupsi dalam doktrin, dan tyran dalam praktek. Datanglah saatnya seorang Paus, ialah Gregorius VII, menyatakan diri sebagai "**tuan mutlak**". Dalam perselisihan mengenai pengangkatan uskup, pada tahun 1077 Paus telah memaksa Kaisar Jerman Henri IV, untuk merendahkan dirinya di puri Paus di Canossa. Perhatikanlah, seorang Raja Besar, dengan tidak berkasut dalam udara salju yang sangat dingin, dengan nistanya melakukan penebusan dosanya, selama tiga hari tiga malam, di hadapan "tuan rohaninya" Kemenangan Gregorius itu tidak berlangsung lama. Tetapi lebih dipulihkan lagi

oleh Innocentius III, yang menempatkan **hampir semua** penguasa di Eropa, dari Italia dan Sepanyol, sampai Swedia dan Inggris, di bawah tahtanya.

Mengapa kekuasaan duniawi Paus tersebut dapat terwujud? Ialah karena dukungan umum masyarakat Kristen, yang makin membesar dengan cepatnya. Tetapi masa optimumpun tiba. Setelah Gereja sampai pada puncak kejayaannya, ia merasa perlu membentuk "**inkwisisi**", ialah sebuah badan Gereja Katolik yang bertugas mengusut dan menghukum kaum bid'ah. Mula-mula hukuman bersifat rohani semata-mata. Tetapi kemudian bersifat jasmani juga. Lebih-lebih setelah pelaksanaan hukuman diserahkan kepada pemerintahan sipil, terjadilah kebengisan yang mengerikan. Pengadilan Gereja itupun dapat dipergunakan untuk kepentingan politik duniawi. Jeane d'Arc, Srikandi Perancis yang memimpin pemberontakan terhadap penjajahan Inggris, pada tahun 1430 dapat ditangkap. Oleh Mahkamah Gereja Perancis, ia dituduh menjadi tukang tenung dan dijatuhi hukuman bakar sampai mati. Seperempat abad kemudian, ialah pada tahun 1456, perkara itu diperiksa kembalj, Jeane d'Arc dinyatakan tidak bersalah, dan direhabilitasikan. Tetapi orangnya telah mati. Anehnya lagi, pada tahun 1920, ia dinyatakan kudus oleh Gereja Katolik Roma. Dalam pada itu, TVRI tanggal 10–7–1979 jam. 21.00 WIB, menyiarkan berita gambar, bahwa di bawah reruntuhan menara sebuah gereja di Spanyol, ditemukan ratusan kerangka manusia yang diperkirakan berasal dari abad ke 15, ialah kerangka orang yang mendapatkan hukuman dan dikuburkan di situ.

Supremasi Gereja terhadap raja-raja tidak terbatas dalam masalah politik, tetapi meliputi urusan pribadi pula. Perkawinan Raja Inggris Henri VIII, dengan Catherina, tidak disahkan oleh Paus. Akibatnya pada tahun 1534 keluarlah pernyataan, bahwa Gereja Katolik Inggris tidak terikat lagi dengan Roma, dan menjadi persekutuan yang berdiri sendiri, dengan nama Anglikan. Rajalah Kepala Gereja itu.

Kejadian tersebut merupakan permulaan goyahnya supremasi Paus. Tetapi Gereja tetap bersikap ortodoks, terus menentang hal-hal yang dianggapnya bid'ah. Menurut faham yang telah mengabad, surga itu terletak di langit di atas kita. Maka penemuan baru tentang gereja alam, ditentang oleh Gereja, sebab dapat menggoyahkan kepercayaan tersebut. Galileo Galilei penganut Copernicus, menemukan teori, bahwa mataharilah pusat peredaran planit-planit, bukan bumi seperti dikira sebelumnya. Ia terpaksa menarik kembali pernyataannya, sebab tidak tahan akan siksaan inkwisisi. Demikianlah tyran yang dilakukan Gereja pada waktu itu.

Absolutisme Gereja itupun mendapatkan tentangan umum, baik dari luar maupun dari dalam tubuh Gereja sendiri. Dari luar timbulnya masa renaissanse, yang mendambakan kebebasan berpikir. Dari dalam muncullah golongan pembaru, yang pada tahun 1536 menyatakan diri sebagai kaum Protestan. Berturut-turut susutlah kekuasaan Gereja Katolik Roma dalam bidang duniawi. Sebab di sana-sini muncul gerakan untuk memisahkan antar gereja dan negara. Gerejapun digiring kembali kepada pokok ajarannya, ialah mengurusi kerajaan di surga.

Gerakan tersebut di atas, dikenal pula dengan istilah **sekularisasi**, ialah proses untuk melepaskan kehidupan politik dan sosial dari pengaruh-pengaruh gereja.

Kategori gereja, yang semula dimaksud Gereja Katolik Roma pun diperluas kepada seluruh gereja. Akhirnya oleh penganut-penganut faham sekularisme di luar Eropa, diperluas lagi kepada seluruh agama.

Sekularisasi dalam Islam

Apakah di dalam sejarah Islam juga terjadi perjuangan sekularisasi ?

Di dalam Islam tidak ada pemisahan antara ukhrowi dan sektor duniawi. Oleh karenanya, di negara Islam, kepala negara/kepala Pemerintahan, sekaligus juga menjadi kepala agama. Di negara non Islam, orang-orang Islam hidup sebagai warganegara dari negara yang bersangkutan, tanpa lembaga-sentral yang mengurusi bidang rohaninya. Sebab di dalam Islam tidak ada lembaga kepasturan. Disamping itu Islam tidak menentang ilmu pengetahuan, bahkan mendorong kemunculannya. Oleh karenanya di dalam sejarah Islam, tidak terdapat proses perjuangan untuk memisahkan antara agama dan negara. Yang terjadi ialah pergolakan politik, silih berganti penguasa, dengan tetap siapapun yang menjadi kepala negara iapun kepala agama. Kecuali di Turki, di sana semenjak jaman Kemal Attaturk, mengenal pula sekularisasi. Tetapi sekularisasi di Turki lebih cenderung sebagai tindakan nasionalisasi dari apa-apa yang serba Arab. Sebab sebelumnya, telah terjadi proses peng Araban pada kebudayaan Turki. Proses nasionalisasi itu mengalami waktu yang ekstrim, sampai adzanpun disalin ke dalam bahasa Turki. Tetapi setelah saat nasionalisasi tercapai mantap, apa yang memang Islam bukan Arab dikembalikan ke pada proporsinya. Misalnya adzanpun kembali berbahasa Arab, dan kembali pula pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah. Nuri Eron, seorang diplomat kawakan Turki mengatakan : **"Yang terbaik di Eropa itu berasal dari Islam. Turki dalam menerima modes Eropa berarti kembali kepada nilai-nilai tradisional"**.Turkey Today and Tomorrow).

Baiklah di dalam menilai sejarah Islam, kita kutipkan pendapat orang yang non Islam, ialah A.R. Whitham M.A di dalam bukunya : The Christian Chrurch, sebagai berikut : **"Di dalam Islam tidak ada lembaga kepasturan, tiada perantara antara Tuhan dan manusia, tidak ada dosa keturunan, tiada jurutebus dan tiada pemisahan antara gereja dan negara. Islam membentuk manusia sebagai manusia yang mempunyai syahwat dan senang akan harta, tetapi mendasarinya dengan moral yang tinggi. Muhammad dan Khalifah telah berhasil. Sebab disamping mereka sebagai kepala negara juga sebagai kepala agama"**. Demikian Whitham yang tulisannya masih ada lanjutannya ialah kritik terhadap Islam. Bahwa agama baru itu intoleran, memaksa orang-orang yang ingkar dengan tajamnya pedang. Tetapi hal itu tidak relevans dengan masalah yang sedang kita bicarakan, oleh karenanya tidak dikutip.

Konsep tentang sekularisme

Demikianlah sejarah perkembangan faham sekularisme, yang dimulai di dunia barat yang Kristen, bukan di timur yang Islam. Sekarang bagaimanakah konsepsi tentang sekularisme?

Maclver, yang kami anggap mewakili kaum sekularis, mengatakan : **"Negara jika tidak ingin mengingkari azas tujuannya, hendaknya membiarkan fungsi keagamaan yang sebenarnya, tinggal di tangan Gereja. Tetapi jangan hendaknya menyerahkan kepada gereja penguasaan atas jabatan apapun yang mempunyai sifat-si-**

fat sipil ataupun politik". Lebih jauh tentang hak-hak sipil, Maclver menyebut : **"Gereja boleh menetapkan aturan-aturan perkawinan sebagai syarat bagi ikatan keanggautaannya, asal ia tidak mencoba mengingkari atau menyampingkan sahnya perkawinan menurut undang-undang, yang meskipun tidak memenuhi syarat-syarat yang dimintanya, telah cukup memenuhi apa yang diminta oleh negara"**.

Tentang pendidikan Maclver mengatakan : **"Pengajaran merupakan soal yang agak lebih sukar lagi. Soal ini menjadi sulit karena adanya sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan gereja. Karena kenyataan bahwa banyak negara yang memasukkan dalam matapelajaran sekolahnya; membaca Injil dan pembinaan keagamaan lainnya. Karena kenyataan bahwa pembinaan kesusilaan sebagian terbaurkan dengan dan sebagian lagi memang bersandarkan doktrin-doktrin keagamaan, merupakan unsur yang elementer dan akhirnya karena kenyataan bahwa beberapa hal yang mutlak terutama sekali sejarah harus mengalami pengaruh-pengaruh keagamaan dan mudah dicondongkan oleh sikap keagamaan pendidiknya. Tetapi bagaimanapun juga jalan yang bijaksana bagi negara dan yang pasti paling sesuai dengan perwatakannya, adalah untuk sama sekali melepaskan bimbingan keagamaan kepada murid di sekolah negeri. Negara seharusnya jangan mengadakan halangan bagi murid-muridnya untuk diberi bimbingan yang demikian itu, tetapi harus menyerahkannya kepada orang tua dan gereja, untuk melatih anak-anak dalam hal keagamaan. Sebab dalam kehidupan modern tidak ada asas keagamaan yang tegas yang diterima secara umum mutlak dan jika ada sekalipun, negara tidaklah mempunyai hak ataupun kewajiban dalam soal ini"**. Demikian Maclver. Ahli didik Belanda Dr. H.J. Gunningpun menyokong pendapat tersebut. Ia mengatakan : **"Demi keyakinan saya yang suci, kita tidak boleh menentukan kepercayaan anak-anak. Biarlah mereka memilihnya sendiri. Dengan demikian, kepercayaan itu akan sukar pudarnya"**.

Pengaruh sekularisme terhadap moral bangsa

Faham sekularisme telah bersemi, berkembang dan mendapatkan kemenangannya di barat. Sekularisme yang dimulai dengan masalah politik, ialah usaha membebaskan diri dari supremasi Gereja, berkembang kepada masalah ilmu pengetahuan, dengan mematahkan doktrin Gereja yang kolot, kemudian meluas kepada seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah moral. Tersusunlah rumus, bahwa sekularisme ialah faham yang berhaluan duniawi dan berpaling dari ajaran agama, atau nilai-nilai yang dianggap kekal. Maka pengaruh sekularisme terhadap moral sesuatu bangsa ialah melepaskan bangsa itu dari nilai-nilai agama.

Kita menyaksikan, bahwa setelah orang barat berhasil mematahkan belenggu absolutisme, sekularisasi berkembang pesat. Tahun 1760 tercatat di dalam sejarah sebagai permulaan revolusi industri. Semenjak itu, orang barat maju dalam bidang tehnik dan duniawi. Tehnologi barat mempengaruhi perkembangan kebudayaan dunia.

Sekularisme itu bersifat total, tidak hanya dalam bidang politik dan tehnik, tetapi juga meliputi bidang sosial, dan bidang etik kesopanan. Kita melihat bahwa perhatian dan pengabdian barat terhadap tugas perikemanusiaan cukup besar, misalnya dalam pemberantasan narkotika, masalah amnesti, bantuan terhadap pengungsi, dan lain-lain yang semuanya bersifat internasional. Tetapi penilaian

kaum sekularis terhadap baik dan buruk, adalah berdasarkan pendapat manusia semata, lepas dari pedoman ajaran agama. Sekelumit contoh sebagai berikut :

Pada tanggal 30 April 1974, Ny. Simon Veil, Menteri Kesehatan Perancis, membuka sebuah lembaga yang bernama **"Sex Advice on the Phone—Nasehat Mengenai Seks Melalui Tilpon"**. Tentu Ny. Simon membanggakannya sebagai pengabdian kepada tugas perikemanusiaan. Lembaga itu melayani pertanyaan umum yang menyangkut masalah seks, dengan melalui tilpon. Hebatnya penanya boleh anoniem, berarti rahasia terjamin. Maka lembaga itu berarti memberi peluang cukup bagi terjadinya free sec intercross, yang memang diperbolehkan di dunia barat. Suatu pilot proyek yang menyangkut bidang seksual, dilakukan pula disebuah rumah penjara di Denmark, ialah di Propinsi Ringe. Dari 90 orang napi, diantaranya 25 wanita dan yang lain adalah pria, ditempatkan dalam sel berselingan. Penjaga tidak akan campur tangan bila terjadi hubungan seks antara mereka.

Demikianlah kehidupan seksual di dunia barat. Hal itu merupakan cermin dari lain-lain aspek kehidupan yang dipengaruhi oleh faham sekularisme, yang membuat ukuran baik dan buruk menurut pendapat manusia sendiri, lepas dari nilai-nilai agama.

Di Indonesia, walaupun kecil jumlahnya ada pula orang-orang yang ingin memperkembangkan faham sekularisme, baik di bidang politik, pendidikan, maupun aspek-aspek sosial lainnya. Misalnya tercetusnya konsepsi bahwa sekolah-sekolah hanyalah bertugas memberikan ilmu kepada anak didik dalam hal pelajaran agama, sedang penghayatan dan pengamalannya menjadi kewajiban orang tua. Juga kebebasan hubungan seks, ada pula yang mempertanyakannya melalui mass media. Tentunya penyebar issu itu cenderung untuk menyetujuinya. Bagaimana kah sikap kita terhadap sekularisme, dan gejala pengembangannya ?

Pancasila tidak mengenal sekularisme

Negara Republik Indonesia bukanlah negara dari salah satu agama. Tetapi negara kita yang berdasarkan Pancasila tidak mengenal sekularisme, dan bukan la diniyyah. Untuk itu cukuplah kita kutip ulasan Dr. H.Roeslan Abdulgani, seorang tokoh 1945 yang cukup dikenal :

"Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai kepribadian bangsa, bersumber kepada filsafat hidup dan sikap hidup monotheisme. Yaitu ke Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, maka Pancasila berjiwa religiositas yang tertinggi tingkatnya. Karenanya, maka Pancasila bukan berwatak "la diniyyah", yaitu yang atheistis anti agama. Dan khusus sebagai dasar negara, maka Pancasila juga bukan suatu sistim kenegaraan dan pemerintahan yang sekuler. Yaitu yang lepas tangan dari kehidupan keagamaan rakyatnya". Demikian Dr. H. Roeslan Abdulgani, di dalam Merdeka.

Jelas ulasan tersebut. Maka apabila ada warganegara R.I. yang memperkembangkan sekularisme, artinya ia anti Pancasila. Buat umat Islam yang selalu memperkembangkan nilai-nilai moral sesuai dengan ajaran agamanya, berarti ia seorang Pancasilais, dan sekaligus juga Muslim yang taat.

Dibawah ini adalah sebuah ayat tentang kemungkinannya kerusakan yang di derita oleh suatu bangsa apabila menganut faham sekularisme :

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

"Apabila Kami kehendaki akan membinasakan suatu negeri, (lebih dahulu) Kami suruh orang-orang yang mewah (supaya ta'at). Tetapi mereka fasik (durhaka). Sebab itu berhaklah mereka ditimpa siksaan, lalu Kami binasakan negeri mereka sebinasa-binasanya (Q.S. 17 : 16). ***

Bacaaan :

1. R.M. Maclver : "The Modern State".
2. A.D. Lindsay : "The Modern Democratie State".
3. A.R. Whitham M.A : "The History of the Christian Church".
4. Nuri Eron : "Turkey Today and Tomorrow".
5. Jacob Burchkhardt : "The Civilization of the Renaissance in Italy".

PENDIDIKAN ISLAM
Di Tengah-tengah
PENDIDIKAN SEKULER

Oleh Siddiq Fadhil

Artikel ini ialah sebahagian dari kertas kerja yang telah dibentangkan di Ijtimak Ulamak III anjuran Persatuan Ulamak Pulau Pinang dan Seberang Prai pada 23 – 24 dan 25 Muharram 1399 H di Madrasah al Masyriyyah, Bukit Mertajam.

Sekularisme – Arti Dan Cirinya

Sekularisme umumnya ditakrifkan sebagai suatu "politico philosophical doctrine" yang berpokok pada dasar pemisahan negara dari agama. Negara dengan segala urusannya yang harus bebas lepas dari ikatan keagamaan dan demikian pula sebaliknya agama tidak usah campur tangan dalam apa jua urusan kenegaraan. Dengan lain perkataan agama adalah merupakan urusan pribadi semata-mata yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan urusan duniawi-ekonomi, politik dan sosial. Sebagai satu gerakan politik, sekularisme mulai mencapai tahap pentingnya pada tahun 1648 M yaitu dengan berakhirnya perang agama di Eropah, suatu pengalaman pahit yang meninggalkan bibit kebencian dan sentimen anti agama. Pada abad kesembilan belas Masehi gerakan ini telah mencapai puncaknya apabila agama telah disingkirkan sepenuhnya dari arena politik. Sekularisme adalah merupakan tindak balas terhadap kediktatoran pope (Paus) dan ianya timbul dalam pergolakan sejarah Renaissance dan Reformasi. Antara dasar-dasar yang menjadi teras kepala sekularisme termasuklah politik nasionalisme, ekonomi Laissezfaire dan falsafah individualisme.

Implikasi sekularisme tidak hanya terbatas pada bidang politik. Konsep sekularisme yang dibincangkan di atas hanyalah sekedar wadah dasar yang menyediakan tapak pertumbuhan seterusnya dengan implikasi-implikasi yang lebih mendalam dan menyeluruh. Prof. Syed Muhammad Naguib al Attas ketika mentakrifkan istilah sekularisme menyatkan :

> Sekular, dari bahasa Latin saeculum, berarti masa-kini, dan arti ini membayangkan pula maksud rujukannya kepada dunia yang senantiasa berubah dan juga kepada kehidupan duniawi. Kehidupan duniawi terbayang sebagai senantiasa menempuh perubahan, dan insan pun - menurut faham yang sekular - harus menyelaraskan diri berubah mengikut perubahan yang ditempuh-

nya. Masyarakat dan negara merupakan puncak segala hasrat insan dan faham sekularisme berdasar puncak kepada dunia dan masyarakat dan negara jua. Menuju ke arah kehidupan sekular berarti pembebasan insan dari asuhan agama dan faham-faham yang menetap mengenai Hakikat semesta; dia juga berarti 'penolehan' pandangan insan berkisar dari alam alam lain niscaya menetap kepada alam yang nyata ini belaka, yakni kepada dunia belaka. Pengertian yang terkandung dalam istilah sekular dan segala bentuk penggunaannya termasuk faham yang digelar sekularisme itu mengutamakan dunia belaka sebagai segala rujukan peranan insan; dan kepada kebebasan insan untuk merubah segala dasar kepercayaannya niscaya disesuaikan hanya untuk zamannya bagi muslihat dirinya masing-masing mengikut zamannya. Maka faham sekular merujuk kepada faham masa dan peredarannya yang diiringi oleh perubahan nilai dan sikap dan cara hidup. Faham sekular ini seakan-akan sama maksudnya dengan faham al-hayat al-dunya sebagaimana yang terbayang dalam pengertian bahasa Arab dan Agama Islam. Dunia (dari akar kata DNW) berarti sesuatu (kehidupan) yang telah didekatkan yang menyatakan sifatnya dalam ruang dan masa. Maka insan yang pandangannya hanya melihat kepada yang 'jauh' yang 'terakhir' – yaitu Akhirat. Faham sekular karena dia mengisbatkan hanya dunia dan menganjurkan kebebasan insan mengubah akidah dan nasibnya sendiri, dan menentang penetapan dalam kepercayaan dan cara hidup beragama. Dari itu maka dia bertentangan dengan Islam, bagaimanapun ditilik pengertiannya.

Demikianlah faham sekularisme telah menjalar masuk mencemari segala bidang kehidupan termasuk bidang pendidikan dan ahlak. Apa yang dimaksud kan dengan pendidikan sekular ialah suatu sistem pengajaran di mana pendidikan dan pengajaran agama dipisahkan darinya. Dan apa yang dimaksudkan dengan sistem ahlak sekular pula ialah :

> "the eseence of secularism that morality should be based solely on regard to the well-being of man-kind in the present life to the exclustion, of all consideration drawn from belief in God or in a future state'"
>
> (Intipati sekularisme ialah bahwa akhlak harus diasaskan hanya kepada kebajikan manusia dalam kehidupan duniawi kini dengan tidak terikat kepada pertimbangan yang berdasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan atau Hari akhirat).

Islam – Sekularisme

Sekularisme dalam pengertian demikian ternyata merupakan "anti thesis" kepada Islam dalam pengertian dan ruang lingkupnya yang murni – Islam sebagai ad Din yang berasaskan kepada Tauhid, Wahyu, Nabuwwah dan Akhirat; sebagai tata hidup yang serba mencakup menggenapi segala bidang kehidupan-aqidah dan syari'ah, akhlak dan Undang-Undang, ekonomi dan politik dan seterusnya. Dua faham yang secara diametrikal bertentangan ini telah bertembung dalam suatu suasana yang tidak seimbang ummat Islam sedang menempuh zaman kelesuan politik dan budaya manakala sekularisme Barat sedang mengalami tahap perkembangannya yang pesat. Kesan dari keadaan yang tidak seimbang itu ummat Islam telah terjebak dalam penjajahan politik, pemikiran dan budaya selama beberapa

abad.

Dalam keadaan demikianlah sekularisme merajalela di seluruh bidang kehidupan ummat Islam. Bidang yang paling serius mengalami sekularisasi ialah pendidikan sebagaimana yang disebut oleh Prof. Syed Husein Nasr :

> "Nowhere is the latrusion of secularism into the Islamic World more evident than in the field of education. Here, from the 13th/19th century onwards, schools on European model teaching European subjects have often been built by Muslim authorities. The original hope was to enable Muslim to oversome their Euripean invaders. However the consequence of such schols has been the growth of a sagment of Muslim society into a class with views differing radically from the majority of Muslims and the creation of a seri ous rift in the Muslim Social order. To realize the different of approach, it is enough to speak with a student of a modern university in the Muslim World and compare his ideas with those of a student from a religious school or madrasah."
>
> (Penyerapan sekularisme ke dalam dunia Islam lebih ketara dalam bidang pendidikan. Mulai dari abad 13/19 dan seterusnya sekolah-sekolah yang bermodel Eropah dan mengajar mata pelajaran Eropah banyak dibina oleh penguasa-penguasa Islam. Tujuan asalnya ialah untuk memungkinkan orang-orang Islam menandingi orang-orang Eropah yang menjajah mereka. Bagaimanapun sekolah-sekolah tersebut telah mengakibatkan timbulnya satu kelas dalam masyarakat Islam yang mempunyai pandangan yang jauh berbeda dari kebanyakan orang Islam. Ianya juga telah mewujudkan jurang yang serius dalam masyarakat Islam. Untuk memahami perbedaan ini cukuplah dengan membandingkan fikiran seorang yang belajar dari sebuah universiti modern di dunia Islam dengan yang belajar di sekolah agama atau madrasah).

Jelas kiranya bahwa dalam suasana yang demikian ummat Islam kurang berhasil dalam merealisasikan harapan Hadith Rasulullah SAW, "Barang siapa mempelajari bahasa sesuatu kaum akan selamat dari tipu dayanya." Sebaliknya apa yang berlaku ialah peringatan. "Barangsiapa meniru-niru sesuatu kaum maka ia menjadi mereka. Tegasnya sistem persekolahan model Eropah ini telah menghasilkan "carbon-copy" orang-orang Barat di kalangan ummat Islam.

Dalam sejarah masyarakat Islam tradisional di bawah pimpinan Ulama-ulama mereka dengan gigih telah juga membentengi arus sekularisme dengan membangunkan pondok-pondok (pesantren) yang disifatkan oleh Bapak Muhammad Natsir sebagai "Kubu Pertahanan Mental" disepanjang zaman penjajahan. Berkat ketahanan kubu inilah yang menjadi faktor penting, "survival" ummat dalam menghadapi program de Islamisasi yang dilancarkan oleh penjajah dengan segala kekuatan dan cara yang mereka miliki. Dalam suasana yang sangat menekan, dan dengan segala kekurangan pondok-pondok pesantren telah mengambil taktik "uzlah" atau mengisolisasi diri di pedesaan, jauh dari kota-kota yang sudah mengalami pencemaran sekularisasi. Dengan strategi ini pondok-pondok pesantren berhasil menyediakan orientasi dan lingkungan yang damai dan sehat, terlindung dari pencemaran alam budaya dan pemikiran bawaan sekularisme.

"Uzlahnya" pondok pesantren tidak pula berarti mereka mengalami pemencilan budaya atau isolasi kulturil. Mereka hanya beruzlah dari penjajah tetapi jembatan budaya dengan bahagian-bahagian dunia Islam lainnya masih tetap terentang kukuh. Bahasa Arab yang menjadi bahasa pengantarnya telah memainkan peranan penting dalam pemupukan hubungan luar tersebut. Di samping itu pemergian pelajar-pelajar tamatan pondok pesantren ke Asia Barat (Mekah dan Mesir) untuk menyambung pengajian, juga pemergian para jema'ah haji ke Mekah saban tahun itu merupakan jaminan-jaminan yang cukup untuk menghindari pemencilan budaya. Uzlah ini juga tidak berarti bahwa mereka telah tenggelam dalam keasyikan wirid dan senandung "alfiyah" sehingga tidak mempedulikan panggilan perjuangan kemerdekaan. Malah sebenarnya golongan inilah yang merupakan pelopor gerakan merebut kemerdekaan.

Pendidikan Islam dan Pencemaran sekularisme

Sistem pendidikan sekular peninggalan penjajah ini kemudiannya terus dipertahankan oleh politikus intelektual sekularis yang mengambil alih pimpinan masyarakat Islam dari kuasa penjajah. Pendidikan Islam telah tidak mendapat pembelaan yang sewajarnya dalam program mengisi kemerdekaan. Ianya telah ditenggelamkan oleh kegairahan terhadap pembangunan kebendaan, kemaju-an sains teknologi, masyarakat progresif dan seterusnya. Malah seringkali pula Islam digunakan untuk mengesahkan dasar-dasar yang berasaskan falsafah sekularisme.

Oleh karena pendidikan sekular telah dijadikan dasar pendidikan negara yang dilaksanakan dengan kuasa dan biaya maka masyarakat Islam dengan segala kelemahannya telah terdesak untuk menerimanya rela atau tidak rela. Demikianlah pendidikan "sekular" telah berkembang luas sehingga hampir-hampir dianggap sebagai suatu aksioma kebenaran yang tidak boleh dibantah lagi. Dalam suasana sekarang masyarakat Islam perlu diperingatkan tentang pertentangan di antara pendidikan sekular.

Pendidikan sekular umumnya bertendensi untuk melahirkan warganegara yang baik. Tendensi ini mengandungi pengertian dan filsafat tertentu yang bercanggah dengan Islam. Dalam hal ini Prof. Syed Muhammad Naguib al Atas menyatakan :

> "Dan keadaan yang sedemikian laku ini telah menjadi tamadun barat itu menerima sebagai sah hanya ilmu yang pada kita, tiada lain daripada ilmu yang kedua sahaja; dan ilmu inilah sahaja yang dianggapnya sah dan yang diterimanya sebagai satu-satunya ilmu yang terdapat. Sebagai akibatnya pula maka tujuan menuntut ilmu dari peringkat rendah ke peringkat-peringkat yang lebih tinggi itu bagi tamadun barat adalah untuk memupuk dan menjelmakan warganegara yang sempurna; karena itu ilmu hanya merujuk kepada kegunaan hidup duniawi insan dalam lingkungan masyarakat dan negara. Bagi Islam pula tujuan kita menuntut ilmu itu tiadalah lain melainkan bagi memupuk serta menjelmakan insan yang sempurna. Kita dengan teguh dan benar mendakwa bahwa memupuk serta menjelmakan insan yang sempurna itu memang sudah tentu juga menjadi warganegara yang baik sempurna; sedangkan sebaliknya, warganegara yang sempurna itu belum tentu dia menjadi insan yang baik sempurna. Mungkin dapat dalam suatu pengertian kita

menyatakan bahwa Islam-pun memang mengaku tentang tujuan menuntut ilmu itu sesungguhnya untuk memupuk sifat-sifat pada diri si penuntutnya yang akan menjelmakan dia sebagai warganegara yang sempurna. Akan tetapi maksud kita, apabila kita memberikan pengertian begini, hanya bawah dengan faham warganegara yang lain, dan Kerajaan yang lain, Kerajaan dan Negaranya yang Kekal Abadi jua; dan menjadi Warganegara itu samalah maksudnya di dunia ini dengan menjadi insan yang baik, insan yang sempurna, dan dari itulah maka insan yang Islam itu bertindak, berfiil, bergelagat di sini kini, seolah-olah mencarakan tabiat Warganegara Sana, sebagai insan yang baik sempurna yang layak mengenakan kepada dirinya faham bahwa dia itu khalifah Allah di atas bumi".

Dalam menanggapi persoalan ini Prof. Muhammad Qutb menyatakan bahwa konsep "warganegara" adalah terlalu relatif dan nisbi. Ciri kewarganegaraan yang baik tidak dapat ditentukan, mungkin seorang tentera dengan semangat juang yang senantiasa menyala, mungkin seorang penyabar yang tidak melawan, mungkin seorang ahli ibadat yang menolak dunia mungkin chauvinis dengan sentimen melulu kepada bangsa dan negaranya atau mungkin apa saja.

Seterusnya Muhammad Qutb menyatakan bahwa Islam tidak membataskan konsepsi pendidikannya dalam konsep "al muwatinu's sasanu's salih" (insan yang baik), insan selaku insan bukan selaku warga kepada sepetak bumi. Malah dari awal lagi Islam sudah menolak konsep nasionalisme sempit, sebaliknya ketika masih ditahap "Makkyy" yang serba terbatas tertekan itu Islam sudah menetapkan dasar "universal"nya. Insan Salih yang hendak disediakan oleh Islam ialah insan yang bertakwa, insan pengabdi kepada Allah dan insan yang berpegang dengan hidayah Allah dan insan yang mampu memikul tugas kekhalifahan.

Oleh karena pendidikan sekular memang tidak bermaksud untuk menyediakan insan yang sempurna maka ia tidak memenuhi keperluan-keperluan asasi manusia dengan seimbang. Pendidikan sekular hanya melayani tuntutan-tuntutan jasmaniah dan akliah tetapi telah mengabaikan fakulti manusia yang terpenting yaitu rohaniahnya.

Sekularisme dengan titik tumpunya yang terbatas pada kehidupan duniawi bersama dengan dasar-dasar utilitariamisme dan pragmatisme sempitnya telah menjadikan seluruh proses pendidikan hanya untuk pemuasan nafsu dan kepentingan diri, tidak menjadi suatu rangkaian ibadah yang tulus kepada Allah, meskipun motif ini kadang-kadang diselindungkan di sebalik slogan "untuk kepentingan negara", namun ini juga masih tidak selaras dengan Islam, pada hakikatnya slogan tersebut adalah merupakan manifestasi falsafah Machiavellian yang meletakkan kepentingan negara di atas segala-galanya. Islam meletakkan motif "mencari keredaan Allah" sebagai tujuan terakhir. Segala proses pendidikan sudah tidak bersifat kudus lagi. Bukan saja karena motifnya yang sudah menyeleweng tetapi juga karena isinya atau ilmunya yang sudah songsang. Ilmu ilmu dalam sistem sekular sudah kehilangan kekudusannya setelah ianya dipisahkan dari ke Tuhanan. Dalam sistem pendidikan Islam seluruh disiplin keilmuannya menjurus kepada sesuatu aspek ke-Tuhanan. Pertautan inilah yang menjadikan ilmu-ilmu itu bersifat kudus dan kekudusan inilah pula yang menjiwai seluruh sistem pendidikan Islam sehingga ianya sering bergandengan dengan institusi keagamaan seperti masjid dan tempat-tempat

yang dibiayai dengan harta waqaf. Seterusnya dasar inilah pula yang menjadikan hubungan guru murid dalam pengajian tradisional begitu erat dan bersifat rohaniah. Para guru dalam sistem tradisional mendapat penghormatan begitu tinggi, suatu keistimewaan yang tidak dapat dibayangkan oleh masyarakat modern. Dalam hubungan ini terdapat satu ungkapan dari Sayyidina 'Aliy Ibn. Abi Talib (k.w) aku adalah hamba kepada orang yang mengajar aku walau sepatah kata (man 'allamani harfan faqad sayyarani abdan).

Dalam sistem pendidikan sekular "ilmu" telah kehilangan dasar tauhidnya sehingga membawa kepada pemecahan ilmu yang terlalu berlebih-lebihan. Setiap disiplin keilmuan tumbuh dan berkembang bersendiri, terpisah dari ilmu-ilmu yang lain dengan mempunyai matlamat dan falsafatnya sendiri. Ilmu dan sistem pendidikan sekular juga telah mengalami kekacauan dari segi pentarafannya atau maratibnya (hisrarchy of knowledge) sehingga ilmu yang sepatutnya menduduki tingkat atas telah dikebawahkan dan demikian pula sebaliknya. Pendeknya ia telah menyeleweng dari dasar keilmuan Islam yang berdasarkan prinsip tauhid dan mara tib (unity and hirarchy). Dasar inilah yang menghasilkan integrasi (kepanduan) ilmu dan pentarafan yang menjurus kepada ilmu tentang yang Maha Esa. **

DIREKSI, STAF SERTA SELURUH KARYAWAN

mengucapkan

selamat hari raya
IDHUL FITRI
1 SYAWAL 1399H

ma'af lahir bathin

PERCETAKAN
BHINNEKA CARAKAN
DIT. JEN. BEA DAN CUKAI

JL. JEND. A. YANI PO.BOX. 108 TELP. 487207
JAKARTA TIMUR

Wajah Dan Arah SEKULERISME

Oleh Ghozi. Dz.

DEWASA INI makin santer terdengar istilah Sekularisme dan Sekularisasi, tentu saja menjadikan sikap keprihatinan dan dianggap momok besar oleh kaum Muslimin di Indonesia.

Dalam bahasa Latin, Sekularisasi itu sendiri asal kata dari : "seculum" yang mempunyai makna : kurun, abad, waktu atau juga : regenerasi. Dalam satu amanatnya pada peringatan Mauludan di Istana Negara tahun 1973 yang lalu, Prof. Dr. Mukti Ali MA menyatakan, bahwa Negara Indonesia bukan Negara Sekular, dan bukan pula Negara Theokrasi. Sebab dalam Negara Sekular, tidak mengakui adanya Tuhan, mereka menyatakan, bahwa Tuhan sudah mati. Dan di dalam Negara Theokrasi, justru yang berdaulat adalah Tuhan, dan fungsi Kepala Negara atau Raja, hanya sekedar sebagai wakil Tuhan di bumi. Pernyataan Dr. Mukti Ali itu merupakan jawaban tentang adanya isyu akan munculnya sistim Sekularisasi dalam lingkungan kehidupan bangsa ini. Yang dipelopori oleh sekelompok in teleck angkatan muda masa itu. Karena dipandang bahwa Sekularisasi sebagai slogan yang menyesatkan bangsa, istimewa ummat Islamnya.

Malahan Menteri Agama H. Alamsyah di depan Muktamar N.U di Semarang itu menyatakan bahwa : bagaimanapun juga Sekularisasi tidak boleh tumbuh dalam masyarakat Negara yang berdasarkan Pancasila, karena hakekat Sekularist selalu bertentangan dengan falsafah Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Sekularisme sebuah faham yang menyatakan bahwa, agama adalah agama. Mau mati ya mati, mau hidup ya hidup. Itu bukan persoalan yang mesti harus diurus oleh Negara.

Karena itu telah kita maklumi bersama bahwa : "Secularazation rejeck every form of religion faith and every kind of religious worship, also one who believes that education and other matters should be conducted without the introduction of a religious element".

Bahkan lebih dari itu Sekularist tidak mengenal adanya ikatan-ikatan Ketuhanan, norma, moral, ikatan tradisional, atau bentuk ikatan yang tercantum dalam falsafah Ketuhanan : Yang Maha Esa dan Pancasila. Persoalan Sekularisasi disini semula dihebohkan sekitar tahun 1972 yang lalu, atau disebut : "Neo Islam" Islam baru. Tentu saja hal itu menimbulkan dua sikap, antara yang pro dan yang kontra, mereka saling mempertahankan existensi dan argumennya sendiri. Mulanya faham Sekularisme itu muncul di Eropa, yang bertolak dari pertikaian antara pihak gereja dengan Kerajaan, atau katakanlah : antara kaum agama dengan pemerintah masa itu. Proses perbenturan itu bisa menimbulkan pengaruh yang luar biasa terhadap segi-segi kehidupan masyarakat Kristen, apalagi setelah munculnya

mahdzab Renaisance, masalah itu makin dipergawat lagi. Sepulang dari tugas Perang salib di Palestina itu, semangat perjuangan kaum Kristen menjadi kendor dan luntur terhadap pengaruh Gereja, tindak-tanduk para biarawan dan pendeta sangatlah otoriter, sehingga membuat sikap kesebalan terhadap ummatnya.

Akhirnya gejala yang parah itu menimbulkan kaum reformed, yang berusaha memisahkan diri dan menentang gereja. Pergolakan itu diprakarsai oleh Martin Luther, sebagai pencetus sekte Protestan itu. Justru dari situlah bibit-bibit Sekular itu mulai bersemi. Mereka beranggapan bahwa gereja atau Agama itu tidak berhak ikut campur dalam lapangan perjuangan, politik, sosial, kebudayaan, ekonomi dan bahkan Ilmu pengetahuan sekalipun. Sehingga banyaklah bidang-bidang yang harus disekularkan, sebagaimana; rumah-rumah sakit, penjara, pabrik-pabrik, perguruan-perguruan tinggi, pendidikan, dan lembaga-lembaga swasta maupun lembaga Pemerintah sekalipun. Tentu saja setiap obyek yang bersifat sacral dan gerejani, kian pudar dan surut pengaruhnya karena kian dikurang hak-haknya. Jadi memang sulit mengelakkan persoalan Sekular yang berkaitan peristiwa sejarah dan sistim pemerintahan, dengan pengaruh suatu Agama. Karena itu agama menurut orientasi Sekularisme tak lebih sebagai : "Wishfull thinking", merupakan impian-impian kosong yang sesungguhnya direnungkan sendiri oleh akal manusia untuk menciptakan Tuhannya, baik secara individu ataupun berkelompok. Karena itu hakekat manusia harus mau dan berani melepaskan diri dari ikatan-ikatan Ketuhanan. Tegasnya, Sekular memang bertolak dari sikap : "Laa diniyah" yakni agama tak perlu dibawa-bawa untuk mengatur ummat. Hakekat agama, adalah hakekat ukhrawy dan bercorak individu. Atau bisa dikatakan, bahwa Sekularisme merupakan faham Fragmatisme. Yakni nilai atau tidaknya suatu keyakinan itu adalah, menurut kadar manfaat praktisnya, bukan yang lain.

Peranan Sekularisme, Materialisme akhirnya Komunisme, masing-masing saling berkaitan dan saling isi-mengisi ibarat bejana perhubungan. Mereka senantiasa membedakan fungsi ilmu pengetahuan dengan hekekat suatu Agama atau Keyakinan. Sehingga faham itu mendorong manusia untuk menjadi ingkar dan terpisah dari sikap Tauhid kepada Yang Maha Qudhus, menuju masyarakat yang Atheisme. Filsafat Materialis menyatakan, bahwa realitas yang pokok bagi manusia adalah benda, dan memang hanya benda semata-mata. Filsafat yang sesat itupun lahir di Eropa juga, yang dicetuskan oleh : Karl Marx, yang kini dianggap paling komplit dan aggresif oleh kaum Komunis itu. Ihwal rencananya usaha Sekularisasi disini ketika itu, memang ada anggapan bahwa, memang penting terciptanya bentuk pembaharuan pada pola pemikiran dalam Agama, yaitu untuk menunjang modernisasi. Inilah sepintas pemikiran dan alasan sekelompok orang-orang yang setuju dan menyokong adanya sistim Sekularisasi disini.

Lantas, apakah dengan sistim itu semua sifat keterbelakangan bisa lebih maju, dan gejala Modernist bisa terlaksana??, ternyata tidak. Kita lihat Turki, ketika dikuasai oleh : Kemal Taruq, ia berusaha menanamkan mode-mode Barat di Turki. Ternyata malahan ia harus bermusuhan dengan ummatnya sendiri, sehingga goyahlah sendi-sendi Pemerintahannya. Demikian juga Afganistan, pemerintah Jendral Nur Muhammad Taraki yang Marxisme itu, jelas menimbulkan pertumpahan darah yang hebat. Dia ingin memaksakan kehendaknya yang berbau Sekular itu ditengah masyarakat beragama, namun kefatalan kekuasaan justru yang terjadi.

Malapetaka bangsa, tak bisa terhindar lagi. Seorang Theolog : Karl Barth, membedakan antara Sekularisme dengan Sekularisasi. Sebenarnya, Sekularisasi itu sendiri suatu usaha yang baik, sebab kaum Kristen berusaha untuk membebaskan diridari kungkungan gereja, dan dominasi kaum pendeta. Karena pemikiran manusia selalu bertambah maju, maka wajar jika mereka lantas berbuat yang lebih aggresif toh itu sesuai dengan petunjuk dan anjuran Kitab Suci . Ujar Theolog itu.

Sekularisme bisa berkembang secara pesat, lantaran beberapa sebab yang mendorong. Yaitu karena waktu itu agama Kristen telah menjadi agama Tunggal di bumi Eropa, kemudian diletakkan dasar hukum : "Give unto Caesar What's the Caesar's, and give unto the God, what's the God's". (serahkan kepada pemerintah, sesuatu yang memang urusan pemerintah, dan serahkan kepada Tuhan yang memang urusan Tuhan).

Justru dengan doktrin itulah hubungan sesuatu gereja dengan kekaisaran Eropa menjadi renggang, dan sebelumnya memang terdapat celah-celah keretakan diantara kedua otoritas tersebut. Dengan demikian Kristen berarti telah membuka peluang utama yang mendorong adanya Sekularisme. Tentang gejala itu,dengan nadaberangProf. Arnold Toynbbee menyatakan :

> **We have turned to conquest of a material nature and therefore have bocome very rich in material sense. But we are poor spiritually. I think it may be time to turn back in that derection, in the direction of religion. I don't mean going to Chruch and reciting certain creed, the out ward form of religion. By religion I mean the inward spiritualy form of religion. That is something wich unlike great ability in art, science and technology is found in every human being, if you can draw it out. It is part of human being, but usually it only comes out in time great crisis.**
>
> **(Kita telah berhasil menaklukkan alam materi itu, itulah sebabnya kita amat kaya dalam perasaan dan tumpukan materi. Tetapi kita terlalu miskin dengan perasaan rohani. Saya pikir itulah waktunya kita untuk kembali ke arah agama. Yang saya maksudkan bukanlah sekedar ke gereja, dan menghafal syahadat dan misa, dan kulit-kulit agama. Tetapi yang saya maksudkan, yaitu jiwa agama itu sendiri. Sesuatu yang berbeda dengan kemampuan seni, pengetahuan dan tehnologi. Ia mesti terdapat pada diri manusia. Seandainya engkau menariknya ke luar. Ia adalah bagian dari manusia itu sendiri, tetapi biasanya hanya timbul pada saat dan keadaan yang gawat sekali).**

Setelah diteliti, ternyata bentuk Sekularisasi itu ada dua kategori : yaitu pertama : sekelompok masyarakat yang masih mempercayai Tuhan, serta mengakui kehebatan ajaran suatu agama, tetapi mereka enggan mematuhi Tuhan dan Agama itu. Keduanya; sekelompok masyarakat yang tegas-tegas tak mengakui Tuhan dan kebesaran suatu Agama, dan menentangnya dengan secara konsekwen. Yaitu sekelompok masyarakat Atheisme, yang akhirnya menjelma masyarakat sosialits yang Komunist itu.

Sekularisme yang ber Tuhan, hanya berbeda satu tingkat dengan mereka yang tidak mengakui Tuhan. Namun jelas ciri keduanya senantiasa akan berusaha menghapus etika dan ajaran agama suatu bangsa, itu jelas.

Diantara pemikir Barat yang berorientasi secara Sekularisasi, yaitu : Charles Darwin, dengan bukunya : "The Origint Of Spicies". Darwin mencoba menguraikan ihwal gejala biologi manusia serta kaitannya dengan alam semesta, berdasar-

kan proses Evolusi dan hukum Causal (sebab akibat). Tuhan tidak mempunyai peran apapun terhadap perwujudan alam ini, semuanya mesti melewati proses perkembangan dan lingkungan yang bertahap, demikian menurut orientasi Darwin. Gagasan yang sesat itu akhirnya diteruskan oleh : Prof. Thomas Huxley, Wallce, Alfred Russel dan Herbert Spencer. Dalam bidang methafisika dikembangkan oleh : David Home, bidang politik, hukum dan moral diteruskan oleh : Stuart Mill, Kant, Erasmus, Heggel, Nietzsche, dan John Lock dalam bidang pendidikan. Dan versi Sekularisasi di bidang-bidang yang lainpun berkembang dengan beruntun dan pesat, semuanya bertentangan dengan alam fikiran kaum beragama. Karena itu kita harus berprinsip dengan hujjah al Qur'an, surat : Al Mukminun 71:

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ

Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, niscaya binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada didalamnya.

Pola hidup Sekular, adalah bersikap fungsionil, yaitu lebih mengutamakan akal dari pada hujjah dan kesucian suatu Agama, yaitu disebutkan, bahwa : nilai suatu keyakinan, adalah tergantung pada manfa'at praktisnya. Yakni sekarang dan disini, jadi amatlah realistis. Persoalan nanti adalah soal nanti, buat apa berpikir tentang Tuhan dan akhirat yang serba abstrak, semuanya merupakan intuisi kosong yang tanpa guna. Kita memang sering dikaburkan oleh istilah : Sekularisasi dengan Modernisasi, asal tidak sampai ketingkat kesalah fahaman, itu bisa saja terjadi. Sungguhpun mulanya Sekularisasi itu sendiri tekanan dan nadanya merupakan proses penduniawian yang hakekatnya bercorak duniawi. Jadi bukan penduniawian suatu proses yang berbentuk sacral. Adapun usaha dan contoh bentuk penduniawian. dalam gejala sacral (sistim peribadatan suatu agama) dewasa ini, sebagaimana proses dalam sistim pembaharuan pendidikan, yang kemudian tidak meliburkan anak-anak sekolah di hari puasa. Ini jelas ada proses penggusuran pada nilai sacral, dengan dalil pembaharuan, yang terang akan menuju masyarakat Sekularisme setelah melewati tahapan modernisasi. Menurut Van Peursen : modernisasi memang mudah menjurus pada sistim sekular, yang lambat-laun hendak membuang kesan-kesan pikiran methafisis (kegaiban), tidak akan berpikir lagi tentang; Dzat Yang Maha Tinggi, alam malakut yang super malakut yang super natural, dan sebagainya. Tetapi hanya berpikir terbatas pada sesuatu itu apakah mesti bermanfaat atau tidak, sebagaimana gejala-gejala yang makin melanda seluruh dunia dewasa ini.

Ihwal Sekular-Sekular ini, akhrinya Prof. Arnold Toynbee, menyarankan:

> "In the spirit of life, put the scularst super structure back in to religions fondation, but scularisme can not abolition every religions".
> (Dalam kehidupan masyarakat beragama, bendunglah cara-cara sekular, dan usahakan kembali pada dasar-dasar agama yang lebih murni. Meskipun pola sekular itu tak bakal bisa menghapus pengaruh agama).

Sebagai natijahnya, jelas bahwa sistim Sekularisasi selalu berusaha menghilangkan kesan dan ajaran suatu agama secara bertahap. Karena bentuk dan motifnya amat bertentangan dengan ajaran dan aqidah Islamiyah kita. Maka suatu alter-

Bersambung hal. 79

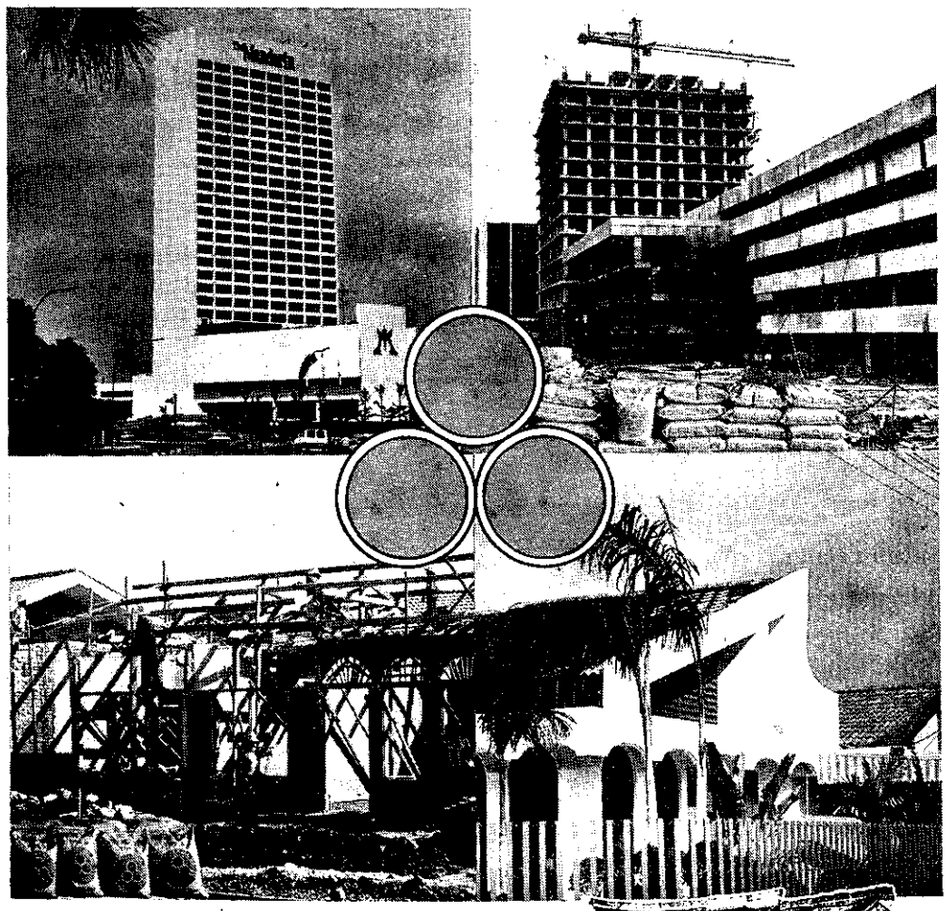

TIGA RODA
partner Anda
dalam pembangunan

P.T. DISTINCT INDONESIA CEMENT ENTERPRISE
LEVEL 12, WISMA METROPOLITAN • KAV. 29, JLN. JEND. SUDIRMAN • JAKARTA - INDONESIA
PHONES: 583701 - 05 • P.O. BOX: 4018 JKT. • TELEX: 44505 INCEM JKT. • CABLE: INDOCEMENT
CEMENT FACTORY: CITEUREUP - CIBINONG • PHONE: 982791 - 982641

Empat Tahun
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pengantar Redaksi

Pada hari Jum'at, 20 Juli 1979, Majelis Ulama Indonesia mengadakan Peringatan Hari Ulang Tahunnya yang ke empat. Dalam Mimbar Ulama nomor ini dimuat sambutan Ketua DPR/MPR, Menteri Agama dan pidato Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Prof. Dr. Hamka.

SAMBUTAN PIMPINAN MPR/DPR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Saudara-saudara Pimpinan Majelis Ulama yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia.

Perkenankanlah saya untuk atas nama Pimpinan MPR/DPR terlebih dahulu mengucapkan diperbanyak terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada Pimpinan MPR/DPR untuk memberikan sambutan pada peringatan Ulang Tahun yang ke–IV ini.

Selanjutnya berkenaan dengan HUT Majelis Ulama yang ke IV ini, saya sampaikan ucapan selamat dengan disertai harapan semoga Majelis Ulama selalu mendapatkan lindungan dari Allah SWT.

Hadirin sekalian yang berbahagia

Empat tahun buat umur suatu organisasi memang belum banyak tetapi hal ini menjadi lain apabila Pimpinan Organisasi tersebut adalah orang-orang yang telah banyak makan garamnya kehidupan bermasyarakat, seperti halnya para Pimpinan Majelis ini.

Ini terbukti dari hasil-hasi yang telah dicapai oleh Majelis Ulama selama ini dan peranannya yang semakin tahun semakin nyata.

Sebagaimana organisasi yang bertujuan untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur yang dirihoi oleh Allah SWT sesuai dengan Pancasila, UUD 45 dan GBHN, Majelis Ulama memikul tugas yang tidak ringan.

Majelis Ulama dengan demikian menjadi penterjemah yang menyampaikan fikiran-fikiran dan kegiatan-kegiatan pembangunan kepada masyarakat.

Dalam rangka ini terkandung arti mendorong, memberi arah dan menggerakkan masyarakat dalam pembangunan.

Mengingat pembangunan nasional kita pada dasarnya adalah pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat, maka pembangunan tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Oleh karenanya seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali wajib melibatkan diri dan ikut serta dalam pembangunan itu. Disinilah sangat dituntut peranan Alim Ulama untuk ikut menggerakkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Saya yakin peran ini dapat ditunaikan oleh Alim ulama, mengingat bahwa Ulama itu merupakan Pimpinan-pimpinan spiritual masyarakat yang selalu menjadi panutan masyarakat.

Peranan Majelis Ulama ini menajdi penting apabila diingat bahwa pembangunan nasional kita sebagaimana telah ditegaskan dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1978, menuntut terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual, antara dunia dan akhirat.

Saudara-saudara sekalian yang terhormat,

Dalam sisinya yang lain, pembangunan yang selalu menuntut perubahan untuk perbaikan, dapat mengakibatkan timbulnya keresahan-keresahan.

Keresahan dalam masyarakat yang sedang membangun tentulah dapat difahami. Yang terpenting dalam hal ini ialah mengetahui sumber-sumbernya dan mencarikan jalan keluarnya. Dalam rangka ini pimpinan DPR telah mengambil langkah-langkah untuk ikut menyalurkan keresahan-keresahan tersebut.

Para Alim Ulama sebagai Pimpinan informal yang selalu bergaul dan berada di tengah-tengah masyarakat tentu lebih banyak mengetahui sumber-sumber keresahan masyarakat tersebut. Pada tempatnyalah kalau saya mengajak Majelis Ulama untuk bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dengan segala kesungguhan hati, ikut menyalurkan dan mencarikan jalan keluar agar keresahan tersebut justru dapat menjadi sumber dinamika pembangunan. Insya Allah dengan tawakkal dan dengan penuh kesabaran semua itu bisa kita atasi.

Ajakan saya ini menjadi lebih penting apabila dihubungkan dengan datangnya bulan suci Ramadhan yang juga menjadi kaitan peringatan ini mengingat bulan Ramadhan adalah bulan untuk menempa keimanan, ketaqwaan dan kesabaran. Bulan puasa juga merupakan bulan untuk meningkatkan ibadah kepada Tuhan dan amal bakti kemasyarakatan.

Saudara-saudara sekalian yang terhormat,

Saya merasakan bahwa setelah berdirinya Majelis Ulama antara lain bertugas untuk menjadi penghubung antara pemerintah dengan Alim Ulama dan Ummat Islam serta memberi nasihat kepada pemerintah dalam masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan, telah bisa dibina saling pengertian antara Alim Ulama dan umat Islam dengan Pemerintah.

Dengan demikian terhindarlah kemungkinan-kemungkinan kesalah fahaman dalam memberikan makna kepada pembangunan yang sedang kita laksanakan bersama ini.

Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas ulang tahun Majelis Ulama yang ke–IV, semoga Allah SWT memberkahi usaha-usaha kita bersama.

Wassalam,

DARYATMO

SAMBUTAN MENTERI AGAMA R.I.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah subhana wata'ala, pada malam ini kita bersama-sama dapat ikut serta memperingati ulang tahun keempat Majelis Ulama Indonesia, yang telah berdiri sejak Juli 1975 yang lalu.

Usia ini memang masih relatif muda untuk mencoba memikul beban yang berat, sebagaimana dahulu pada awal pembentukkannya diisyaratkan oleh Bapak Presiden, agar Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai rohani bangsa Indonesia, pembina rohani bagi lebih dari 130 juta muslimin Indonesia, sehingga di dalam mengisi pembangunan nasional, sektor pembangunan rohani bangsa tidak ketinggalan, sehingga dapat dikembangkan bersama-sama dengan sektor fisik dan pembnagunan ekonomi pada umumnya.

Adalah mutlak untuk mendapat perhatian bahwa di dalam gemuruhnya pembangunan nasional, dalam menghadapi perubahan-perubahan yang cepat akibat pembangunan, unsur rohani bangsa perlu senantiasa diperhatikan untuk dikembangkan dengan sejalan pula. Perubahan yang cepat dalam banyak aspek kehidupan kita, seringkali menimbulkan gap atau kesenjangan budaya pada masyarakat yang berakibat sikap mental yang merugikan. Misalnya sinis, frustrasi, melarikan diri atau menutup diri dan tidak mau tahu terhadap ide-ide baru. Semua ini sekali lagi menunjukkan bahwa tugas untuk menunjukkan peranan Ulama semakin besar di tengah-tengah masyarakat kita.

Peringatan HUT Majelis Ulama Indonesia sekarang ini dilaksanakan diambang bulan suci Ramadhan, satu bulan khusus pembinaan mental segenap bangsa secara bersama-sama. Kesempatan ini lebih menggugah kita untuk secara terus menerus menyadari tugas kita, terutama para Ulama sendiri agar lebih mampu menunaikan kewajibannya membimbing rohani umat. Allah SWT dengan bulan puasa ini memberi kemudahan kepada kita para pemimpin, sebab pembinaan mental dengan puasa tidak lagi memerlukan publikasi, tidak memerlukan penataran atau kepanitiaan untuk menjelaskannya, sebab umat sendiri yang secara bersungguh-sungguh datang menyambutnya. Tinggal lagi para Ulama membina dan mengarahkan bentuk pengisian, yang bersifat ritual maupun pembangunan.

Para Ulama dituntut untuk mengamati dan memberikan bimbingan agar bulan puasa ini dapat ditingkatkan amal ibadah, mengadakan introspeksi terhadap amal-amal kita di masa lalu dan persiapan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.

Kepada ulama saya mengharapkan untuk menanamkan rasa optimisme kepada umat kita. Kita tidak perlu ikut latah untuk menyatakan keresahan di dalam masyarakat. Keresahan adalah inherent dengan tingkah laku manusia, Semakin pintar seseorang, semakin makmur seseorang, maka semakin banyak ketidak puasan dan permintaannya yang tidak dapat dipenuhi. Menjadi kewajiban para Ulama untuk mengiliminir keresahan yang sementara ini timbul akibat adanya issu-issu

seperti issu Sekularisasi, Westernisasi. Kita harus yakin, kitalah yang harus ikut serta meredakan, dan menghilangkan issue tersebut. Karena jelas, bahwa faham sekuler dan westernisasi itu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan ini bukan pula maksud saya agar kita diam-diam tidak bekerja atau memberikan reaksi buta. Keresahan adalah inherent dengan pembangunan, Ia sekaligus faktor dinamisator agar memecut semua kita untuk bekerja lebih keras, bekerja lebih efficient, bekerja lebih jujur, dan bekerja lebih bermutu lagi dalam kwalitasnya, sehingga tuntutan apapun pada dasarnya akan kita usahakan untuk memenuhinya, senantiasa mengadakan perbaikan dan penyempurnaan-dari langkah sebelumnya.

Majelis Ulama tentu sudah bekerja cukup keras dalam usianya yang 4 tahun. Kita menyaksikan bersama kehadiran para Ulama dalam Majelis Ulama Indonesia telah memberikan warna dalam lingkungan kemasyarakatan kita. Dalam berbagai peristiwa nasional Majelis Ulama telah memperdengarkan suaranya. Hal mana sangat jauh berbeda dengan sebelumnya, sebelum badan yang bernama Majelis Ulama berdiri tahun 1975. Akan tetapi sudah puaskah masyarakat? Mungkin bahkan sebaliknya. Justru karena Majelis Ulama bekerja maka akan nampak ada atau banyak kekurangan. Sebab hanya yang tidak bekerja yang tidak salah. Walaupun sesungguhnya, tidak bekerja itulah kesalahan terbesar.

Marilah ktia ikut menenangkan masyarakat, tidak ikut mengupasi keresahan yang bahkan dapat berakibat sebaliknya. Saya bersyukur, melalui kegiatan Majelis Ulama Indonesia, ummat Islam bersatu dalam satu wadah yang merupakan syarat mutlak bagi persatuan nasional.

Saudara-saudara yang terhormat,

Ada satu hal yang ingin saya mengundang perhatian kita secara lebih bersungguh-sungguh untuk masa-masa yang akan datang ini. Berulangkali saya ingin mengajak seluruh kaum muslimin ikut serta secara aktip menghayati, mengamalkan bahkan lebih dari pada itu memperjuangkan Pancasila agar menjadi kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia.

Pancasila yang kita perjuangkan hendaknya dapat dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari hari. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan bahwa justru bahaya terbesar bagi Pancasila adalah kaum sekularis, mereka kaum pemuja akal fikiran yang berfilsafat kebendaan. Umat beragama adalah justru merupakan pengawal yang paling tangguh, karena merekalah yang meletakkan dasar budaya atau sikap kejiwaan tempat berpijaknya Pancasila. Umat beramalah yang paling berkepentingan mempertahankannnya karena dengan itu maka existensi keagamaan menjadi terjamin secara konstitutional dalam kehidupan bangsa kita.

Bagi bangsa Indonesia yang sedang membangun wajib mempelajari ilmu pengetahuan sedalam-dalamnya, wajib mempelajari tehnologi dan mempergunakan hasil ilmu dan tehnologi untuk mengejar ketinggalan. Akan tetapi kita harus menyadari bahwa ilmu dan tehnologi bukan satu-satunya keperluan hidup manusia. Ilmu dan tehnologi adalah sebagian dari keperluan dasar pembangunan kita. Ilmu dan tehnologi bukan segala-galanya.

Disinilah kewaspadaan yang harus kita perkuat. Para Ulama dengan pengetahuan dan pemahaman akan jiwa bangsa yang religius akan dapat mewujudkan manusia Pancasila yang taat beragama. Adalah kewajiban para Ulama untuk tidak

henti dan tiada bosan mengajak umat agar benar-benar menghayati kehidupan keagamaan.

Sekian sambutan saya. Sekali lagi saya mengucapkan SELAMAT BERULANG TAHUN. Semoga senantiasa mendapat bimbingan dan hidayahAllah SWT dan selalu dalam rahmat dan inayat-Nya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.,

MENTERI AGAMA R.I.

H.ALAMSJAH RATU PERWIRANEGARA

PIDATO KETUA UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA
MAJELIS ULAMA INDONESIA EMPAT TAHUN

Dalam satu Rapat Besar memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bertempat di Jatinegara pada awal tahun 1975, yang dihadiri tidak kurang daripada 50.000 kaum Muslimin, yang disana hadir juga orang-orang terkemuka, baik dari kalangan sipil atau kalangan militer, ketika tiba giliran saya hendak turut memberikan ceramah, saya telah menjelaskan pada waktu itu bahwa disaat sebagai sekarang ini, yang nampaknya Amerika sudah akan meninggalkan medan perang Vietnam dan akan pulang ke negerinya membawa kekalahan, karena berhadapan dengan semangat rakyat yang terpadu, maka kita di Indonesia sudah sepantasnya dan sewajarnya bersatu padu di antara pihak penguasa dengan pihak rakyat. Maka kalau Pemerintah tidak memanggil rakyatnya untuk bekerjasama dengan tulus ikhlas dalam keadaan seperti ini, itu adalah Pemerintah yang kurang bijaksana. Sebaliknya rakyat sendiri kalau dihimbau, dipanggil oleh Pemerintah, tidaklah layak pemuka-pemuka rakyat berpangku tangan dan berlengah diri. Karena di saat bahaya sudah mengancam, tugas dan kewajiban Pemerintah dengan rakyat adalah satu. Dia tidak terbagi lagi.

Saya tidak tahu apakah ada hubungannya ucapan saya di Jatinegara pada awal tahun 1975 itu ada sangkut pautnya dengan ihwal yang mulanya hanya bisik desus, kemudian menjadi kenyataan bahwa Majelis Ulama Indonesia akan didirikan. Pemerintah bermaksud mengadakan Majelis Ulama Pusat, sebab di daerah daerah seluruh Indonesia, sejak dari Aceh sampai Maluku, Majelis Ulama sudah pada berdiri. Akhirnya Pemerintah berniat hendak mendirikan Pusatnya.

Bisik desus ini akhir kelaknya menjadi kenyataan. Saudara Prof. Dr. Mukti Ali, Menteri Agama pada masa itu telah menyampaikan kepada saya bahwa Pemerintah telah berketetapan mendirikan Majelis Ulama Pusat. Dan beliau jelaskan juga bahwasanya Majelis Ulama tersebut akan terdiri daripada unsur-unsur gerakan agama yang telah ada, sebagai Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perti, Aljam'yatul Washliyah dan lain-lain. Beliau sebut bahwa saya sendiri, Hamka disebut-sebut akan ditunjuk menjadi Ketua Umum daripada Majelis Ulama tersebut. Beliau katakan bahwa Presiden dan Menteri Dalam Negeri setuju dengan gagasan ini.

Pada suatu malam di awal Juli itu juga Menteri Agama Prof.Dr. Mukti Ali

telah mengundang beberapa orang Pemuka Islam kerumah beliau untuk memperkatakan soal ini. Di sana dibicarakan hak apa dan kewajiban apa yang terletak di atas bahu Majelis Ulama itu kalau jadi dia berdiri. Terutama sekali jelaslah bahwa bagi Pemerintah sendiri, karena Badan-badan Agama yang lain telah ada berdiri, seumpama MAWI dari Katholik dan DGI dari Protestan dan ada pula Badan Pimpinan Agama Budha, sudah seyogiyanya ada pula badan yang demikian dalam kalangan Islam. Tugasnya ialah memberikan nasehat, diminta ataupun tidak diminta, dalam hal-hal yang berhubungan dengan Agama Islam. Dan menyampaikan pula kepada Kaum Muslimin rencana-rencana dan kehendak Pemerintah yang berhubungan dengan ummat Islam, sebagai golongan yang terbesar dalam Negara ini. Dijelaskan pula, sebagaimana yang diusulkan oleh Saudara Kasman Singodimedjo, agar Majelis Ulama itu tidak digajih oleh Pemerintah, sekedar kan diberi honorarium dan diberi fasilitas yang layak jika tenaganya diperlukan untuk melawat ke daerah-daerah atau ke luar negeri yang berhubungan dengan tugasnya sebagai Majelis Ulama Indonesia.

Setelah terdapat persamaan fikiran di antara hadirin dengan Menteri Agama, maka pada 27 Juli 1975 diresmikanlah berdirinya Majelis Ulama Indonesia, yang menjadi pusat dari seluruh Majelis Ulama yang ada di daerah-daerah Indonesia. Dan pada 21 September 1975 bertepatan dengan 17 Ramadhan 1395 dapatlah kira-kira 30 orang Anggota Majelis Ulama diterima menghadap oleh Presiden Suharto. Di sanalah Presiden menyampaikan pengharapan beliau agar Para Ulama berusaha mencapai Kerukunan Hidup Beragama dengan pemeluk-pemeluk agama yang lain di Indonesia dan mengharap pula kewaspadaan Majelis Ulama dalam menghadapi bahaya laten Komunis dan khususnya PKI dalam tanah air ini. Di waktu itu pula Majelis Ulama, yang disampaikan oleh Ketua Umumnya sendiri dihadapan Presiden menyatakan akan berusahamencapai Kerukunan Hidup Beragama, karena konsepnya memang sudah ada dalam Al Qur'an sendiri. Tetapi juga telah disampaikan kegelisahan Umat karena adanya gerak Kristenisasi di Indonesia.

Demikianlah hadirin yang terhormat, bahwasanya sejak tanggal 27 Juli 1975 telah berdiri Majelis Ulama Indonesia. Pengurus-pengurus senantiasa merasakan bahwa bekerja sama dengan Pemerintah, yang didasarkan kecintaan kepada Bangsa dan Tanah Air ini, apabila dikerjakan dengan betul, timbul daripada pribadi yang sadar dan tanggung jawab dihadapan Allah dan dihadapan Bangsa, tidaklah akan semudah yang disangka semula. Akan lebih mudah mencela di luar, menyatakan tidak puas, berkhutbah Jum'at dengan menyindir-nyindir Pemerintah; akan lebih mudah mengeluarkan saja apa yang terasa di hati, tetapi hal demikian belum tentu ada manfaatnya bagi Ummat.

Dan ini telah difikirkan sejak semula.

Sehari setelah selesai datang menghadap Presiden Suharto di Istana Merdeka, pada tanggal 22 September 1975 Ketua Majelis Ulama bersama Sekjen H.Ka - frawi dari Departemen Agama telah datang menghadiri Kongres Mesjid Sedunia yang diadakan di Mekkah. Turut pula 12 orang utusan dari berbagai Mesjid di Indonesia. Sampai dalam Kongres Mesjid Sedunia itu, yang bersidang di Mekkah terjadilah percobaan pahit pertama. Yaitu bahwa semua peserta Indonesia diterima menjadi Anggota Kongres, tetapi Ketua Umum Majelis Ulama sendiri tidak

diterima, meskipun dobolehkan juga hadir sebagai peninjau. Dari dua orang bang sa Indonesia yang bekerja di Sekretariat Rabithatul 'Alamil Islamiy diterima berita bahwa ada surat dari Indonesia yang menerangkan bahwa orang yang menyebut dirinya Ketua Majelis Ulama Indonesia itu tidak bisa dipercaya.

Pengalaman pahit ini saya terima dengan rasa tawakkal kepada Tuhan dan kembali ke tanah air dengan hati sabar. Barulah dalam tahun 1978, sakit karena tuduhan jadi spion ini dapat terobat, dengan datangnya Undangan dari Rabithatul 'Alamil Islamiy kepada Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia agar hadir dalam Kongres Rabithah yang diadakan di Karachi, guna memutuskan pembahagian zone atau daerah-daerah Rabithah, yang mendapat keputusan-bahwa buat Daerah sebelah Timur ini dijadikan Pakistan menjadi Himpunan dari Rabithah di sebelah Timur.

Sesampai di tanah air sibuklah Majelis Ulama menghadapi kewajiban dalam tanah air sendiri. Masalah yang kita hadapi ialah soal Rumah Sakit Baptis di Bukittinggi. Pihak Kristen Baptis mendirikan sebuah Rumah Sakit, bernama Emmanuel di tengah kota Bukittinggi, dengan bantuan dorongan dan dari Komando Tentara di tempat itu, anak Minang sendiri. Dengan perantaraan rumah sakit tersebut sudah mulai pula dilakukan membujuk, merayu dengan segala daya upaya agar orang Islam di kota Bukittinggi ada yang memeluk Kristen.
Rupanya. Angkatan Muda di sana tidak menerima cara penyebaran Kristen dengan bertopengkan mengobati orang sakit ini. Maka terjadilah beberapa kali hal yang mengancam keamanan, sehingga sudah ada pemuda Islam yang dimasukkan ke penjara karena berusaha hendak menghambat Propaganda Kristen dengan perantaraan obat mengobat itu. Karena Majelis Ulama Indonesia telah berdiri maka masyarakat Kaum Muslimin Bukittinggi dan Majelis Ulama Sumatera Barat di bawah pimpinan Ketua Umum HMD. Dt. Palimo Kayo menyampaikan hal ini kepada Majelis Ulama Pusat agar dapat diuruskan dengan sebaik-baiknya dengan Pemerintah Pusat.

Hal ini telah diurus dengan baik dan bijaksana, baik oleh Majelis Ulama ataupun oleh Pemerintah sendiri, sehingga akhirnya menjadi Keputusan Pemerintah hendaknya membeli Rumah Sakit Emanuel itu di atas nama Pemerintah Indonesia dan akan dijadikan Rumah Sakit Umum. Terakhir telah dibentuk suatu panitia pelaksananya.

Pada tahun 1976 datanglah undangan dari anggota-anggota DPR Republik Indonesia yang menghadapi soal-soal yang berhubungan dengan agama, hendak meminta penerangan tentang maksud dan tujuan Majelis Ulama Indonesia. Pertemuan ini telah dihadiri dan didengarkan pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan bahkan ada juga anggota DPR yang memberikan kritiknya yang halus tetapi tajam, namun semuanya telah dihadapi denganbaik oleh Majelis Ulama. Seketika anggota yang terhormat Manuaba menyatakan kagumnya atas terdapatnya toleransi beragama di Indonesia dan hendak menyelidiki darimana sebab-sebabnya, Ketua Umum Majelis Ulama telah menjawab dengan tegas, bahwa terdapatnya kerukunan hidup beragama dan toleransi yang begitu besar ialah karena mayoritas ummat beragama di Indonesia ini ialah Islam. Di negeri negeri yang mayoritasnya beragama Islam, sudah terang akan terdapat toleransi yang demikian itu, se-

bab toleransi dengan agama lain itu adalah perintah dari agama Islam sendiri. Dikemukakan juga perbandingan di antara di Indonesai yang ummat Islam mayoritas, dengan di Philipina yang umat Kristennya mayoritas, maka terjadilah peperangan yang sampai sekarang tidak putus-putusnya. Demikian juga di antara pemeluk Protestan dan pemeluk Katholik di Ireland.

Pada bulan Februari 1976 diadakanlah Musyawarah Paripurna Majelis Ulama bertempat di gedung IAIN di Ciputat memusyawaratkan anjuran Pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Agama Prof. Dr. Mukti Ali agar diadakan Dialog Antar Agama dan Musyawarat Antar Agama, di antara Islam, Protestan dan Katholik dan Budha serta kepercayaan. Gagasan ini diterima baik oleh Majelis Ulama dan dijelaskan pula pendirian dari Majelis Ulama bahwa musyawarah itu hendaklah atas anjuran dan pimpinan dari Pemerintah sendiri. Tidak usah diadakan badan sendiri di luar dari Departemen Agama. Pendirian itu dipegang teguh sampai sekarang ini. Karena kalau bukan Pemerintah yang mengadakan dan memimpin pertemuan, dengan sendirinya akan timbul percobaan baik secara halus atau agak kasar, tentang siapa yang akan jadi pimpinan. Tetapi kalau Pemerintah yang memegang pimpinannya, bila saja datang undangan, semuanya akan bersedia hadir dan turut memperkatakan hal-ihwal yang akan dapat dimusyawaratkan bersama dengan menitik titik-titik pertemuan faham.

Pada tahun 1976 itu pula LEMHANAS (Lembaga Pertahanan Nasional) mengadakan kontak dengan Majelis Ulama hendak menerangkan dasar-dasar Ketahanan Nasional yang akan jadi pegangan dalam Negara ini dalam menghadapi Pemilihan Umum kedua kelak. Pertemuan ini diadakan sampai dua kali, karena Lemhanas dengan pimpinan Mayjen Kartakusuma (alm) hendak mendengar pula pendapat dari Majelis Ulama.
Dalam pertemuan dengan Lemhanas itulah Majelis Ulama menjelaskan pendirian bahwasanya Pancasila adalah hasil perjanjian dari pada 9 (sembilan) orang pemimpin bangsa Indonesia, empat dari kalangan Nasional dan ke empatnya beragama Islam dan empat dari kalangan Islam dan ke empatnya pun 100% bangsa Indonesia, dan seorang dari kalangan Kristen. Hasil perundingan dari ke sembilan pemimpin itulah yang menimbulkan Falsafat Negara yang sekarang tetap kita pertahankan, yaitu Pancasila. Menurut ajaran Islam, Pancasila itu adalah buah dari suatu musyawarat dan bertumbuh menjadi suatu janji, dan janji itu menjadi kokoh kuat kuasanya, diakui oleh agama Islam, selama dia tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Oleh sebab itu maka Kaum Muslimin Indonesia wajib memegang janji itu dan memenuhinya, sebab ke empat Pemuka Islam yang duduk dslam musyawarat itu adalah mewakili golongan Kaum Muslimin Indonesia, dan tidaklah mungkin bahwa Kaum Muslimin akan memungkiri perjanjian yang telah diikat itu karena sikap demikian berlawanan dengan hukum agama sendiri.

Dengan keterangan yang demikian itu dengan sendirinya tertolaklah percobaan beberapa golongan selama iniyang menyebarkan isyu-isyu bahwasanya Kaum Muslimin anti kepada Pancasila. Kaum Muslimin Indonesia tidak menyukai Pancasila. Tetapi setelah jelas pendirian Kaum Muslimin diuraikan dihadapan umum, bahwasanya Pancasila adalah pengorbanan dari Kaum Muslimin, demi karena ingin kemerdekaan Indonesia, dengan sendirinya pula timbul pula isyu baru, bah-

wa Kaum Muslimin hendak menguasai Pancasila. Pendeknya, sekarang mengertilah saya, bagaimanapun baiknya langkah yang kita tempuh, namun isyu-isyu pasti ada. Dan orang memang cemas dan takut, kalau-kalau Kaum Muslimin sebagai golongan mayoritas terbesar di Indonesia ini, dengan setia memegang Pancasila, memang ada yang takut kalau-kalau Kaum Muslimin ini mencapai kedudukan politik yang layak dalam Negeri ini.

Dengan segala kerendahan hati, inginlah saya menyatakan bahwa saya sendiri, yang sekarang duduk sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, telah sejak tahun 1949 sebelum Kedaulatan Indonesia diserahkan dengan resmi oleh Belanda kepada Indonesia, telah menyatakan persetujuan saya dengan Pancasila, artinya sejak 30 tahun yang lalu. Hal ini saya tuliskan dalam buku saya "Revolusi Agama" yang diterbitkan oleh Toko Buku Antara. Dan dalam tahun 1951 keluar lagi buku kecil saya (brosur) bernama "Urat Tunggang Pancasila", yang sejalan dengan faham Bung Hatta dan Pak Harto, bahwa yang jadi pangkal utama dari Pancasila ialah Dasar Pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa", dan yang lain berpangkal dari itu. Dan seketika diundang dan diberi kehormatan oleh Pak Harto memberikan Khutbah Hari Raya 'Idhul Fithri pada 1 Januari 1967, bertepatan dengan 1 Syawal 1387, Pancasila itu pulalah yang jadi isi khutbah Hari Raya saya di lapangan di antara Istana Merdeka dan Istana Negara.

Dan itu akan tetap menjadi pendirian saya, karena diapun tetap pula menjadi pendirian Negara, Filsafat Negara. Dan pendirian inipun telah saya tegaskan lagi dengan berbagai keterangan dan penjelasan pada Sidang Lemhanas pada tahun 1976.

Sudah pasti bahwasanya segala tindakan yang kita lakukan, tidaklah akan mendapat sambutan yang sama dari segala golongan masyarakat. Pengalaman pahit telah saya rasakan ketika datang pada bulan Puasa ditahun 1977 itu juga, ketika mengadakan Ceramah bulan puasa di Mesjid Al Falah Surabaya.

Ketika saya berpidato sehabis mengerjakan Tarawih, beberapa pemuda telah menyiarkan suatu Surat Selebaran. Karena sikap mereka yang mencurigakan dan mengacaukan para pendengar yang tengah asyik, mereka sudah dikejar, tetapi tidak dapat. Setelah selesai pertemuan dibacakanlah Surat yang diedarkan itu. Isinya rupanya ialah menghasut kepada hadirin agar jangan mendengarkan segala keterangan saya. Sebab saya menurut Surat Edaran itu adalah seorang pengkhianat perjuangan, kaki tangan Suharto dan pemimpin yang plintat-plintut. Beberapa Surat Edaran itu dapat saya bawa ke Jakarta besok paginya. Tetapi sesampai saya di Jakarta saya lebih dikejutkan lagi dengan Surat yang diedarkan oleh Sawito. Dalam Surat Sawito itu tersebutlah rasa tidak puas dengan Pemerintah yang sekarang. Rasa ketidak puas itu ditandatangi oleh Kardinal Darmoyuwono, Bung Hatta, bekas Kepala Polisi Soekamto dan saya sendiri H. Abdulmalik Karim Amrullah. Saya memang telah turut menandatangani Surat, karena saya tidak curiga pada motip dan latar belakang politik Sawito tersebut. Ketika Surat itu diedarkan barulah saya tahu bahwa disamping Surat yang ditandatangi itu, adalah lagi Surat lain yang isinya berisi anjuran agar Pak Harto menyerahkan kekuasaan kepada Bung Hatta.

Dengan kedua surat itu, baik yang didapat di Surabaya atau yang dibuatkan Sawito itu bertemulah dua hal yang berlawanan. Pertama menuduh saya kaki tangan Pemerintah, kedua menuduh saya turut dalam gerakan hendak menumbangkan Pemerintah. Kedua surat itu saya serahkan kepada yang berwenang.

Tetapi di samping keadaan yang demikian, atau di samping kesukaran yang dihadapi, Allah Ta'ala pasti memberikan pula kemudahan. Dalam tahun 1976, bulan April, sebagai Pribadi saya telah mengirimkan sepucuk Surat kepada Presiden memohonkan agar apa yang disebut sebagai Aliran Kepercayaan, jangan sampai dianggap sebagai suatu agama, disamping agama yang sah menurut anggapan dunia. Sebab Aliran Kepercayaan itu hanya beredar pada beberapa tempat di tanah Jawa. Aliran kepercayaan itu tidak ada di pulau-pulau Indonesia yang lain. Kalau Aliran Kepercayaan itu dianggap sebagai agama, takut Indonesia akan pecah, dipecahkan oleh beraneka ragamnya Aliran Kepercayaan yang semuanya minta diakui sebagai agama, yang mungkin akan beratus banyaknya.

Saya bersyukur kepada Tuhan, karena setelah Surat di atas nama Pribadi itu disampaikan kepada Presiden, hal ini saay beritahukan kepada Majelis Ulama Indonesia. Oleh Majelis Ulama diakui bahwasanya Surat itu meskipun di atas nama Pribadi, tetapi diakui sebagai Surat dari Ketua Majelis Ulama Indonesia.

Setahun setelah surat itu disampaikan kepada Presiden barulah masyarakat Indonesia ribut membicarakan Aliran Kepercayaan. Di waktu itulah terdapat kesepakatan dan persatuan segala Aliran Islam di Indonesia, yang menolak Aliran Kepercayaan itu jika dianggap sebagai agama. Dalam Pidato Presiden di Sidang MPR Presiden telah menegaskan bahwa Aliran Kepercayaan itu bukan agama dan tidak akan ditingkatkan menjadi agama.

Kitapun bersyukur kepada Allah, karena dalam hal yang benar-benar mengenai 'Aqidah Islam ini, seluruh golongan Kaum Muslimin kompak jadi satu. Sampai Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meninggalkan Sidang MPR ketika soal ini dibicarakan. Dan syukur pula, karena kemudiannya pada bulan Maret 1978 terbentuklah Kabinet yang baru dan duduklah H. Alamsjah Ratu Perwiranegara menjadi MenteriAgama. Belumcukup satu Minggu beliau menjadi Menteri, beliau telah mengeluarkan keterangan yang sangat jelas, bahwasanya sesuai dengan GBHN Aliran Kepercayaan itu tidak termasuk dalam salah satu agama yang ada di Indonesia. Sebab itu diapun tidak masuk dalam Kementerian Agama.

Maka hal yang digelisahkan lebih setahun lamanya tentang soal Aliran Kepercayaan itu, oleh Menteri Agama H. Alamsjah telah diselesaikan dalam masa satu hari, dengan permakluman beliau dalam pers bahwa Aliran Kepercayaan itu karena bukan suatu agama tidaklah dia masuk dalam salah satu jabatan dalam Departemen Agama. Kemudian disambut oleh Menteri Penerangan dan Menteri P dan K bahwa dia masuk kedalam Kebudayaan.

Untuk menghargai kebijaksanaan yang cepat dan tepat ini, teringatlah saya bahwa saya telah mengucapkan Selamat kepada Menteri Agama, dua hari sebelum keluar Keputusan dan Kebijaksanaan beliau mengenai Aliran Kepercayaan itu. Tetapi diwaktu itu pula Menteri Agama telah mengakui terus terang bahwa beliau bukanlah seorang Ulama, bukan sebagai Menteri-Menteri Agama yang sebelum beliau. Tetapi kata beliau sebagai seorang Muslim beliau tetap mencintai Agama Islam, mungkin tidak kurang kecintaan beliau dengan kecintaan orang lain. Hanya dengan dasar cinta kepada agama itulah beliau terima jabatan ini. Ketika itu spontan saya telah menyatakan kepada beliau Ucapan Selamat atas kesudi

an beliau menerima tanggung jawab yang diberikan Presiden itu. Biarpun beliau bukan seorang Ulama, janganlah beliau cemaskan. Karena di samping beliau ada Ulama-Ulama yang akan membela dan menyokong segala usaha beliau yang akan membawa kemajuan bagi Agama Islam.

Malam itu juga, sesudah peluang yang sangat berbahagia itu, hal ini saya sampaikan pula kepada Pengurus Harian Majelis Ulama Indonesia. Sayapun bersyukur karena jawaban saya yang demikian kepada Menteri Agama mendapat sambutan dan persetujuan dari Majelis Ulama Indonesia. Bahkan sehari sesudah beliau menyatakan bahwa Aliran Kepercayaan tidak termasuk dalam Departemen Agama, beliau sendiri telah berkenan datang ke Majelis Ulama menyampaikan hasil pertemuan beliau dengan Presiden mengenai hal itu dan mendapat sambutan yang baik dan meriah dari Rapat Majelis Ulama Indonesia dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bantuan Positif dari Majelis Ulama Indonesia dan janjinya bahwa jika Menteri Agama bukan Ulama, Majelis Ulama bersedia memberikan bantuan kepada beliau dari segi Ke Ulamaan itu. Maka bersyukurlah Majelis Ulama kepada Tuhan, setelah beberapa bulan saja beliau menjabat jadi Menteri, telah keluar lagi Surat Keputusan yang kedua, yaitu bahwasanya memberikan Dakwah Agama tidak perlu lagi meminta izin kepada polisi, cukup dengan kerjasama yang baik dengan Pegawai-pegawai yang berwenang kejurusan Dakwah Agama itu dalam Departemen Agama sendiri. Majelis Ulama sangat mensyukuri Keputusan Menteri ini, sehingga timbullah percaya mempercayai di antara Pemerintah dan para Muballigh dan Da'i, dalam menegakkan Negara yang sama kita cintai ini. Meskipun pada beberapa daerah Surat Keputusan Menteri itu belum berjalan dengan sewajarnya, namun Surat Keputusan itu tetap berlaku dan tidak akan dicabut. Moga-moga pihak kita Kaum Muslimin pandai-pandai melaksanakan Surat Keputusan itu.

Maka meskipun peraturan yang membebaskan Muballigh dan Da'i ini belum disambut sepenuhnya oleh beberapa penguasa di daerah, namun kita dari Majelis Ulama Indonesia menyatakan lagi sokongan dan sambutan baik kita atas Surat Keputusan Menteri ini. Moga-moga akan berjalan berangsur di seluruh Daerah Indonesia dengan dasar kerjasama yang baik diantara Umara dan Ulama di Daerah itu.

Setelah itu datanglah Surat Keputusan yang benar-benar mengejutkan, baik dari kalangan Islam, karena keberanian Menteri menembus hal yang telah dibicarakan oleh Presiden Suharto pada November 1967, atau pihak Kristen sendiri yang merasa bahwa haknya menyebarkan Agama Kristen dihalang-halangi oleh Pemerintah R.I. Itulah Surat Keputusan No. 70 dan 77 yang terkenal. Yang pada No. 70 ditentukan bahwa orang yang telah memeluk suatu Agama jangan dijadikan obyek propaganda oleh agama yang lain, (sebagaimana yang selama ini dilakukan oleh pihak Kristen kepada Ummat Islam Indonesia). Pada Surat Keputusan 77 ditentukan pula bahwa segala bantuan yang diterima dari Luar Negeri hendaklah diberitahukan kepada Pemerintah, dari mana diterima, siapa yang mengirim dan siapa yang menerima dan guna apa bantuan itu dikirimkan.

Ini adalah sikap yang tegas dari Pemerintah membatasi keleluasan suatu golongan agama hendak memindahkan Ummat Islam Indonesia kepada agama yang lain. Sampai saat-saat terakhir pihak Kristen, MAWI dan DGI tidak mau menerima surat keputusan tersebut. Namun Menteri Agama tidak pula mundur dari apa yang telah diputuskan, malahan diperkuat lagi dengan Keputusan Bersama No.1/1979 di antara dua orang Menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Indonesia.

Setelah bertahan, tidak mau menerimanya, beberapa bulan lamanya, akhirnya pihak Kristen suka juga menerima peraturan itu. Tetapi kemudian ternyata bahwa usaha mereka meng Kristenkan Kaum Muslimin Indonesia itu tidak juga berhenti, malahan lebih lihay dan lebih cerdik daripada selama ini. Sehingga kalau Kaum Muslimin telah lemah rasa gairah agamanya, Surat Keputusan yang tersebut itu akan tetap jadi Surat Keputusan namun orang Islam akan masih tetap dibujuk dengan beras, dengan pakaian, dengan adopsi anak dan berbagai cara yang lain, agar segera memeluk Agama yang mereka propagandakan. Sebab itu teranglah bahwa Surat Keputusan Menteri yang sangat berharga itu, sangat bergantung pelaksanaannya kepada Pemerintah dan semangat perjuangan Kaum Muslimin sendiri.

Dalam hal ini sekali lagi Majelis Ulama Indonesia menyampaikan terima kasihnya kepada Menteri Agama khususnya dan Menteri-menteri yang lain yang bersangkutan, dan semuanya ini terkumpul terima kasihnya kepada Presiden sendiri.

Tetapi benarlah kata pepatah : "Selama nyawa dikandung badan, kewajiban belum berakhir".

Perjuangan yang baru saja dihadapi oleh Majelis Ulama Indonesia ialah memohon tetap liburnya anak-anak sekolah pada bulan Ramadhan. Pada Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia bulan Oktober 1978 di Cipayung telah diputuskan menyampaikan permohonan kepada Pemerintah agar Libur Puasa itu jangan dihapuskan, malahan tetaplah hendaknya Libur itu supaya anak-anak lebih bebas mengerjakan puasanya.

Majelis Ulama Indonesia telah datang menghadap Menteri P dan K Dr.Daoed Joesoef pada tanggal 29 Maret 1979 menyampaikan permohonan agar Keputusan menghabiskan libur itu ditinjau kembali, namun beliau telah menolak permohonan itu dan mengeluarkan alasan bahwa libur puasa itu adalah salah satu sebab kemunduran anak-anak bersekolah, sehingga pelajaran umum tidak ada kemajuannya sama sekali. Dan beliaupun mengeluarkan juga alasan bahwa di negeri-negeri Islam sendiri, sebagai Saudi Arabia, Irak, Suriah dan Mesir tidak ada libur puasa itu. Kitapun mengemukakan bahwasanya di negeri-negeri Arab itu libur bukan berkaitan dengan puasa melainkan dengan musim panas (summer). Namun permohonan kita tidak dapat diterima sama sekali. Setelah menghadap beliau, Majelis Ulamapun memasukkan Surat Permohonan kepada Presiden yang berisi : pertama permohonan agar tetap libur puasa bagi anak-anak sekolah dan kedua, memohon Presiden agar berkenan menerima Majelis Ulama datang menghadap. Lebih dari sebulan Majelis Ulama menunggu penerimaan Presiden.

Maka pada tanggal 8 Mei 1979 Menteri Agama mengundang kami buat datang menghadap beliau. Setelah kami hadiri pertemuan yang beliau adakan,waktu itulah beliau menyampaikan pesan Presiden bahwasnya libur bulan Puasa adalah ketetapan dari Presiden sendiri dan bukan maksud dari Presiden buat melakukan sekularisme dalam Negara ini. Jika ditiadakan libur kanak-kanak pada waktu ber-

puasa, bukan berarti bahwa yang demikian itu adalah karena hendak mengadakan sekularisme. Bahkan dalam bulan Puasa itu akan dijaga benar-benar agar amalan puasa berjalan dengan lancar,. malahan diadakan peraturan agar disamping sekolah-sekolah itu agar dilarang menjual makanan dalam bulan Puasa, dan disesuaikan pula keadaan bersekolah kanak-kanak dengan puasanya, sehingga waktunyapun tidak lama, dan sebagainya.

Keinginan Majelis Ulama hendak berjumpa dengan Presiden itupun akhirnya terkabul juga. Pada 21 Mei 1979 datanglah undangan kepada Majelis Ulama dan hadirlah Anggota Pengurus Majelis Ulama; Saya sendiri, KHM. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Jenderal Soedirman dan H. Amiruddin Siregar, dan kami diterima di Gedung Bina Graha,

Di sanalah Presiden mengulangi lagi keterangan beliau, yang dahulu yang telah disampaikan oleh Menteri Agama itu. Beliau menjelaskan bahwa libur bulan Puasa itu tetap ada, cuma tidak seluruh bulan, melainkan di awal bulan dan diujungnya dan disesuaikan dengan kondisi anak-anak yang sedang belajar. Dan sekali lagi Presiden mengulangi bahwasanya adanya libur yang tidak sebanyak dahulu itu bukan berarti bahwa Negara ini akan menjadi Negara Sekuler.

Dalam pembicaraan dengan Presiden itu nyatalah bahwa dalam sikap Pemerintah ada sikap tolak ansur, bahkan Presiden pun menyesali kaulau ada dalam kalangan Pemerintah sendiri yang terlalu kaku dalam membicarakan soal Libur Ramadhan ini.

Keterangan ini diulangi lagi oleh Presiden ketika beliau memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Mesjid Istiqlal pada 22 Juni 1979 yang lalu.

Majelis Ulama Indonesiapun mengertilah bahwasanya libur puasa sebagai yang dinyatakan Presiden itu akan tetap berlaku. Cuma saja menghadapinya saja yang berbeda dengan cara yang dipakai oleh Menteri P dan K, yaitu dari sikap yang kaku menjadi sikap yang lemah lembut. Dan Majelis Ulamapun menjelaskan pula dihadapan Presiden bahwasanya ketentuan Pemerintah yang telah dijelaskan sikapnya oleh Presiden itu telah dapat dimaklumi oleh Majelis Ulama Indonesia dan sikap Majelis Ulama Indonesia, sejak awalnya sampai ke akhirnyapun telah dapat difahami oelh masyarakat. Pendirian yang telah dinyatakan oleh Majelis Ulama, yang disampaikan oleh Ketua Umumnya sendiri dihadapan Menteri P dan K akan tetaplah demikian. Yaitu Ketua Umum berkata : "Niscaya jika Pemerintah telah memutuskan dan menetapkan suatu Keputusan, maka Keputusan Pemerintah itu jugalah yang akan berlaku. Tidak ada kekuasaan bagi kami hendak menantangnya. Cuma kami berharap moga-moga hal yang seperti ini janganlah terlalu banyak berlaku, yaitu perselisihan pendapat dalam hal yang mengenai agama, di antara Pemerintah dengan Majelis Ulama. Karena memang Keputusan Pemerintah juga yang akan berjalan, tetapi selisih-selisih semacam ini akan meninggalkan kesan yang tidak baik dihadapan orang banyak. Dan yang akan beruntung jika terjadi selisih seperti ini hanyalah golongan ketiga juga."

Dan dihadapan Presiden, Ketua Umumpun menyatakan : "Maafkanlah Presiden jika kami sebagai orang rewel. Dalam hal yang mengenai agama kami merasa wajib menyampaikan kepada Pemerintah.

Bukan karena kami hendak menghalangi melainkan karena kecintaan kami jua adanya. Kami menyatakan hal yang sebenar-benar terasa, apatah lagi kami

telah terikat oleh janji akan menyampaikan nasehat berkenaan dengan hal ihwal agama Islam, diminta atau tidak diminta".

Maka karena sikap kami menyampaikan dengan segala hormat dan kerendahan hati kepada Presiden tentang pendirian kami memohon kepada Presiden agar Aliran Kepercayaan jangan dijadikan sebagai agama, dan sambutan positif dari Presiden bahwa Aliran Kepercayaan bukanlah suatu agama dan tidak akan ditingkatkan menjadi suatu agama. Kemudian itu karena permohonan kami agar Libur Bulan Puasa tetap diadakan, sedang Pemerintah dengan prantaraan Presiden menyampaikan bahwa Libur itu tetap ada, cuma tidak sebanyak dahulu Karena kedua sikap yang tegas ini ada golongan yang secara bisik-bisik tetapi teratur yang mencap bahwa Majelis Ulama Indonesia telah berpolitik !

Pada perasaan dan tanggung jawab kami dalam hal agama, yang timbul dari lubuk hati yang beriman, kami merasa bahwa kami tidaklah mencampuri politik. Kami tidak aktif sama sekali di atas nama Majelis Ulama mengadakan Kampanye Pemilihan Umum. Kami sama sekali tidak berjuang, baik secara terang-terangan atau secara bisik-bisik meminta kepada Pemerintah atau menurut garis-garis yang selalu dipakai dalam perjuangan politik, agar ada diantara kami yang diangkat menjadi Menteri. Kami tidak berlomba agar terpilih menjadi Anggota Parlemen; Kami cuma memegang teguh akan pendirian yangditentukan buat kami dari Pemerintah dan kamipun menyetujuinya; Yaitu menyampaikan nasehat kami yang berkenaan dengan agama kepada Pemerintah, diminta atau tidak diminta.

Setelah itu kami lakukan, menurut keyakinan yang ada pada kami, sampai kami menghadap Menteri-menteri menyampaikan nasehat atau pandangan dari segi agama, bahkan sampai juga menghadap Presiden dengan memohonkan izin lebih dahulu, sekarang datang saja tuduhan bahwa kami telah mencampuri politik.

Kami yakin sangat bahwa Pemerintah Pak Harto tidaklah mengadakan Majelis Ulama Indonesia ini supaya ada Ulama-ulama yang selalu sedia menyatakan setuju dengan tidak ada bantahan, mengikut tanpa reserve, tha'at setia "Asal Bapak senang!" Tidak! Bukan itu maksud Presiden menganjurkan mendriikan Majelis Ulama Pusat. Karena sekarang adalah zaman Orde Baru, menyebut apa yang terasa, menyampaikan nasehat atau usulan kepada Pemerintah secara jujur, dan bukan politik; Bukan mengusul agar dapat pangkat atau jabatan. Tetapi semuanya itu dilakukan dengan secara hormat. Sedangkan Allah tidak pernah menyebut "Ya Muhammad!" kepada Nabi-Nya, setelah Nabi itu diangkat Allah menjadi Nabi dan Rasul, melainkan selalu disebutnya menurut pangkatnya; "Ya Ayyuhan Nabiyyu", "Ya Ayyuhar Rasulu", Wahai Nabi, Wahai Rasul! Sedangkan Tuhan Yang Maha Kuasa begitu sikapnya terhadap Nabi-Nya dan Rasul-Nya, padahal Nabi dan Rsul itu hamba-Nya dan makhluk-Nya, betapa lagi kita rakyat berhadapan dengan Presiden!.

Maka kalau Majelis Ulama menyebut secara jujur dan penuh hormat akan pendiriannya, yang kadang-kadang pernah berbeda dengan Pemerintah, tetapi lebih banyak yang tidak berbeda, janganlah kiranya hal itu dianggap mencampuri politik. Karena kecemburuan yang demikian hanya mengingatkan kita saja kepada Zaman Kolonial. Barangsiapa yang menyatakan pendapat berbeda sedikit saja dengan Pemerintaha lalu dituduh komunis! Sedang bagi kami para ulama adalah se macam mission sacre menyebut apa yang terasa di hati, dengan jujur dan lebih

Tetapi Alhamdulillah, selama empat tahun itu pula, kami Majelis Ulama Indonesia merasakan hubungan kasih mesra yang meresap, shilaturrahmi yang tulus dan ikhlas, dengan Menteri-menteri yang banyak kami berhubungan dengan beliau baik di zaman Menteri Prof. Dr.Mukti Ali, apatah lagi di zaman Menteri H. Alamsjah Ratu Perwiranegara. Terutama lagi bila kami di beri peluang menghadap Presiden, kami selalu merasakan hubungan yang sangat baik dan lapang dada pertemuan seorang ayah dengan putera-puteranya dalam bawaan pribadi masing-masing. Lautan yang tidak penuh oleh air, bumi yang tidak penuh tanaman.

Demikianlah suka dan duka, hasil dan kecewa yang kami hadapi selama masa empat tahun, lebih banyak hasilnya daripada kecewanya. Lebih mengertilah kami bahwasanya bekerjasama dengan hati yang tulus dan ikhlas ini, dalam praktiknya tidaklah semudah merencanakannya. Kitapun dapat mengerti jika terjadi keadaan yang demikian. Karena kita sebagai Majelis Ulama Indonesia memandang dari suatu segi, yaitu segi agama. Sedang Pemerintah memandangnya dari segi yang umum, meliputi agama, negara, ekonomi, politik, situasi dan kondisi.

Kadang-kadang timbul perasaan sendiri, masih perlukah ada Majelis Ulama ini atau tidak? Hal ini pernah saya tanyakan berterus terang kepada Menteri Agama H. Alamsyah Ratu Perwiranegara sendiri. Beliau telah memberikan jawaban kepada saya dengan suatu jawaban yang tepat dan jitu : "Tujuan dalam menegakkan suatu cita-cita, yang murni menghendaki perjuangan. Jika gagal dalam suatu hal, hendaklah ingat lagi bahwa kita tidak gagal dalam hal yang lain".

Maka saya ambillah kesimpulan, setelah berusaha menegakkan Majelis Ulama Indonesia dengan fungsinya ini selama empat tahun, bahwa Majelis Ulama musti ada dan perlu ada. Tidaklah semua apa yang diusahakan menjadi gagal, bahkan ada juga yang berhasil. Sebab itu saya berpendapat bahwa badan ini perlu ada dalam Republik Indonesia, apatah lagi lebih dari 90% bangsa Indonesia adalah beragama Islam. Adapun orang-orang yang akan memangku jabatan itu bisa naik dan bisa diturunkan. Ada yang lemah dan ada yang kuat, namun putusasa dalam perjuangan haruslah kita pantangkan. Dalam mengenai urusan yang mengenai masyarakat umum, tidaklah akan sama pendapat manusia terhadapnya. Ada yang memuji dan mengatakan bijaksana dan ada pula yang menuduh yang tidak-tidak, sebagai yang saya rasakan mula-mula pergi ke Mekkah menghadiri Kongres Mesjid Sedunia itu. Yang penting bagi kita ialah selalu beribadat kepada Tuhan, karena kepadaNya lah kita bertanggung jawab, lahir bathin dunia dan akhirat.

Dalam satu hal kita semuanya bertemu, Yaitu mencintai tanah air kita ini dan bercita-cita hendak berkhidmat kepadanya sekedar tenaga yang ada pada kita. Dan yang paling kita harapkan dalam usaha kita itu hanya SATU, yaitu Ridha Allah!

Waridh-wanul-Lah Akbar.

Dan Ridha Allah adalah lebih besar dari segala-galanya!. ****

DIRGAHAYU

H.U.T. R.I. KE XXXIV

Sumbangan Fikiran Tentang

PEMBINAAN KERUKUNAN HIDUP DIANTARA UMMAT BERAGAMA DAN BERKEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Oleh H. Amiruddin Siregar

Pendahuluan

Setelah adanya Tap-Tap MPR 1978 termasuk REPELITA III-nya, kerukunan merupakan masalah yang penting, karena kerukunan nasional merupakan faktor stabilitas nasional untuk menjamin suksesnya pembangunan nasional (GBHN). masalah kerukunan ini dalam Bab IV Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya menyatakan sebagai berikut :

"Kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan, sehingga terbina hidup rukun diantara sesama ummat beragama, diantara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan diantara semua ummat beragama dan semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat".

Menteri Agama R.I. H. Alamsyah Ratuperwiranegara lebih menjabarkan masalah kerukunan ini dalam trilogi kerukunan pula yaitu :

a. Kerukunan intern ummat beragama
b. Kerukunan antar ummat beragama
c. Kerukunan ummat beragama dengan Pemerintah

Semboyan pelaksanaan telah dikumandangkan pula dengan kata-kata : agree in disagreement. Semboyan ini merupakan suatu yang sangat indah dan tinggi nilainnya, karena merupakan falsafah "Bhineka Tunggal Ika".

Dengan kemerdekaan, bangsa Indonesia telah dapat lebih meningkatkan persatuan dari rasa kesukuan dan kedaerahan menjadi Nasionalisme Indonesia. Tentu nya bangsa Indonesia akan dapat pula menciptakan kerukunan antar ummat berbagai agama yang ada di Indonesia.

Dikemukakan dalam Penataran P4 untuk pemuka-pemuka Agama se Indonesia tanggal 25 Juni s/d 6 Juli 1979 di Hotel Syahid Jakarta.

Tentang perlunya kerukunan tak perlu dipanjang lebarkan penguraiannya, karena yang paling perlu adalah menelaah :

a. Sejarah kerukunan sebagai sifat bangsa Indonesia
b. Apa penyebab perpecahan dan perselisihan agama
c. Bagaimana cara mengatasinya.

Dengan membahasnya dari ketiga persoalan ini tentunya dapat diharapkan upaya dan adanya cara-cara yang diinginkan oleh bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan P4 yang telah disepakati untuk dilaksanakan oleh setiap warga negara Republik Indonesia, merukunkan ummat beragama.

Tulisan ini sekedar memberikan partisipasi ke arah penciptaan kerukunan ummat beragama dan dengan tercapainya kerukunan antara ummat beragama akan lebih tercapai persatuan bangsa lahir dan bathin. Akan tercapailah stabilitas nasional, dan dapat diwujudkan pelaksanaan pembangunan nasional tanpa gangguan-gangguan.

Sejarah membuktikan kerukunan antar umat beragama dan Hidup Rukun adalah ciri-ciri khas Bangsa Indonesia.

Pada dasarnya, kerukunan sudah menjadi pola hidup bangsa Indonesia. Mereka telah terikat kepada kelompok suku yang biasa memelihara kekeluargaan. Sebelum agama-agama dari luar datang ke Indonesia, kepercayaan animisme dan dinamisme merupakan anutan kelompok-kelompok suku bangsa Indonesia dengan pelaksana-annya secara bersama-sama (kolektip-komunal) terhadap segala masalah termasuk agama.

Kedatangan agama Hindu dan Budha ke Indonesia dalam keadaan damai dan diterima dengan baik, kemungkinannya adalah karena kedua agama ini lebih baik daripada yang lama (menurut orang pada waktu itu). Masyarakat melihat sesuatu yang baru itu sebagai yang lebih baik.

Masuknya Islam ke Indonesia pun dengan damai, karena dibawa dan dicontohkan terutama oleh para saudagar yang cara-cara ibadah dan kehidupannya lebih tinggi dari yang telah ada, Hindu dan Budha.

Masih perlu penyelidikan yang lebih saksama tentang masuknya agama Nasrani ke Indonesia, namun yang lebih menonjol adalah berkembangnya agama Nasrani pada zaman penjajahan dengan membuka pintu bagi missionaris atau zandeling-en Asing ke Indonesia yang telah menjadi sebab pula terjadinya dua agama Nasrani di Indonesia yaitu Roma Katholik dan Protestan, sehingga mereka dapat dua direktorat dalam Departemen Agama, masuknya agama Nasrani inipun diterima oleh bangsa Indonesia, terutama di daerah-daerah yang animis.

Penduduk yang telah memeluk suatu agama, terutama Islamyang sangat kuat memegang aqidahnya, sulit untuk menjadi sasaran penyebaran agama Nasrani. Masuknya ke Maluku, Minahasa adalah pada zaman VOC, tetapi masuknya ke Tapanuli disebarkan kepada penduduk yang masih animis. Demikian pula ke tanah Toraja, dan Kalimantan.

Sistim Sinkretisme digunakan dalam usaha memasukkan agama telah menyebabkan agama berjalan dengan damai.

Ketidak sukaan rakyat kepada Nasrani pada zaman dahulu adalah karena Nasrani membawa sistim Barat, sehingga Nasrani diidentikkan oleh rakyat yang sudah beragama dengan "agama penjajah", sedangkan Islam menyebar dengan mudah dalam waktu yang relatif sama.

Toleransi kehidupan beragama (rukun) telah terbukti dengan berdirinya Mesjid dan Gereja secara berdekatan seperti di Tapanuli dan di Ambon.

Penghargaan terhadap perbedaan agama tetap ada, dimana sebagai contoh dapat dibuktikan : Di Tapanuli pesta keluarga Nasrani, menyembelih ayam dan kambing serta memasaknya malahan diselenggarakan oleh keluarga yang Islam dan toleransi itu demikian tinggi sehingga : babi dan anjing yang merupakan pantangan besar ummat Islam tidak dipotong pada pestanya keluarga Nasrani itu.

Rumah-rumah keluarga Nasrani menyediakan sajadah bagi keluarga-keluarga yang ingin sembahyang di rumahnya, dan mereka sama kunjung mengunjung waktu Hari Raya dan Tahun Baru.

Kitapun pernahmendengar tentang gotong royong mendirikan rumah ibadah baik mesjid atau gereja oleh keluarga Muslim dan Nasrani itu.

Kalau sementara ada yang berpendapat bahwa di zaman penjajahan Belanda dan Jepang dahulu tidak terdapat pertentangan agama yang berarti hingga menimbulkan keresahan tentu saja ada benarnya.

Karena babi hutan menjadi musuh bersama dalam pertanian baik yang Islam maupun yang Nasrani bersama-sama memburunya, tetapi tidak pula harus lantas bersama-sama memakannya.

Gotong royong memperbaiki saluran air, membuka hutan dan lain sebagainya terlaksana dengan baik, setelah Merdeka dengan sedih kita mendengar ada pembakaran gereja dan pengrusakan mesjid. Kelestarian hubungan antar ummat Agama menjadi rusak akhirnya menimbulkan keresahan dan permusuhan bathin. Kadang-kadang ia muncul berbentuk tindakan-tindakan merusak dan apabila lebih lama rasa permusuhan ini terpendam (membara seperti api dalam sekam) akan merupakan bom waktu perpecahan bangsa. Memang perlu dikaji apa sebabnya terjadi ketegangan-ketegangan dan keresahan itu.

Penyebab keresahan dan ketidak rukunan

Beberapa peristiwa telah pernah terjadi di dalam masyarakat, yaitu pertentangan ummat beragama. Pembakaran Gereja dan Mesjid, ketegangan sosial dan keresahan.

Apakah agama-agama yang ada di Indonesia seperti Islam, Nasrani, Hindu dan Budha mengajarkan pertentangan terhadap agama lainnya, tentu semua orang akan menjawab : tidak.

Kalau begitu apakah yang menjadi penyebab dari konflik-konflik agama di Indonesia ?

Dengan mengetahui penyebabnya, akan dapat ditentukan cara-cara mengatasinya. Bila fihak Islam yang ditanya, maka jawabannya adalah lebih kurang bahwa fihak Islam merasa kurang mendapat perlindungan dari Pemerintah mengenai kepentingan-kepentingannya (yang menyangkut keagamaan) terhadap gangguan gangguan dari agama lain. Fihak Islam merasa terancam kepentingan agamanya dengan usaha-usaha Nasranisasi di Indonesia, perbuatan mana dilaksanakan dengan :

a. Mengajarkan agama Nasrani di kalangan murid-murid yang beragama Islam

di sekolah-sekolah Nasrani, mengedarkan Injil di sekolah Negeri kepada murid-murid yang beragama Islam.

b. Keharusan menanda tangani formulir (bahwa si orang tua murid yang beragama Islam) menyetujui anaknya diberikan pelajaran agama Nasrani, merupakan taktik, dan bagi orangtua yang lemah iman akan menyetujuinya, demi menyekolahkan anaknya.
c. Dengan sengaja mendirikan gereja-gereja, rumah sakit di tengah-tengah kampung-kampung Islam dengan segala tipu muslihat. Merawat orang Islam di rumah sakit Nasrani, biayanya tidak usah dibayar asal mau masuk Nasrani
d. Pembagian sedekah-sedekah kepada fakir-fakir miskin beragama Islam, termasuk pesta gelandangan dengan maksud pemurtadan.
e. Bahkan menampung ex Inrehab (G 30 S), merawatnya dengan thema : kemanusiaan tetapi dengan maksud pemurtadan.
f. Mendatangi rumah-rumah kaum Muslimin berkedok jual buku kesehatan dan sebagainya, tetapi dengan maksud permurtadan.
g. Dengan segala tipu muslihat membonceng pada projek transmigrasi dalam usaha peng Nasrani-an.
h. Anjuran terhadap pemuda-pemuda Nasrani mengawini gadis-gadis Islam.
i. Dan lain-lain yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Hal ini telah memperkuat dugaan ummat Islam tentang berita dari Musyawarah Nasrani di Malang (Jawa Timur) bahwa ada rencana Nasranisasi Indonesia dalam waktu 50 tahun, dan pulau Jawa 25 tahun.

Di Sumatera Utara terdapat keputusan Gereja bahwa seorang Nasrani yang pindah ke agama Islam tidak dicoret namanya dari gereja, berarti tetap anggota jemaat gereja walaupun telah beragama Islam.

Pengaduan-pengaduan ummat Islam tidak begitu ditanggapi oleh pejabat-pejabat yang harus mengurusinya, bahkan seperti peristiwa Baptis (R.S. Immanuel) Bukittinggi, beberapa pemuda Islam telah ditahan dan diperlakukan berlawanan hukum karena dituduh menyebarkan pamflet menentang pendirian rumah sakit tersebut.

Kurang tanggap dari para pejabat itu, menyebabkan akhirnya para muballigh dan khatib akan menyampaikannya dalam forum Jum'at dan Majelis-majelis Ta'lim dengan nada keras dan dapat pula dianggap sebagai bermusuhan.

Yang umum menjadi pembicaraan sehari-hari dan dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam ialah mengatakan bahwa "agama itu sama saja".

Kata-kata "toleransi agama" digunakan untuk mencapai tambahan pengikut, sedangkan fihak Islam ingin mempertahankan jumlah pengikutnya yaitu mereka yang telah mengucapkan kalimah syahadat jangan hendaknya dimurtadkan oleh siapapun.

Pemimpin-pemimpin Islam menyadari segala kekurangan-kekurangan pada pemeluk agama Islam terutama di bidang materi, dan pemahaman akan agama sendiri, tetapi pemimpin-pemimpin Islam itu berkeinginan agar ummat yang seperti itu tidak menjadi sasaran penyiaran oleh agama lain. Ummat yang miskin dan bodoh itu adalah akibat kolonialisme Belanda dulu. Sebaliknya fihak Islam tidak offensif dalam penyiaran agamanya. Lebih banyak mereka berceramah kepada lingkungan sendiri. Apabila ada missi Islam hanya tertuju kepada suku terasing

yang masih animis.

Pengorganisasian penyiaran oleh fihak Islam yang tertuju kepada mereka yang sudah memeluk suatu agama tidak ada. Masuknya pemeluk agama lain ke dalam Islam umumnya karena kesadaran sendiri, karena perkawinan, kegembiraan mendapatkan mualaf baru, menimbulkan keprihatinan terhadap tanggung jawab membina iman mereka agar menjadi muslim yang baik. Dan mereka menambah jumlah pemeluk yang masih lemah.

Keresahan juga timbul dari fihak pejabat sendiri : mereka melarang muballigh untuk mempergunakan ayat-ayat suci yang dianggapnya sebagai menimbulkan ketegangan-ketegangan.

Fihak Islam menyadari ada kekurangan pada khatib dan muballighnya, tetapi pelarangan penggunaan ayat seperti tadi itu tentunya tidaklah relevan.

Kemajuan tehnologi di bidang audio (dengan adanya pengeras suara) telah pula menimbulkan problema baru. Semangat dakwah demikian meningkat dan pemasangan pengeras suara di puncak-puncak menara mengumandangkan ayat-ayat dan ceramah-ceramah kadang-kadang memang kurang tepat dan diprotes oleh ummat Islam sendiri.

Tetapi upaya untuk penertibannya sudah diadakan dengan peraturan Menteri Agama. Inilah sekedar bermacam-macam penyebab keresahan dan ketidak rukunan. Masalahnya tidaklah fundamental, tentunya harus dapat diatasi dan diselesaikan, agar tercipta kerukunan antar pemeluk Agama dalam orde pembangunan ini.

Usaha-usaha Pemerintah untuk menciptakan kerukunan Hidup Beragama.

1. Betapa pentingnya masalah kerukunan antar Ummat Beragama di Indonesia, terutama setelah Orde Baru terbukti ada usaha dari Pejabat Presiden R.I. Jenjeral Soeharto mengadakan Musyawarah Antar Pemuka Agama di Indonesia pada tahun 1967.

Suatu kode etik penyiaran agama ingin disepakati. Sasaran penyiaran agama hendaknya hanya ditujukan kepada mereka yang belum menganut suatu agama dan mereka yang sudah memeluk agama jangan dijadikan obyek penyiaran agama.

Pejabat Presiden Soeharto pada pembukaan Musyawarah tanggal 30 Nipember 1967 itu berkata : "Pemerintah wajib merasa prihatin apabila penyebaran Agama itu semata-mata ditujukan untuk memperbanyak pengikut, lebih-lebih apabila penyebarannya menimbulkan kesan bagi masyarakat pemeluk-agama yang lain, seolah-olah ditujukan kepada orang-orang yang telah memeluk agama tersebut".

Fihak Islam dapat menerima rancangan keputusan yang telah dipersiapkan oleh Menteri Agama (Alm.KHA.Dachlan) Pejabat Presiden sampai jam 10 malam masih menunggu kesepakatan tersebut untuk ditanda tangani. Tetapi fihak Nasrani tidak dapat menerima rancangan tersebut dengan alasan bahwa kitab suci kaum Nasrani memerintahkan untuk pergi keseluruh penjuru bumi dan menyampaikan perintah Allah kepada setiap manusia;

Betapa tegangnya suasana pada waktu itu dapat digambarkan dari ucapan fihak Islam : Kalau fihak Nasrani mengatakan bahwa menyebarkan agama baginya adalah mission sacre dan kalau mati karenanya akan menjadi "martyr" fihak Islampun demikian; mereka menganggap bahwa penyebaran aga-

ma Islam adalah tugas suci dan mereka vang mati akan dinamakan mati "syahid". Dan lantas bagaimana apakah kita berlomba-lomba menjadi martyr dan mati syahid atau bagaimana untuk tidak terjadi yang demikian itu hendaknya ada satu aturan permainan.
Pertemuan tersebut berakhir dengan kegagalan, walaupun ada dikeluarkan suatu statement bahwa musyawarah tersebut telah berlangsung dengan baik. Tahun demi tahun berlalu fihak Nasrani tetap melaksanakan kegiatan penyebaran agamanya kepada fihak Islam.

2. Menteri Agama H.A. Mukti Ali pada perayaan Natal tanggal 21 Desember 1972 di Jakarta mengatakan : "Jangan sampai orang berusaha supaya orang lain yang sudah memeluk agama meninggalkan agamanya untuk memeluk agama yang ia peluk dengan penindasan atau daya tarik ekonomi dan kebudayaan. Adalah terutama tidak patut untuk mengexploitir kelemahan orang-orang vang tidak berpendidikan, orang sakit dan anak-anak muda.
3. Pada tgl 28 Oktober '74 di Banda Aceh dalam suatu Seminar tentang Peranan Pemimpin-pemimpin Agama dalam Pembangunan Nasional Prasaran Menhankam Pangab Jenderal M. Panggabean antara lain berbunyi sebagai berikut: "Peningkatan Kerukunan Hidup Beragama dan berjiwa tenggang menenggang Ummat beragama yang tinggi antara pemeluk agama yang berlainan dengan memperhatikan faktor-faktor di bawah ini :
   a. Jangan sampai orang berusaha supaya orang lain yang sudah memeluk agama yang ia peluk, dengan penindasan atau daya tarik ekonomi dan kebudayaan.
   b. Menjauhi polemik untuk lebih meningkatkan hubungan antara kelompok-kelompok.
   c. Saling memahami kepercayaan satu sama lain.
4. Kaskopkamtib Laksamana Sudomo tanggal 20 Desember 1975 di Pondok Pesantren Darussalam Banyuwangi Jawa Timur menyatakan
"Tidak membenarkan adanya usaha golongan agama tertentu yang berusaha mempengaruhi orang-orang atau warga masyarakat yang telah menganut suatu agama dengan cara mendatangi rumah-rumah penduduk dan memberikan janji-janji, selain itu tidak dibenarkan pula cara menghasut atau menjelek-jelekkan agama lain, karena cara yang demikian selain tidak sesuai dengan ajaran agama, dapat juga menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang dapat merugikan Ketahanan Nasional.
5. Sewaktu dibentuk Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975, Presiden RI Jenderal Soeharto mengharapkan sekali agar Majelis Ulama Indonesia dapat mempelopori usaha kearah kerukunan itu dengan membentuk semacam Badan Konsultasi Antar Umat Beragama.
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam sidang Paripurnanya pada tanggal 15 Pebruari 1975 di Jakarta memutuskan bahwa pada prinsipnya dapat menerima diadakannya suatu "Forum Konsultasi Antar Ummat Beragama" yang dipimpin oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama. Tidak perlu Badan yang permanen, dan terserah untuk mengadakan forum tersebut sewaktu-waktu Pemerintah menganggap perlu.
Pendirian Majelis Ulama Indonesia itu didasarkan kepada kenyataan bahwa

fihak Nasrani masih saja giat dengan usaha mereka memurtadkan Ummat Islam, dan Badan tersebut apa bila ada akan lebih banyak disalah gunakan kepada pemeluk Islam yang masih rendah tingkatan pengetahuan dan ekonominya.

6. Setelah Kabinet Pembangunan III dibentuk dan Menteri Agamanya adalah H. Alamsyah Ratu Perwiranegara, maka lebih intensif diusahakan untuk menjamin kerukunan itu. Menteri Agama telah berbicara dengan pemuka dari lima agama yang diakui resmi oleh Pemerintah, untuk mengadakan penjajagan membentuk suatu Musyawarah Antar Ummat Beragama.
Trilogi kerukunan dikumandangkan SK. 70 dan 77 tahun 1978 dikeluarkan oleh Menteri Agama, Ummat Islam menerima, Hindu dan Budha menerima juga. Fihak Nasrani mula-mula menolak dengan menimbulkan polemik di Pers. Akhirnya dikeluarkan SKB. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1/1979. Mula-mula fihak MAWI-DGI minta waktu untuk konsultasi menentukan sikap. Islam, Hindu dan Budha menerima. Akhirnya karena SK tersebut telah dinyatakan berlaku, fihak MAWI-DGI menerima.
Demikian usaha-usaha Pemerintah untuk mengajak seluruh Ummat beragama hidup rukun dan damai demi suksesnya pembangunan Nasional.

Cara-cara nyata menciptakan Kerukunan Antar Ummat Beragama

1. Setiap agama diperintahkan untuk disebar luaskan kepada setiap manusia yang telah menjadi ketentuan ajaran agama masing-masing. Demi kerukunan Ummat beragama di Indonesia masing-masing agama hendaknya tidak agressif terhadap agama lainnya dalam penyiaran agama, kiranya kerukunan itu akan dapat tercapai. Memang disini terdapat suatu dilemma, yaitu antara "mission sacre" dengan keperluan hidup rukun. Setiap agama tentunya tidak ingin memaksakan agamanya kepada orang lain, dengan demikian seyogyanya penyiaran agama dilaksanakan dengan cara-cara yang berkeadaban.
2. Suatu "aturan permainan" mengurusi agama-agama yang ada di Indonesia hendaknya lebih diutamakan kepada ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mempunyai sanksi hukum terhadap para pelanggarnya. Termasuk didalamnya syarat-syarat agama, untuk tidak mudahnya muncul agama-agama baru di Indonesia.
3. Kepercayaan lama yang biasa disebut animisme, karena tidak cocok lagi dengan kepentingan kehidupan beragama diusahakan agar memeluk suatu agama resmi yang diakui di Indonesia dan dapat diajdikan sasaran penyiaran agama.
4. Segala fihak mematuhi SK. Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri No. 01/Ber/MDN-MAG/1969 tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan agama dan ibadat oleh pemeluk-pemeluknya. Terutama bahwa pendirian rumah ibadat perlu mendapat izin Kepala Daerah atau Pejabat Pemerintah dibawahnya yang dikuasakan untuk itu.
5. Segala fihak mematuhi SK. Menteri Agama No. 70 tahun 1978 tentang pedoman penyiaran agama antara lain bahwa penyebaran agama tidak dibenarkan untuk :
   a. Ditujukan terhadap orang dan atau orang-orang yang telah memeluk suatu

agama lain.

b. Dilakukan dengan menggunakan bujukan/pemberian materil.
c. Dilakukan dengan cara penyebaran pamplet, bulletin, majalah, buku-buku dan sebagainya di daerah-daerah/dirumah-rumah kediaman Ummat/orang yang beragama lain.
d. Dilakukan dengan cara-cara masuk keluar dari rumah kerumah orang yang telah memeluk agama lain dengan dalihapapun.

6. Segala fihak mematuhi SK. Menteri Agama No. 77 tahun 1978 tentang bantuan Luar Negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia, yaitu dengan kewajiban melaporkannya kepada Pemerintah untuk mendapat persetujuan/rekomendasi dan melalui Menteri Agama.
7. SKB. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1/1979 tentang kewajiban aparatur Departemen Dalam Negeri (Gubernur, Bupati, Camat) untuk melaksanakan pengawasan SK 70 dan 77 tahun 1978.

Walaupun sanksi hukum terhadap pelanggaran SK-SK itu belum begitu jelas, namun dengan pengawasan dari aparatur Pemerintahan, setidak-tidaknya tindakan pencegahan telah dapat dilaksanakan, sebelum pelanggaran terjadi.

8. Khusus untuk kalangan yang beragama Islam Menteri Agama telah mengeluarkan beberapa Keputusan, Instruksi dan Edaran yang harus dipatuhi yaitu :
   a. Keputusan Menteri Agama No. 44 tahun 1978 tentang pelaksanaan Da'wah Agama dan Kuliah Subuh melalui Radio, yang intinya bahwa pelaksanaan dakwah agama dan kuliah subuh melalui radio tidak memerlukan izin terlebih dahulu dengan ketentuan bahwa : dakwah dan kuliah subuh itu tidak mengganggu stabilitas nasional; tidak mengganggu jalannya pembangunan nasional; dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD '45.
   b. Instruksi Menteri Agama No. 9 tahun 1978 tentang pelaksanaan dakwah Agama dan kuliah subuh melalui radio, yang merupakan instruksi pelaksanaan dari SK No. 44 tahun 1978.
   c. Surat Edaran Menteri Agama No. 3 tahun 1978 tentang Dakwah dan Kuliah Subuh yang telah mengatur secara terperinci SK 44 tahun 1978 itu.

Usaha-usaha untuk mencapai kerukunan yang tuntas.

Yang menjadi penyebab ketegangan dan keresahan tiada lain hanya ekses belaka, sedangkan masalah yang sebenarnya ialah maukah pemuka-pemuka agama di Indonesia hidup rukun, dan tidak hanya bersembunyi dibalik tabir kerukunan semu ?

Bukankah yang kita perlukan adalah kerukunan yang benar-benar rukun. Kerukunan yang tuntas ialah apabila segala permasalahan dapat diselesaikan dalam dialog secara terbuka untuk saling mengemukakan pendapat dengan menengah yang adil. Penengah itu adalah Pemerintah.

Oleh karenanya suatu forum dialog antara pemimpin Ummat beragama di Indonesia dapat diadakan oleh Pemerintah sewaktu-waktu diperlukan. Dalam forum dialog itulah dapat masing-masing mengemukakan pendapatnya, melaporkan pertentangan-pertentangan dan keberatan dengan tujuan untuk tidak saling curiga dan saling menuduh.

Masalah Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Masalah Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan masalah agama, karena sidang umum MPR telah menetapkan dalam GBHN bahwa Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan agama.

Karena mereka "nyata ada" maka hubungan dengan mereka tentunya perlu juga rukun, tetapi tidak didasarkan kepada kerukunan kehidupan beragama.

Selama Pemerintah melaksanakan keputusan rakyat (MPR) tentang kepercayaan tersebut, maka tidak akan menimbulkan persoalan. Tetapi kalau mereka tetap berusaha untuk membentuk suatu agama baru sebagai mana mereka tetap menginginkan upacara kubur sendiri, perkawinan sendiri dan sumpah sendiri, tentu akan ada reaksi. Keberatan Ummat Islam terhadap golongan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini ialah bahwa merekapun memurtadkan pemeluk agama Islam yang mereka katakan abangan, kejawen, dan kebatinan dan lain-lain.

Penutup/Kesimpulan

Dengan memahami secara sungguh-sungguh kepribadian bangsa Indonesia yang didasari oleh Pancasila dan UUD 1945, dan setelah mendalami P4 serta GBHN 1978, dapatlah diambil kesimpulan mengenai masalah kerukunan antara lain sebagai berikut :

1. Menurut sejarah faktanya yang ada hingga sekarang ini ternyata kepribadian bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika itu sudah terbiasa hidup rukun dan ingin tetap memelihara kerukunan hidup.
2. Faktor agamapun nampaknya tidak boleh dan jangan menjadi penyebab pemisah kerukunan itu, baik karena faktor kekeluargaan maupun kesamaan sejarah dan daerah masih kuat mengalir dalam tubuh setiap orang Indonesia.
3. Masuknya agama-agama ke Indonesia tidak dengan kekerasan dan biasanya diterima dengan kesadaran atau oleh karena ajakan dari para pemimpin.
4. Setelah kemerdekaan ternyata timbul pertentangan-pertentangan Agama yang kadang-kadang berakibat merusak rumah rumah ibadah, dan yang lebih memprihatinkan ialah timbulnya curiga mencurigai dan dendam dihati.
5. Pertentangan ini terdapat terutama antara Ummat Islam dengan Nasrani, karena adanya kegiatan-kegiatan yang menonjol dari fihak Nasrani berusaha menarik fihak Islam kedalam agama Nasrani dengan bermacam cara.
6. Sejak adanya pertentangan-pertentangan agama yang mengakibatkan retaknya kerukunan antara Ummat beragama, Pemerintah telah mengadakan usaha-usaha untuk mengatasinya, dan terakhir dengan timbulnya SK-SK yang diperlukan untuk menstabilkan kerukunan.
7. Kerukunan akan dapat tercapai apabila semua fihak mau mentaati "spel regels" atau aturan permainan yang telah dikeluarkan Pemerintah itu dengan sungguh-sungguh dengan ikhlas hati, masing-masing fihak menahan diri demi kepentingan nasional.
8. Usaha untuk mengatasi konflik-konflik sosial yang timbul dalam kehidupan beragama ini dapat diselesaikan secara terbuka dan tuntas dalam suatu forum konsultasi atau dialog yang dipimpin oleh Pemerintah pada waktu tertentu, atau dapat juga periodik.
9. Apabila telah kelihatan itikad baik dari semua fihak agama mentaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan Pemerintah yang mengatur kerukunan tersebut, dapatlah untuk lebih ditingkatkan kepada usaha-usaha bersama dibidang

(bersambung hal.79)

Tune in Islam Dalam Lembaga Dan Kehidupan Masyarakat Pancasila

Oleh Drs. H. Husein Segaf MA

I. Pendahuluan

Dalam Pembukaan Simposium Pokok-Pokok Pikiran Tentang Implementasi Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila, yang diadakan di Surabaya pada tanggal 9 Januari 1979, Menteri Agama H. Alamsyah Ratuperwiranegara mengemukakan tentang perlunya disadari dan dihayati pandangan kenegaraan Pemimpin-pemimpin Indonesia menjelang Proklamasi Kemerdekaan. Dalam sambutan tersebut H. Alamsyah Ratuperwiranegara mengemukakan sebagai berikut : **"Momentum sejarah menyebabkan para pemimpin Indonesia dewasa itu dapat melepaskan kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok/golongan serta mampu melihat dengan kejernihan pandangan untuk menjunjung tinggi idealisme kemerdekaan dan demi untuk persatuan dan kesatuan bangsa".**

Namun demikian dalam proses Sejarah, Pancasila yang telah membuktikan sebagai wadah yang dapat menyatukan bangsa ini, di mana kita semua diikat dengan kesadaran sebagai satu bangsa, satu bahasa, satu negara, satu pemerintahan dan satu idologi, ini, telah **dinodai oleh adanya usaha-usaha untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.** Usaha semacam ini telah menimbulkan gejala-gejala negatif yang oleh Menteri Agama dalam simposium tersebut dimintakan perhatian kita bersama, yaitu :

a. **Menimbulkan kesan bahwa ada sesuatu golongan agama yang anti Pancasila, sehingga mendorong/memancing reaksi Pemerintah dengan Aparatnya dan golongan lain untuk mencurigai golongan tersebut, sedang golongan yang ber sangkutan tidak mengetahui kalau dicurigai.**
b. **Ke dalam golongan agama itu diusahakan untuk anti Pancasila.**
c. **Menimbulkan kesan, seolah-olah ada satu kelompok yang paling Pancasilais".**

Umat Islam adalah golongan terbesar yang merupakan mayoritas bangsa. Oleh karena itu Umat Islam sebagaimana kita ketahui **banyak mengalami akibat** dari gejala-gejala tersebut. Bahkan perlu diakui bahwa sadar ataupun tidak masyarakat kita telah **termakan oleh kesan-kesan tersebut di atas.** Sehingga banyak diantara kita yang malu-malu atau berat hati menyebut Pancasila sebagaimana per-

*) Disampaikan pada Rapat Kerja Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tentang Pembinaan Pendidikan dan Pengurusan Agama Islam di Indonesia tgl. 19—25 Feb. 1979 di Cibogo.

nah disinyalir oleh Menteri Agama, meskipun pada hakekatnya kalau dikaji lebih seksama lebih Pancasilais dari pada mereka yang menjadikan Pancasila sekedar lip service.

Dengan demikian mungkin dapat diambil kesimpulan bahwa usaha-usaha memecah belah kesatuan bangsa dengan menimbulkan kesan-kesan yang mendiskriditkan umat ini telah berhasil melembagakan kesan dan image yang negatif tersebut dalam masyarakat. Oleh karena itu maka persoalan kita tidak saja pada kewajiban **menghilangkan gejala-gejala tersebut di atas dalam masyarakat, sehingga tidak lagi terdapat kesan yang memisahkan antara golongan Islam yang terbesar ini dengan Pancasila sebagai landasan dan dasar negara serta pandangan hidup Bangsa Indonesia, melainkan juga, bahkan yang lebih penting adalah mengembalikan keadaan pada proporsi yang sebenarnya, sehingga Pancasila benar-benar menjadi milik seluruh rakyat Indonesia yang dihayati dan diamalkan secara konsekwen.**

Mungkin persoalan inilah yang dimaksud dengan judul "Tune In Islam Dalam Lembaga Dan Kehidupan Masyarakat Pancasila". Sudah barang tentu persoalan besar ini tidak akan dapat kami selesaikan dengan serba keterbatasan yang ada pada diri kami. Namun demikian kami yakin forum ini akan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi langkah-langkah selanjutnya dari suatu proses **eliminasi "image" terhadap umat Islam yang sudah berkembang selama ini.** Suatu proses yang tidak saja menghendaki usaha-usaha ke luar, melainkan juga kegiatan-kegiatan ke dalam yang meminta penyelesaian yang lebih bersifat konsepsional, di mana secara sistimatis pelembagaan kesan dan "image" yang merugikan ini dapat dihilangkan, sehingga terdapat keharmonisan antara gerak umat sebagai bagian terbesar Bangsa dengan Pancasila sebagai pandangan hidupnya.

Mungkin untuk ini persoalan besar ini dihadapkan kepada para Rektor IAIN, karena dari IAIN inilah diharapkan timbulnya konsepsi-konsepsi tentang berbagai masalah sebagai "braintrust" umat Islam Indonesia, sebagaimana diharapkan oleh Menteri Agama.

Dari yang tampak di permukaan, persoalan ini memang dibuat oleh golongan golongan **tertentu yang tidak suka terhadap keterlibatan umat mengisi kemerdekaan tapi dibalik faktor-faktor luar ini juga terdapat keadaan obyektif umat yang belum dapat mengefektifkan ajaran-ajaran Islam sehingga "in tune" dengan tuntutan konfigurasi sosial budaya Indonesia. Menurut hemat kami, selama aplikasi ajaran-ajaran Islam belum terhubungkan dengan cita-cita bangsa dalam mewujudkan masyarakat Pancasila, maka selama itu akan terdapat dalih yang dapat mereka gunakan untuk mendiskriditkan Islam.**

Meskipun di tengah-tengah kita sekarang telah ada tulisan atau buku-buku yang menyuguhkan relevansi ajaran-ajaran Islam dengan Pancasila, tapi selama sumbangsih umat pada semua lembaga dan kehidupan masyarakat dalam mempraktekkan jiwa agama belum terlihat, maka selama itu buku-buku tersebut belum banyak artinya. Memang masyarakat Pancasila itu sendiri belum terwujud, tapi keterlibatan ummat, "sense of belonging" dan "sense of responsibility" dalam mewujudkan cita-cita nasional ini adalah suatu imperatif. Sumbangsih ini tentunya tidak dapat kita laksanakan "at random" begitu saja menurut kemauan kita, lepas dari setting sosial dan kontek historis bangsa dan negara yang berkem-

bang dinamis, melainkan berdasarkan suatu konsepsi yang lebih seksama menyatakan berbagai faktor yang dapat memperlihatkan identitas dan kepribadian Bangsa yang ber Pancasila.

Mungkin telah banyak konsepsi-konsepsi tentang pelaksanaan ajaran-Islam di tengah-tengah kita, tapi konsepsi yang benar-benar berpijak pada kenyataan sosial kondisi Indonesia rasanya masih sangat terbatas. Uraian ini sudah barang tentu tidak akan memasuki konsepsi-konsepsi tersebut, melainkan sekedar mencoba untuk mengemukakan pendekatan yang menurut hemat kami dapat dipergunakan untuk membuat konsepsi-konsepsi yang tidak terlepas dari setting sosial dan kontak historis bangsa dan negara Indonesia.

Pendekatan ini adalah spesifik sosiologis, dengan menggunakan konsep Karl Mannheim tentang kesadaran sosial (Sosial awareness). Dalam bukunya "Diagnoses of Our Time", beliau kemukakan bahwa yang dimaksud dengan kesadaran sosial adalah :

> "The readiness to see the whole situation in which one finds oneself and not only to orientate one's action on immadiate task and purposes, but to base them on a more comprehensive vision".
>
> "Keadaan siap sedia, untuk melihat seluruh situasi, di mana seseorang berada, tidak saja untuk mengorientasikan tindakan-tindakan pada tugas-tugas dan tujuan-tujuan langsung (jangka pendek), tapi juga untuk mendasarkan tindakan-tindakan itu pada pandangan yang lebih luas."

II. Kesadaran sosial dalam pelaksanaan ajaran-ajaran Islam

Agama Islam sebagaimana kita yakini adalah agama yang terakhir sebagai rahmat bagi umat manusia seluruhnya. Oleh karena itu Al Qur'an sebagai azasnya yang pertama, adalah wahyu Allah yang telah disampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai hidayah yang lengkap meliputi segala aspek hidup dan kehidupan manusia, untuk kepentinganmanusia itu sendiri. secara universal.

Hidayah-hidayah yang lengkap dan universal itu adalah ciri khas Islam, karena agama Islam adalah agama fitrah, agama yang sesuai dengan kodrat manusia yaitu makhluk yang disamping mempunyai kedirian tidak terlepas dari kehidupan bersama, suatu makhluk yang disamping kehidupan rohaninya tidak terlepas dari dunia materi. Interdependensi antara keempat dimensi kehidupan ini, dimensi dimensi individuil, kolektip, materiil dan spirituil adalah kenyataan sosial yang membawa keseragaman disamping perbedaan-perbedaan. Kesemuanya ini mendapat perhatian yang propersional seimbang dalam ajaran-ajaran Islam seperti yang digan jelas dikemukakan oleh Dr. Mahmud Syaltut sebagai beriktu :

شرع الله الاسلام وجعل منه نظاما يكفل سعادة الفرد و الجماعة فى الدنيا والاخرة لم يترك عنصرا من عناصر الخير و الفلاح عناصر الحياة الطيّبة والسعادة الخالدة الا امر به ودعا اليه وحث عليه ولم يترك عنصرا من عناصر الشر والفساد عناصر الحياة الرذيلة والشقاء النقيم الا نهى عنه وحذر عنه و نفر عنه ذلك ان الاسلام

بنى تنظيمه للعالم على الواقع وهو ان الانسان جسم وروح و ان للجسم حظا و متعة وان للروح حظا و متعة و ان للانسان شخصية مستقلة عن بنى جنسه و شخصية بها يكون لبنة فى المجتمع الوطنى والانسانى وان له بكل هاتين الشخصيتين حقوقا وعليه واجبا ولا تتحقق سعادة الانسان الا باستكمال حظى الجسم والروح و تنظيم حقوقه وواجباته فى نفسه ومجتمعه دون افراط ولا تفريط ٠

وكل ماجاء به الاسلام من عقائد وعبادات و تشريعات لا يخرج عن هذه الدائرة دائرة رعاية حظ الجسم و حظ الروح للانسان فى شخصيه و فى مجتمعه ٠

Sementara itu telah kita ketahui bersama bahwa agama Islam adalah agama amal, karena Al Qur'an penuh dengan ayat-ayat yang memerintahkan, mendorong dan memberikan motivasi untuk bergaul, berbuat dan bekerja menggantungkan pahala dan siksa, menghubungkan kekalahan dan kemenangan dengan perbuatan yang dilaksanakan oleh seorang mukallaf. Di samping itu, meskipun di atas telah dinyatakan bahwa Al Qur'an mengandung ajaran ajaran yang lengkap, sama sekali tidak berarti bahwa Al Qur'an itu meliputi segala detail kenyataan dengan cara yang sistimatis dan methodis, karena Al Qur'an bukanlah ilmu. Tapi sebagai hidayah, memang Al Qur'an memiliki kaidah-kaidah umum dan prinsip-prinsip universal dari pada segala sesuatu yang sifatnya fondamental bagi manusia untuk mengetahui dan mengamalkannya dalam mencapai tingkat kehidupan yang lebih sempurna baik moril maupun materiil. "Basic virtues" ini diserahkan pada kaum inteligensia dalam tiap periode sejarah untuk memerincikannya sesuai dengan kebutuhan waktu dan tempat. Dalam hal ini Al Muroghy menjelaskan dalam sambutannya untuk kitab "Al Islam wat Thibbul Hadits" karangan Dr. Abdul Aziz Ismail sebagai berikut :

لستاريد من هذا ان اقول : ان الكتاب الكريم اشتمل على جميع العلوم جملة و تفصيلا بالاسلوب التعليمى المعروف وانما اريد ان اقول : انه اتى باصول عامة لكل مايهم الانسان معرفته و العمل به ليبلغ درجة الكمال جسدا او روحا وترك الباب مفتوحا لاهل الذكر من المشتغلين بالعلوم المختلفة ليبينوا للناس جزئياتها بقدر ما اوتوا منها فى الزمان الذى هم عائشون فيه ٠

Dengan demikian jelaslah bahwa **persoalan kehidupan agama Islam adalah persoalan yang semata-mata di tangan kaum muslimin, dan tergantung pada kemampuan kaum inteligensia umat ini dalam tiap periode sejarah untuk dapat merincikan ajaran-ajaran Islam dalam bentuk konsepsi pelaksanaan, sebagai suatu pandangan hidup Islam yang tersusun sistimatis.** Tapi formulasi rational semata dari prinsip-prinsip ajaran Al Qur'an itu, seperti lazimnya kita lakukan selama ini **tidaklah memadai bahkan bisa menyesatkan.** Karena **deduksi logis** ini hanyalah bersandar pada konsistensi **intelektual** sebagai kriteria kebenaran, sedang image yang kongkrit dari pada konsepsi-konsepsi itu sendiri adalah pada **kenyataan sosial pada pola-pola tingkah laku, motivasi, kepribadian dan konteks sosial yang kongkrit di mana kesemuanya itu terjadi.** Tegasnya untuk penyusunan konsepsi operasional ajaran-ajaran Islam tidaklah dapat dilepaskan dari kondisi dan situasi umat yang hidup dalam satu sistim sosial suatu masyarakat. Oleh karena itu pengertian yang mendalam tentang sistim sosial ini yang secara **struktural dan funsional** menjalin kehidupan umat, perlu mendapat perhatian sepenuhnya. Dengan kata lain konsepsi-konsepsi yang kita perlukan haruslah **mengkomunikasikan keseluruhan kekayaan pengalaman keagamaan dalam masyarakat kita yang jauh lebih komplek dari pada sekedar aspek-aspek rational kehidupan ini.**

Tanpa "frame of reference" sosial ini usaha-usàha tersebut akan lebih berdasar pada "**wishful-thingking**" dari pada realisme sosial. Horizon pemikiran kita yang dibatasi oleh **legalisme dan pandangan romantik telah membawa kita kepada reaplikasi pola-pola lama ke dalam situasi kita, sedang "community spirit"** dari masyarakat Islam di masa yang lalu adalah **relatip tertutup** dibanding dengan kehidupan kita yang terlibat dalam kebudayaan dunia sekarang ini. Kesemuanya ini adalah didorong oleh ketidak mampuan kita melihat kenyataan-kenyataan sosial yang komplek dewasa ini sebagaimana adanya, "wishful-thingking" telah membawa kita sadar ataupun tidak pada formalisme yang menurut Sayid Amir Ali dalam bukunya : "The Spirit of Islam", telah memperbudak diri kita ke dalam alam opportunisme dan amal pura-pura.**

III. Nilai-nilai ajaran Islam dan perubahan Sosial

Apabila kita teliti kandungan Al Qur'an, maka sebagian besar ayat-ayatnya adalah menyangkut persoalan pergaulan hidup. Sejak dari ayat peristiwa sejarah, hukum, norma-norma sosial dan ayat-ayat tentang sunnatullah, kesemuanya adalah tentang manusia dan masyarakatnya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Oleh karena itu bagi **orang yang akan memahami Al Qur'an seperti dikemukakan oleh Rasyid Ridla, haruslah mengetahui phenomena sosiologis, proses pertumbuhan manusia dan masyarakatnya serta sebab-sebab perbedaan sosial yang mereka alami** dalam kekuatan dan kelemahan, kemiskinan dan kekayaan, kepandaian dan kebodohan, kemuliaan dan kehinaan serta keimanan dan kekufurannya.

Demikian pentingnya orientasi **sosiologis** dalam memahami Al Qur'an sehingga Moh. Abduh dalam menafsirkan firman Allah :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ (البقرة ٢١٣)

menyatakan, tidak mungkin seseorang dapat memahami ayat ini kalau ia belum mengetahui tingkah laku manusia, bagaimana mereka berintegrasi dan bagaimana terjadinya desintegrasi. Adakah phenomena ini konstruktif ataukah destruktif, dan apa relevansi diutusnyapara Nabi pada mereka itu. **Tanpa pengertian dan orientasi sosiologis ini pengertian-pengertian kita terhadap ayat-ayat Al Qur'an yang seperti ini hanyalah pengertian-pengertian yang kabur dan tidak kongkrit, seperti** dijelaskan oleh Thantawy dalam menafsirkan firman Allah :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ (الروم ٤١)

Menurut beliau dalam tafsirannya Al Jawahir, Allah SWT sebenarnya telah menurunkan **dua buah kitab, sebuah dituliskan dengan tanganNya dan yang lain disampaikan melalui wahyu. Yang pertama** kita terima dengan **penglihatan kita dan** yang kedua dengan pendengaran kita. Kitab yang dituliskan Allah itu adalah fakta yang nyata dan jelas. Tapi dalam kenyataannya yang jelas itu ia tersembunyi di sisi kita. Adapun Al Qur'an yang diwahyukan, kita mengerti melalui pendengaran kita. Tapi pengertian ini adalah pengertian yang abstrak dan kabur, tidak riel dan tidak kongkrit. Kita dengar Allah berfirman bahwa kerusakan telah memenuhi daratan dan lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Pengertian bahasa dari ayat Al Qur'an ini dapat dimengerti oleh siapun melalui kamus, bahkan seorang Badwi yang buta huruf mengerti artinya. Tapi subtansi dari ayat ini barulah kita pahami secara kongkrit dan riel setelah kita mempelajari kitab yang dituliskan Allah dengan tanganNya, yaitu semua kenyataan-kenyataan dengan berbagai perwujudan dan bentuk-bentuknya.

Maka jelaslah bahwa penghayatan kita terhadap ayat suci Al Qur'an **tidak cukup hanya dengan pengetahuan bahasa semata-mata, dan tidak juga** memadai dengan pengetahuan-pengetahuan kita tentang berbagai cabang ilmu pengetahuan Islam, sebelum kita memiliki pengertian yang mendalam tentang kenyataan-kenyataan sosial, kenyataan-kenyataan yang kita alami dalam pergaulan hidup ini, proses-proses yang terjadi di dalamnya, serta sistim dan struktur sosial yang menyusun dan membentuknya.

Kalau di atas telah dijelaskan bahwa Al Qur'an berisi ajaran yang bersifat **global dan universal, ini tidak berarti bahwa ajaran-ajaran Islam itu adalah prinsip-prinsip yang abstrak yang dapat kita interpretasikan menurut kehendak kita.** Tapi tidak juga sebaliknya bahwa ajaran-ajaran Islam itu kecuali yang menyangkut ritus, urusan ibadah dan akherat adalah berbentuk **"clear cut statements"** dengan pola-pola yang kaku, memiliki validitas yang supra temporal, sehingga tidak ada lagi ruang bergerak bagi kreativitas pikiran. Kesemuanya ini berarti bahwa meskipun **prinsip-prinsip yang global, ajaran-ajaran Islam itu adalah kongkrit dan tidak abstrak karena tidak terjadi dalam kevakuman sosial melainkan diwahyukan dalam "image" yang kongkrit yang terdiri atas keseluruhan konteks historis dan setting sosial dimana wahyu itu terjadi.** Dengan demikian ajaran-ajaran itu pada hakekatnya adalah keseluruhan pengalaman keagamaan yang asli dan merupakan pengalaman-pengalaman dasar, yang oleh Karl Mannheim disebut sebagai **paradigmatic experiences.**

Oleh karena itu **memahami keseluruhan konfigurasi sosial budaya dimana**

wahyu diturunkan adalah mutlak untuk menjadikan pengertian kita terhadap Al Qur'an suatu pengertian yang kongkrit, seperti yang dikemukakan oleh Thantawy Djauhary tersebut di atas. Selama pendekatan kita terhadap ajaran-ajaran Islam belum menggunakan reference gambaran yang asli (original image) seperti yang kita dapatkan dalam paradigmatic experience maka selama itu pula appresiasi kita terhadap substansi ajaran-ajaran Islam ini hanyalah akan menyentuh permukaan dan kulitnya. Suatu phenomena sosial yang telah membawa kita kepada legalisme di satu pihak, dimana semua persoalan hidup ditinjau dari fiqih Islam seperti yang dapat disimpulkan dari kalangan ulama, dan relativisme difihak yang lain seperti yang dapat disimpulkan dari kalangan intelektual kita yang cenderung untuk melihat persoalan-persoalan umat dari kacamata politik semata-mata.

Lebih lanjut pengertian-pengertian yang kita peroleh dari paradigmatic experiences pengalaman-pengalaman keagamaan itu haruslah kita hubungkan dengan kondisi sosio-kultural dimana kita berada sekarang ini.

Dengan kontektualisasi ini kita akan dapat memberikan interpretasi atau reinterpretasi yang tepat dan relevan terhadap suatu ajaran. Dengan demikian interpretasi atau reinterpretasi suatu ajaran disini, bukanlah semata-mata hasil pemikiran yang abstrak yang secara eksklusif bersandar pada dedukasi logis, tapi suatu pemikiran korektif yang dilandasi oleh pengertian-pengertian terhadap kenyataan-kenyataan sosial, kenyataan-kenyataan yang menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kesukaran-kesukaran dalam lingkungan hidup kita, yang sama sekali berbeda dengan lingkungan asal ajaran-ajaran itu.

Kontektualisasi suatu ajaran dari yang kita fahami dalam paradigmotic experience dengan kondisi sosio-kultural kehidupan kita adalah sangat menentukan relevan tidaknya interpretasi kita terhadap ajaran-ajaran itu. Karena suatu interpretasi yang logis telah memperlihatkan sebagai sesuatu yang Islamis, dalam kenyataannya bisa menghasilkan sesuatu yang bertentangan apabila tidak kita uji dalam konteks sosial dimana hasil interpretasi itu akan kita terapkan. Maka hanya mereka yang memiliki kesadaran sosial yang luas dapat melihat bagaimana interpretasi suatu ajaran direfleksikan dalam pengalaman-pengalaman anggota-anggota masyarakat, apa akibat sosial yang ditimbulkan dan bagaimana nilai-nilai riel ajaran-ajaran itu dalam sistim struktur sosial yang bersangkutan.

IV. Penutup

Sebagai penutup perlu kami kemukakan bahwa memang pendekatan ini memiliki implikasinya yang tersendiri sebagaimana setiap langkah memiliki implikasi tersendiri pula. Tapi yang jelas dengan bertahan pada apa yang ada sekarang, umat ini semakin lama semakin tertinggal dan tidak "in tune" dalam dinamika masyarakat yang sedang membangun mewujudkan masyarakat Pancasila. ***

INNA LILLAHI WAINNA ILLAIHI ROJI'UN

Telah berpulang ke rahmatullah : ANWAR H.A. (Agen Majalah Mimbar Ulama di Yogyakarta) Pada tanggal 21 Juli 1979, jam. 20.05 W.I.B.

SEMOGA AMAL IBADAHNYA DITERIMA DISISI ALLAH SWT.

Amin.

Red/T.U. Mimbar Ulama.

Telah Lebih 30 Tahun

DEPARTEMEN AGAMA MENGELOLA PENDIDIKAN AGAMA

Rakyat Telah Menerima Sebagai Suatu Kenyataan Yang Seharusnya.

Oleh Prof. A. Hasjmy

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh agar anda menyampaikan amanah kepada ahlinya, dan apabila anda menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah anda berlaku adil. Sesungguhnya Allah memberi kepada anda pengajaran yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. (Q.S. An Nisa : 58).

Dalam pidatonya waktu upacara peresmian penggunaan gedung baru Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 12 Juni 1979, antara lain Menteri P dan K. Dr. Daoed Joesoef menegaskan bahwa sistem pendidikan nasional haruslah satu dan lembaga yang mengelolanya harus satu pula, yatiu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan kalau pun akan diurus oleh lembaga lain haruslah dengan mendapat delegasi dari Departemen P dan K.

Firman yang tercantum di atas menegaskan bahwa amanah atau sesuatu urusan haruslah diserahkan kepada ahlinya, dan lembaga yang ahli dalam hal pendidikan agama, yaitu Departemen Agama.

Terhadap penegasan Menteri P dan K. Dr. Daoed Joesoef ingin saya hendak memberi tanggapan, karena masalah tersebut adalah sangat penting, tidak saja karena ia masalah pendidikan, tetapi juga karena hal tersebut banyak sekali kaitan dan sangkut-pautnya dengan perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia (terutama Ummat Islam) dan pertumbuhan Republik Indonesia yang kita cintai ini.

Tentang masalah bahwa "sistem pendidikan nasional" haruslah satu, menurut hemat saya kebanyakan Rakyat Indonesia (mungkin semuanya!) akan menyetujuinya, dimana "pendidikan agama" menjadi bahagian yang penting dari sistem pendidikan nasional itu.

Tetapi, mengenai hal bahwa lembaga yang mengelolanya haruslah satu, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menurut pendapat saya tidak harus demikian, dan saya rasa juga sebahagian besar Ummat Islam Indonesia akan sepen-

dapat dengan saya. Kita tidak boleh melupakan faktor sejarah, dimana **Departemen Agama telah lebih dari 30 tahun mengelola lembaga-lembaga pendidikan agama yang berupa madrasah-madrasah, lembaga pendidikan tinggi agama sejak zaman P.T.A.I.N. dan A.D.I.A sampai kepada IAIN**, disamping bertugas pula mengurus pendidikan agama di sekolah-sekolah umum.

Menurut hemat akal yang sehat, bahwa kenyataan ini adalah suatu kenyataan yang telah mendarah daging bagi ummat Islam Indonesia, sehingga tidak mudah mentiadakan begitu saja, kalau tidak ingin mengundang keresahan (mungkin kemarahan!) Ummat Islam yang merupakan mayoritas dari Bangsa Indonesia.

Mudah-mudahan hal dan kenyataan ini disadari benar-benar oleh Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional, yang dalam bulan-bulan ini sudah mulai menerima sumbangan pikiran dan tanggapan dari Masyarakat Bangsa Indonesia.

Dalam hubungan ini, ada baiknya kalau dibawah ini akan saya uraikan sekedarnya tentang pembentukan Departemen Agama dan tugas wewenang serta lapangan usahanya.

Pembentukan Departemen Agama

Untuk memenuhi hasrat sebahagian besar rakyat yang beragama, maka dengan Keputusan Presiden bertanggal 3 Januari 1946 No. 1/sd, keputusan mana antara lain berbunyi : Presiden Republik Indonesia, Mengingat : Memutuskan : **Mengadakan Departemen Agama.**

Dengan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1949 jo No. 8 tahun 1950, telah ditetapkan tugas kewajiban Departemen Agama yang garis besarnya, antara lain : "**Melaksanakan Asas Ketuhanan Yang Maha Esa**" dengan sebaik-baiknya.

Dengan ketentuan itu, teranglah bahwa fungsi Departemen Agama dalam Pemerintah Republik Indonesia ini, merupakan **pendukung** dan **pelaksana utama** daripada asas **Ketuhanan Yang Maha Esa** yang merupakan sila pertama dari falsafah negara Pancasila. Dengan demikian, jelaslah bahwa Departemen Agama adalah satu lembaga negara yang amat penting, yang bertugas **melaksanakan Asas Ketuhanan Yang Maha Esa**, dimana Asas Ketuhanan Yang Maha Esa baru dapat terlaksana dengan baik dengan melalui **jalur pendidikan Agama**, artinya bahwa Departemen Agama harus melaksanakan dan mengelola Pendidikan Agama.

Hal ini menjadi lebih jelas lagi, kalau kita mengenang kembali hal-hal masa lampau yang menyatakan bahwa terbentuknya Departemen Agama adalah untuk memenuhi keinginan dan tuntutan Ummat yang beragama, hal mana dinyatakan dengan resmi dalam suatu sidang pleno Komite Nasional Indonesia (KNIP) yang merupakan Parlemen Indonesia sementara, yang berlangsung di Jakarta sejak tanggal 25 s/d 27 November 1945, yang diadakan dalam salah satu ruangan Fakultas Kedokteran di Salemba. Sidang Pleno tersebut diadakan untuk mendengar keterangan Pemerintah.

Wakil-wakil Komite Nasional Daerah Karesidenan Banyumas yang duduk sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat mengusulkan dalam pemandangan umumnya, antara lain :

> "Supaya dalam Indonesia yang telah merdeka ini janganlah hendaknya urusan urusan Agama hanya diambil-lalukan dalam tugas Departemen Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan atau departemen departemen lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh satu departemen Agama tersendiri".

Usul tersebut mendapat sambutan hangat dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang hadir dalam sidang pleno Komite Nasional Indonesia Pusat waktu itu. Maka tanpa pemungutan suara, ternyata setelah itu Presiden Sukarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta, dimana kemudian Wakil Presidenpun berdirilah dan dengan tegas menyatakan : "Adanya Departemen Agama Tersendiri mendapat perhatian Pemerintah".

Sebagai realisasi daripada janji Pemerintah Nasional yang telah merdeka dan berdaulat itu, alhamdulillah pada tangggal 3 Januari 1946 berdengunglah pengumuman Pemerintah di radio, bahwa untuk memenuhi kehendak dan hasrat Ummat Beragama, maka didirikan Departemen Agama yang berdiri sendiri sejajar dengan departemen departemen lainnya dalam Negara Republik Indonesia, dengan pengangkatan Menteri Agama yang pertama, yaktu KH. Rayidi BA (sekarang Prof. Dr. Haji Rasyidi, seorang ilmiawan Muslim yang sangat terkenal dan berkaliber internasional). Demikian tersebut dalam Agenda Kementerian Agama 1951/1952 halaman 125–127.

Atas dasar ketentuan-ketentuan dan tugas wewenang Departemen Agama, maka Pemrintah melengkapi Departemen Agama denganlembaga-lembaga pelaksana pendidikan :

a. Direktorat Pendidikan Agama Islam
b. Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam.

Lembaga pelaksana pendidikan agama yang demikian pentingnya, terus menerus ditingkatkan kedudukannya, dimana paling akhir Pemerintah telah membentuk dalam Departemen Agama sebuah lembaga yang bertugas mengelola pendidikan agama, yang tarafnya lebih tinggi dari direktorat, yaitu : **Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam** dimana di dalamnya terdapat dua direktorat yang bertugas membina Pendidikan Agama, yaitu :

a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam
b. Direktorat Pembinaan Pendidikan Tinggi Agama Islam

Memang kita melihat kenyataan bahwa Pemerintah Orde Baru dibawah pimpinan Presiden Suharto menaruh perhatian yang sangat besar kepada pelaksanaan Pendidikan Agama, sehingga dibawah Pemerintahnya lembaga-lembaga yang mengelola Pendidikan Agama ditingkatkan kedudukannya menjadi "direktorat jenderal" demikian kedudukan Departemen Agama semakin dikukuhkan. Presiden Suharto kelihatannya betul-betul mengamankan dan membina **Amanat Komite Nasional Indonesia Pusat** dalam sidang plenonya di Jakarta pada tanggal 25 s/d 27 Nopember 1945 dan Keputusan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 3 Januari 1956, seperti yang telah saya sebut di atas.

Amanat Komite Nasional Indonesia Pusat itu, bukan saja diamankan dan dibina terus oleh Presiden Suharto sebagai **Mandataris Majlis Permusyawaratan Rakyat**, tetapi juga dipelihara dan dibina terus oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)dan Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dimana kita dapat membaca dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) produk MPR tahun 1978, bahwa **Pendidikan Agama** ditempatkan pada bahagian Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Penempatan "**Pendidikan Agama**" pada "**Bahagian Agama**", bukan pada "**Ba-**

hagian Pendidikan", menunjukkan bahwa MPR menghendaki agar "Pendidikan Agama" diurus dan dilola oleh Departemen Agama, bukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Departemen Agama Yang Berwenang Mengelola Pendidikan Agama

Dari uraian dan fakta-fakta yang telah dikemukakan, nyatalah bahwa lembaga yang berwenang mengelola dan mengurus Pendidikan Agama, yaitu Departemen Agama, yang pembentukannya atas kehendak Rakyat Indonesia yang beragama, terutama Ummat Islam, yang modalnya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia cukup banyak dan tidak dapat dilupakan begitu saja.

Sudah lebih 30 tahun kepada Departemen ditugaskan untuk mengurus dan mengelola madrasah-madrasah, sejak ibtidaiyah sampai kepada sanawiyah dan ali-[yah, pendidikan agama disekolah-sekolah umum, dan mengawasi dayah-dayah serta pesantren-pesantren yang sejak berabad-abad yang lalu telah berjasa membina dan mendidik Rakyat Indonesia, bahkan menempa mereka untuk menjadi mujahid-mujahid dan pahlawan-pahlawan serta pejuang-pejuang kemerdekaan.

Ini adalah fakta sejarah! Mengapa kini orang pura-pura hendak melupakan nya?

Dalam masa 30 tahun lebih itu, keadaan telah berjalan dengan baik, seperti yang diamanahkan oleh **Komite Nasional Indonesia Pusat** (KNIP). Setelah itu, keadaan telah menjadi mantap dan kenyataan tersebut telah mendarah daging bagi Ummat yang Beragama; tidak pernah Dewah Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR) coba-coba mentiadakan atau mengubur "Amanah KNIP" itu. Hal ini membuktikan bahwa sebahagian besar Rakyat Indonesia telah menerima seperti yang ada selama 30 tahun lebih itu, yaitu bahwa Madrasah-Madrasah, IAIN dan Pendidikan Agama di sekolah-sekolah umum diurus dan dilola oleh Departemen Agama.

Kalau sekiranya sekarang ada gagasan atau pikiran dari sementara orang hendak merobah keadaan dan kenyataan itu, berarti mereka akan melawan kehendak Rakyat terbanyak, terutama Ummat Islam.

Merobah sesuatu hal yang telah mendarah daging dan telah menjadi adat bagi rakyat, sama halnya dengan menentang arus dan sudah pasti akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan yang sukar diramalkan bagaimana akibatnya.

Hal ini harus menjadi perhatian khusus Komisi Pembaharuan Pendidiakn Nasional.

Kesimpulan saya, yaitu bahwa yang **berwenang mengurus dan mengelola Pendidikan Agama** (termasuk di sekolah-sekolah umum), **Madrasah-Madrasah, Perguruan Tinggi Agama Islam** (IAIN) dan semua lembaga **Pendidikan Agama, yaitu Departemen Agama**, seperti yang diamanahkan oleh **Komite Nasional Indonesia Pusat.**

Sebagai penutup dari uraian ini, saya ingin memperingatkan kita sekalian, termasuk Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional, agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh ayat 58 Surat An Nisa yang saya nukilkan pada awal karangan, dan Hadis Nabi yang di bawah ini :

إِنَّا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ إِنْتَظِرِ السَّاعَةَ . قِيلَ : يَارَسُولَ اللّٰهِ وَمَا إِضَاعَتُهَا ؟ قَالَ : إِنَّا مُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخارى فى صحيحة عن ابى هريرة - ر . ع)

Apabila amanah diterlantarkan, tunggulah datangnya saat kehancuran. Waktu itu seseorang bertanya : Ya Rasul Allah, bagaimana menterlantarkan amanah? Rasul menjawab : "Apabila sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah saat datangnya kehancuran!" (Riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah r.a). ***

Sambungan dari hal. 5

GBHN.

Akhirnya saya ucapkan Selamat Bekerja dalam lingkungan masing-masing. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu merestui segala usaha kita.
Terima kasih. ****

Sambungan dari hal. 18

"Oleh karena itu sekularisme harus diawasi dengan ketat supaya tidak menjadi ideologi suatu lembaga. Ia harus diamati dan diperiksa betul-betul, khususnya jika ia mengatakan dirinya tidak sebagai pandangan hidup, akan tetapi sebenarnya ia memaksakan ideologinya melalui alat-alat negara".

Kita sudah berkali-kali memperingatkan kepada bahaya sekularisme. Sekularisme akan menyebarluaskan keresahan, mengganggu ketahanan nasional dan membahayakan persatuan bangsa. ****

Sambungan dari hal. 41

natif yang paling baik dan bijaksana, yaitu berusaha membendung arus Usaha Sekularisasi dan Sekularisme disini, yang kini gejala itu cenderung meningkat dan kian terasa getar-getarnya. Tentunya demikian tergantung kepada kita sendiri, mampu dan maukah kita berbuat ??.***

Sambungan dari hal. 67

sosial kemasyarakatan dengan penuh kegotong-royongan.

10. Yang kita inginkan adalah kerukunan tuntas sesuai dengan ajaran agama itu masing-masing, bukan kerukunan semu yang dibuat-buat dan bersikap munafik.

Akhirnya tentu diserahkan kepada Pemerintah untuk menilai sikap dari masing-masing agama terhadap usaha kerukunan ini, siapa yang telah mengindahkan, perlu adanya tindakan hukum karena melanggar ketentuan-ketentuan. ****

NOVEMBER 1828 FILM TERBAIK F.F.I. 1979

Sewaktu mendengar November 1828 dinyatakan sebagai Pemenang Piala Citra F.F.I. 1979 di Palembang, kita ingin bertanya tentang alasan ianya memenangkan Citra tersebut. Apabila kemudian kita melihatnya/menontonnya memang kita lantas turut pada fihak juri untuk menyatakan kekaguman. Oleh karenanya Dewan Pimpinan Majelis Ulama pun memberikan Surat Penghargaannya.

Sekitar bulan November 1828. Pasukan kompeni Belanda menyerang sebuah kampung di Jawa Tengah untuk menangkap Sento Prawiradirja, tetapi penyerbuan tersebut gagal karena ada yang memberi tahu Sentot sebelumnya, sehingga pasukan Kompeni diperintahkan mencari orang tersebut.

Kapitan DE BORST berhasil menangkap KROMOLUDIRO yang dikenal sebagai pengikut DIPONEGORO yang sangat dihormati penduduk karena kejujurannya dan perjuangannya melawan Belanda. DJAYENG WIRONO adalah seorang demang penjilat, dan mendendam kepada Kromoludiro karena dianggapnya menghalang-halanginya untuk memungut untuk belasting (pajak) Disamping itu Kromoludiro menolak pinangannya untuk menjadikan LARAS puterinya Kromoludiro menjadi isteri anaknya BONDAN. Ialah yang mengkhianati Kromoludiro.

Kapitan De Borst memaksa agar Kromoludiro memberitahukan dimana pasukan Sentot berada. Kebungkeman Kromoludiro telah menyebabkan pasukan De Borts mengurung rumah joglo keluarga Kromoludiro dan menjadikannya benteng pertahanan untuk mencegah serangan pasukan Sentot dan sekali gus memaksa agar Kromoludiro bicara. Tetapi Kromoludiro tetap bungkem untuk memberi kesempatan pasukan Sentot menyusun kekuatan, karena ia yakin Sentot akan berhasil.

Sementara itu DJAROT seorang pemuda padepokan (santri) yang juga mencintai Laras diperintahkan lari dari kampung itu untuk bergabung dengan pasukan Sentot.

Walaupun dengan bermacam cara De Borst gagal untuk memaksa Kromoludiro membuka mulut. Seorang Letnan I VAN AKEN Indo Belanda yang ibunya asal Banten mengaku bahwa ialah yang memberi tahu pasukan Sentot, dan bersedia menunjukkan pasukan Sentot asal Kromoludiro dibebaskan. Dalam keadaan panik, akibat pengkhianatan pasukannya sendiri, De Borst menembak mati Kromoludiro dan menangkap Van Aken.

Sementara itu Bondan dituduh meracun serdadu Belanda dan tertembak mati ketika melarikan diri yang mengakibatkan Dyayeng Wirono ditangkap. Suatu rombongan wayang orang yang main di kampung itu untuk menghibur ternyata telah menyelundupkan pejuang-pejuang pasukan Sentot yang membuat kapitan De Borst semakin kalap dan mengatakan akan membunuh seluruh keluarga Kromoludiro termasuk Djarot yang tertangkap sewaktu berusaha bertemu kekasihnya Laras. Van Aken tak kalah gigihnya dari Kromoludiro dan bersikeras tidak mau menunjukkan pasukan Sentot, karena dari pengalamannya jadi tentara kompeni telah menimbulkan rasa sadar pada dirinya bahwa keinginan suatu bangsa untuk merdeka tak dapat dibendung.

Klimaksnya adalah : sewaktu Dyayeng Wirono tertembak mati, pasukan Sentot masuk kekampung itu menyerang kubu pasukan kompeni Belanda—penjajah dengan bantuan para ulama serta santri-santrinya.******

h.amiruddin siregar

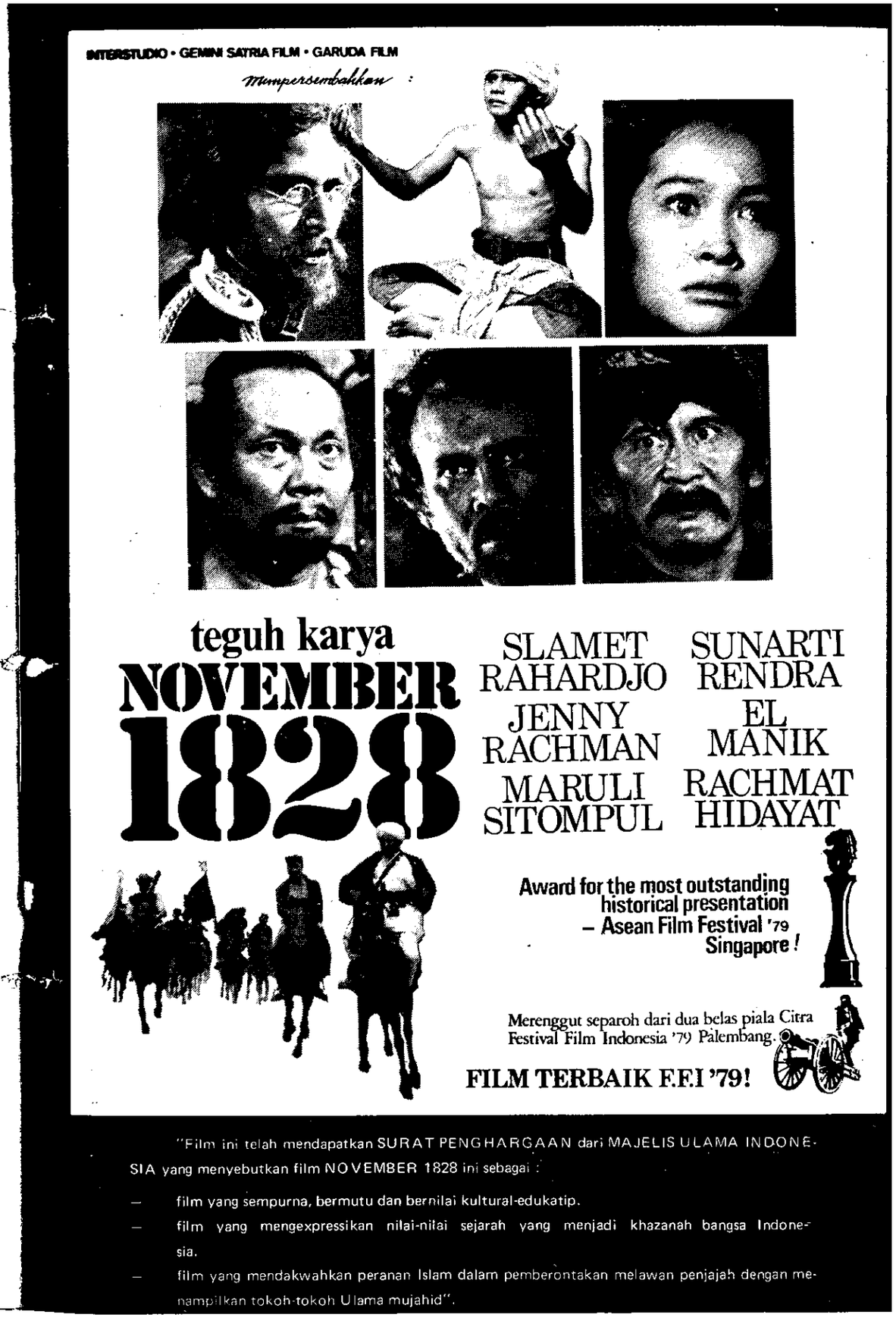

"Film ini telah mendapatkan SURAT PENGHARGAAN dari MAJELIS ULAMA INDONESIA yang menyebutkan film NOVEMBER 1828 ini sebagai :

- film yang sempurna, bermutu dan bernilai kultural-edukatip.
- film yang mengexpressikan nilai-nilai sejarah yang menjadi khazanah bangsa Indonesia.
- film yang mendakwahkan peranan Islam dalam pemberontakan melawan penjajah dengan menampilkan tokoh-tokoh Ulama mujahid".